

PERDAGANGAN LUAR NEGERI, PENANAMAN MODAL
DAN PENGARUHNYA TERHADAP
PEREKONOMIAN INDONESIA
(1979 - 1990)



PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS HASANUDDIN	
Tgl. terima	5-5-1990
Dari	
Jumlahnya	1 ekp
No. inventaris	92 06 05 08
No. ...	

OLEH

AMPAULENG

Nomor Mahasiswa : 86 01 244

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
UJUNG PANDANG

1992

**PERDAGANGAN LUAR NEGERI, PENANAMAN MODAL
DAN PENGARUHNYA TERHADAP
PEREKONOMIAN INDONESIA
(1979 - 1990)**

O. E R

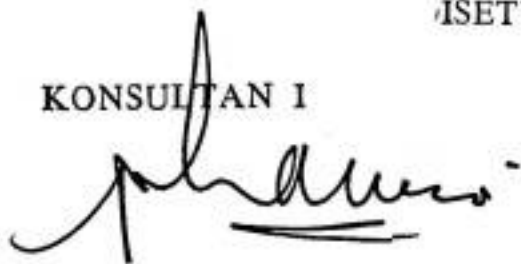
A M P A U L E N G

Nomor Mahasiswa : 86 01 244

**SKRIPSI SARJANA LENGKA UNTUK MEMENUHI SEBAHAGIAN SYARAT
GUNA MENCAPAI GELAR SARJANA EKONOMI JURUSAN ILMU
EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN PADA FAKULTAS
EKONOMI UNIVERSITAS HASANUDDIN
UJUNG PANDANG**

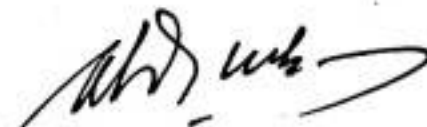
DISETUJUI OLEH

KONSULTAN I



DRS. P. HAMRIE

KONSULTAN II



DRS. A. KAHAR AKIL

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanah Wataala atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, guna memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi penulis pada jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penulisan skripsi yang membahas masalah Perdagangan Luar Negeri dan Penanaman Modal dalam perekonomian nasional ini, penulis hanya menggunakan peralatan ekonometrik yang sederhana, yaitu metode kuadrat terkecil (OLS : Ordinary Least Square) dalam melakukan pengujian empirik guna membuktikan hipotesis yang telah dikemukakan. Namun penulis tetap berharap, agar skripsi yang tampil dengan amat sederhana ini dapat diperoleh suatu manfaat bagi mereka yang tertarik kepada masalah-masalah ekonomi.

Penulis menyadari sepenuhnya pula, bahwa selama dalam proses perampungan skripsi ini, tidak sedikit rintangan dan hambatan yang membentangi jalan, namun dengan kemauan dan kerja keras penulis serta adanya spirit, motivasi, dan bantuan berbagai pihak, akhirnya rintangan dan hambatan tersebut tidak banyak memberi arti. Untuk itu dengan setulus hati penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah turut memberikan andil dalam penyelesaian skripsi ini.

Pertama-tama, diucapkan penghargaan dan rasa hormat kepada Bapak Drs. P. Hamrie selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. A. Kahar Akil selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Pimpinan dan Dosen serta Karyawan pada Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin yang selama ini banyak memberikan bantuan kepada penulis. Dan juga kepada pengelola UPT Komputer Kantor Pusat Universitas Hasanuddin yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis untuk mengolah data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis ucapkan pula banyak terima kasih.

Bapak pimpinan beserta karyawan Biro Pusat Statistik Sulawesi Selatan dan Bank Indonesia Cabang Ujung Pandang, penulis ucapkan terima kasih atas bantuannya dalam memberikan data dan informasi yang dibutuhkan selama mengadakan penelitian.

Terkhusus, sembah sujud dan baktiku kepada Ayahanda P. Lallo dan Ibunda A. Maccaiyah serta Pamanda H.A.Patellongi Sekeluarga, yang telah mendidik, membimbing dan memberi dorongan serta bantuan, baik moril maupun material sehingga penulis dapat melanjutkan pendidikan sampai dengan perguruan tinggi dan hingga pada penyelesaian skripsi ini. Demikian pula kepada saudara-saudaraku yang tercinta.

Juga penulis ucapkan terima kasih masing-masing ke-

pada Keluarga Ir. Hamzah Saleh dan Keluarga Abd. Malik, yang telah banyak memberikan andil sampai dengan penyelesaian skripsi ini.

Tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua sahabat-sahabatku yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang juga telah memberikan spirit dan motivasi hingga penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, semoga bantuan yang telah diberikan kepada penulis, mendapat balasan yang setimpal dari Allah S.W.T.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, olehnya itu keritik dan saran yang sifatnya membangun, dengan lapang dada penulis akan menerimanya sebagai suatu koreksi dan perbaikan yang mengarah, setidaknya ke arah kesempurnaan.

Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin!

Ujung Pandang, Medio Maret 1992

Penulis


A B S T R A K

Perdagangan luar negeri tak dapat dipungkiri menjadi penggerak utama roda pembangunan, bukan saja di negara maju tetapi juga di negara-negara berkembang. Atas dasar itu maka kajian mengenai perdagangan luar negeri menjadi sangat relevan bagi semua negara.

Bagi negara yang sedang melaksanakan pembangunan, keberadaan ekspor sangat penting artinya untuk meningkatkan jumlah devisa negara untuk mengimpor bahan baku dan barang modal yang sangat dibutuhkan oleh industri dan dalam mengembangkan investasi, sehingga pada gilirannya nanti akan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Untuk itu, kaitan antara ekspor dengan pertumbuhan ekonomi, ekspor dengan impor, khususnya impor bahan baku dan impor barang modal, dan impor dengan perkembangan penanaman modal serta kaitan antara penanaman modal dengan pertumbuhan ekonomi. Akan diteliti dalam penulisan ini.

Hasil pengujian empirik menunjukkan bahwa variabel ekspor migas dan ekspor non-migas memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan produk domestik bruto, dan perkembangan impor, khususnya impor bahan baku dan barang modal. Dan selanjutnya impor bahan baku dan barang modal memberikan pengaruh yang kuat terhadap perkembangan penanaman modal selama periode pengamatan tahun 1979-1990. Hal ini ditandai dengan hasil perhitungan analisa regresi



yang menunjukkan nilai t masing-masing variabel yang lebih besar dari nilai t dalam tabel. Demikian pula hasil uji-F yang nilainya cukup besar, yang menandakan eratnya pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Tidak seperti halnya yang diperlihatkan oleh penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing yang menunjukkan pengaruh sangat kecil terhadap perkembangan produk domestik Bruto selama periode pengamatan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil uji t yang lebih kecil dari t pada tabel.

Akan tetapi bila diperhatikan nilai koefisien determinasi (R^2) dan F hitung yang sangat besar, nampak bahwa secara keseluruhan penanaman modal dalam negeri dan asing mempunyai hubungan yang erat dan pengaruh yang signifikan terhadap produk domestik bruto. Sehingga kedua bentuk penanaman modal tersebut diharapkan pengaruh yang kuat bagi perkembangan ekonomi saat ini dan dimasa-masa mendatang.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Masalah Pokok	9
1.3. Tujuan dan Kegunaan	11
1.4. Hipotesis	11
 BAB II METODOLOGI	
2.1. Kerangka Konseptual	13
2.2. Metode Penelitian	14
2.3. Jenis dan Sumber Data	15
2.4. Definisi Variabel	15
2.5. Metode Analisis	16
2.6. Pengambilan Keputusan	19
2.7. Sistematika Pembahasan	20
 BAB III LANDASAN TEORITIK	
3.1. Perdagangan Luar Negeri dan Pembangunan	21

	3.2. Pentingnya Ekspor bagi Pembangunan ..	34
	3.3. Pentingnya Impor bagi Pembangunan ...	42
	3.4. Sistem Perdagangan Internasional	
	Dewasa ini	48
	3.5. Peranan Penanaman Modal Dalam	
	Pembangunan	56
	3.5.1. Penanaman Modal Dalam Negeri..	61
	3.5.2. Penanaman Modal Asing	70
BAB	IV ANALISA PEMBAHASAN	
	4.1. Gambaran Umum Perekonomian	
	Indonesia	81
	4.2. Perkembangan Ekspor Indonesia	101
	4.3. Perkembangan Impor Indonesia	119
	4.4. Perkembangan Penanaman Modal	
	di Indonesia	129
	4.5. Hasil-hasil Pengujian Empirik	143
BAB	V PENUTUP	
	5.1. Kesimpulan	153
	5.2. Saran-saran	157
DAFTAR	PUSTAKA	160

70
21
49

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
IV.1.1. Perkembangan Produk Domestik Bruto dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	82
IV.1.2. Laju Inflasi di Indonesia (1979-1990)	85
IV.1.3. Komposisi Bantuan Luar Negeri Tahun 1979/80-1990/91	87
IV.1.4. Penerimaan Migas, Beban Utang dan Bunga Tahun 1979/80 - 1990/91	90
IV.1.5. Penerimaan Dalam Negeri, Pengeluaran Rutin dan Tabungan Pemerintah 1979/80 -1990/91 ..	93
IV.1.6. Neraca Pembayaran Indonesia	97
IV.1.7. Cadangan Devisa 1979 - 1990	99
IV.2.1. Perkembangan Ekspor Indonesia 1978 -1990 ..	102
IV.2.2. Perkembangan Ekspor non-migas Menurut Jenis Produksi 1979 - 1990	104
IV.2.3. Ekspor Menurut Pelabuhan Ekspor Yang Penting	109
IV.2.4. Perkembangan Ekspor Menurut Negara Tujuan	112
IV.2.5. Perkembangan Ekspor Non-Migas Menurut Negara Tujuan 1984 - 1990	116
IV.3.1. Perkembangan Impor Indonesia 1978 - 1990 ..	120
IV.3.2. Komposisi Nilai Impor Menurut Golongan Ekonomi 1978 - 1990	123
IV.3.3. Impor Menurut Pelabuhan Impor Yang Penting 1980 - 1990	126

	Halaman
IV.3.4. Impor Menurut Negara Asal Utama	128
IV.4.1. Perkembangan Penanaman Modal di Indonesia 1979 - 1990	131
IV.4.2. Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Menurut Sektor Ekonomi	135
IV.4.3. Proyek Penanaman Modal Asing (PMA) Menurut Sektor Ekonomi	136
IV.4.4. Proyek Penanaman Modal Asing (PMA) Menurut Negara Asal	141

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar III.1 Keuntungan Dalam Perdagangan Luar Negeri	27
Gambar III.2 Doktrin Vent For Surplus	30
Gambar III.3 Doktrin Productivity	32
Gambar III.4 Kurva Marginal Efisiensi of Capital (MEC) atau (MEI)	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional sebagai proses perubahan yang mendasar dalam pembangunan masyarakat, tidak terlepas dari konteks dan pengaruh dari dunia luar. Berbagai aspek perkembangan internasional dan regional sangat akan berpengaruh terhadap perkembangan negara dan masyarakat Indonesia, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dewasa ini kehidupan tiap negara dan bangsa semakin terkait dengan perkembangan keadaan di bagian-bagian dunia lain. Interdependensi ini semakin terasa dengan meningkatnya peranan teknologi dan komunikasi, peranan sumber daya alam, perdagangan internasional dan bahkan perubahan-perubahan kekuasaan yang terjadi di bidang politik.

Indonesia seperti halnya negara berkembang pada umumnya menganut perekonomian terbuka, senantiasa berinteraksi dengan negara-negara lain dalam transaksi perdagangan internasional (ekspor-impor barang dan jasa), penanaman modal, kerjasama teknik, sistem pengaturan devisa bebas, dan sebagainya. Membawa implikasi berupa kepekaan yang tinggi bagi ekonomi nasional bila terjadi gejolak pada perekonomian negara-negara lain, utamanya mitra dagang Indonesia.

Setiap negara sedang berkembang atau sedang melaksanakan pembangunan pada umumnya menghadapi permasalahan eko-

nomi dalam usaha untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan terdapatnya tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas ekonomi yang mantap. Melalui perdagangan antar negara maka kebutuhan yang diperlukan akan dapat terpenuhi, sehingga permasalahan yang dihadapi dapat dikurangi dan upaya pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang diinginkan dapat berhasil. Dalam hubungan ini Suhadi Mangkusuwondo mengemukakan bahwa :

"Perdagangan luar negeri perlu dikembangkan guna mendukung tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi yang diinginkan, dengan berusaha untuk meningkatkan sektor perdagangan luar negeri; sebab dengan makin berkembangnya perdagangan makin besar pengaruhnya terhadap perekonomian, baik pengaruhnya secara langsung maupun secara tidak langsung melalui usaha peningkatan volume maupun nilai perdagangan luar negeri." 1)

Ketergantungan Indonesia terhadap ekspor semakin terasa karena hasil ekspor ini digunakan untuk meningkatkan jumlah devisa negara untuk mengimpor bahan baku dan barang-barang modal yang diperlukan dalam proses pembangunan dan juga barang-barang untuk kebutuhan konsumsi. Pada tahap pembangunan sekarang ini Indonesia masih belum mampu menghasilkan semua barang modal dan bahan baku yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan, dan masih harus didatangkan dari luar negeri. Sejalan dengan perkembangan perekonomian, kebutuhan akan impor bahan baku dan barang-barang modal juga semakin meningkat. Disini terlihat bahwa disamping ekspor

1) Suhadi Mangkusuwondo, Perdagangan dan Pembangunan, (Jakarta: Lembaga Penerbit Universitas Indonesia), 1986, hal. 24

maka sektor impor pun memegang peranan yang sangat penting bagi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi dalam negeri, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Rachman Panetto, bahwa :

"Impor dibutuhkan untuk mewujudkan stabilitas perekonomian negara, jika ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama barang-barang konsumsi yang belum sepenuhnya dapat diproduksi dalam negeri. Bila impor ditujukan untuk membeli bahan baku dan barang modal, maka dapat mempertinggi pembangunan ekonomi, sehingga bisa memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, dengan demikian akan mempertinggi pertumbuhan ekonomi." 2)

Dengan demikian impor barang-barang modal yang memungkinkan terjadinya transfer teknologi dan impor bahan baku atau bahan penolong hanya dapat dilakukan tanpa menambah masalah dalam perekonomian negara jika diikuti oleh kenaikan persediaan devisa yang cukup memadai, dan untuk menghasilkan devisa yang cukup besar, maka ekspor harus senantiasa didorong dan dikembangkan. Dalam hal ini menurut Suhadi-Mangkusuwondo bahwa :

"Semakin besar penghasilan devisa suatu negara semakin besar kemampuan untuk mengimpor kebutuhan-kebutuhan pokok yang masih diperlukan; termasuk barang-barang modal, bahan baku atau barang setengah jadi yang diperlukan oleh industri dalam negeri." 3)

Dalam hal ini sasaran yang ingin dicapai di bidang impor adalah agar devisa yang telah diperoleh penggunaannya senantiasa diarahkan secara efektif dan efisien dalam me-

2) A.R. Panetto, Ekspor, Perkembangan Industri, Kesempatan kerja dan Perkembangan Perekonomian Indonesia, (Ujung-Pandang: Disertasi, tidak diterbitkan), 1987, hal.169.

3) Suhadi Mangkusuwondo, op cit, hal. 20

ngimpor jenis dan jumlah barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan dalam negeri. Dilain pihak produksi dalam negeri harus tetap diusahakan agar mempunyai daya saing terhadap barang impor.

Upaya untuk terus mengembangkan kegiatan yang berorientasi ekspor ini, merupakan tindakan yang akan memberikan dampak terhadap tersedianya lapangan kerja, dan keinginan untuk melakukan investasi dan hal ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Rachman Panetto :

"Secara umum dapat dikemukakan sektor ekspor mempunyai arti yang penting sekali dalam mengembangkan perekonomian, sehingga mampu memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi secara sangat berarti." 4)

Pada pelita IV peranan ekspor mengalami penurunan bila dibanding peranan ekspor terhadap PDB. pada pelita II. Peranan ekspor yang besar pada pelita II hingga awal pelita III tidak terlepas dari tingginya harga minyak bumi maupun volume ekspornya. Harga minyak bumi Indonesia mengalami lonjakan dari US\$ 10,80 per barrel pada tahun 1974 menjadi US\$ 35,00 per barrel pada tahun 1981. Setelah itu harga minyak mulai menurun hingga mencapai harga terendah pada tahun 1986 sebesar US\$ 9,83 per barrel. Semenjak anjloknya harga minyak dan gas bumi, yang merupakan sebagian besar pendapatan negara, semakin terasa desakan untuk meningkatkan ekspor komoditi non migas. Mengembangkan ekspor non mi-

4) A.R. Panetto, op cit, hal. 117

gas tidak saja sekedar untuk mendapatkan devisa sebanyak-banyaknya dari hasil ekspor, melainkan ekspor dapat menjadi pendorong perekonomian nasional.

Selanjutnya, dalam menciptakan laju pertumbuhan ekonomi suatu negara juga diperlukan adanya investasi dalam jumlah yang cukup besar. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang sedang giatnya melaksanakan program pembangunan nasional, sudah barang tentu memerlukan dana investasi yang tidak sedikit jumlahnya.

Keadaan resesi ekonomi dunia yang berlangsung sejak tahun 1979 mengakibatkan makin terbatasnya sumber dana, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam rangka menghadapi masalah ini, yakni makin berkurangnya kemampuan pemerintah menyediakan dana, sedangkan keperluan investasi di tahun-tahun mendatang semakin meningkat. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah kebijaksanaan moneter yang mengarah kepada penghematan, termasuk pembatasan penyertaan modal pemerintah dalam investasi baru. Oleh karena itu pengalihan dana dari sektor swasta, baik nasional maupun asing untuk kegiatan penanaman modal perlu lebih diutamakan dan digairahkan agar intensitas pembangunan nasional di bidang ekonomi tetap tinggi, sehingga momentum dan kelangsungan-pembangunan tetap terpelihara.

Undang-undang penanaman modal asing perlu dilihat dari keterbatasan kita dalam permodalan, teknologi, keterampilan, manajemen dan pemasaran luar negeri. Oleh karena itu

usaha mendorong partisipasi luar negeri untuk menanam modalnya di Indonesia harus diarahkan pada peningkatan kemampuan sendiri dalam mengatasi keterbatasan-keterbatasan tersebut. Potensi luar negeri perlu dimanfaatkan melalui penanaman modal luar negeri (PMA), dengan mengarahkan investasinya secara selektif ke bidang-bidang usaha yang menggunakan teknologi maju, serta sesuai dengan program dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

Dewasa ini kesempatan yang diberikan pemerintah kepada pihak swasta nasional cukup besar, namun tak dapat dipungkiri investor dalam negeri belum mampu memenuhi keseluruhan investasi tersebut, sehingga masih dibutuhkan sumber investasi dari luar negeri sebagai jalan keluar. Berkaitan dengan hal ini, Allan M. Strout mengemukakan bahwa :

"Modal asing membantu Indonesia mengatasi untuk sementara masalah kekurangan dalam bidang tenaga-tenaga ahli (human skills) dan teknologi, tabungan - dalam negeri, dan devisa (valuta asing). Dengan mengatasi kekurangan itu, suatu kenaikan yang lebih berarti dalam tingkat pertumbuhan PDB. akan dimungkinkan, dibandingkan dengan hanya menggunakan sumber-sumber dalam negeri saja." 5)

Pembiayaan investasi sebahagian besar sangat diharapkan dari sektor swasta. Namun sejauh mana peranan swasta, tentunya sangat tergantung pada peranan pemerintah dalam usaha merangsang partisipasi sektor swasta untuk melakukan investasi dengan menciptakan iklim yang menarik bagi sektor

5) Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaya, Teori dan Strategi Pembangunan Nasional. (Jakarta: Gunung Agung), 1982, hal. 83

swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Usaha pemerintah untuk merangsang investasi modal swasta nasional dan asing, semakin disempurnakan dengan serangkaian deregulasi dan debirokratisasi. Dimana pola investasi setelah deregulasi 1986 adalah bersifat padat karya dan berorientasi pada ekspor. Sehingga diharapkan peranan sektor swasta makin meningkat diantaranya melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), maupun Penanaman Modal Asing (PMA).

Sebagaimana dimaklumi dalam pelita V, diperlukan dana investasi yang cukup besar (239 trilyun) untuk dapat mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi 5% per tahun. Dari jumlah ini sekitar 107 trilyun (45%) diharapkan investasinya dapat dilaksanakan oleh pemerintah, dan selebihnya sekitar 132-trilyun (55%) dari masyarakat dunia usaha swasta.

Menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang semakin menggelora, yaitu penduduk yang masih bertumbuh diatas 2% setahun, angkatan kerja yang selalu bertambah sekitar 2 juta per tahun, kewajiban terhadap utang luar negeri yang masih cukup berat, maka pemerintah kelihatannya sudah siap dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang pragmatis dan strategis. Pragmatis dalam artian disesuaikan dengan keadaan di Indonesia, strategis dalam arti cakupannya menjangkau masa mendatang yang cukup jauh.

Untuk mencapai tujuan makro ekonomi, seperti pemerataan hasil pembangunan, pertumbuhan ekonomi paling tidak 5% setahun, kesempatan kerja dan stabilitas ekonomi dengan -

tingkat inflasi dibawah 10%. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah di bidang penawaran sektor riil (supply-side) dan di bidang permintaan (demand side).

Di bidang penawaran, kebijaksanaan deregulasi yang dimulai dengan paket ekspor di tahun 1982, kemudian diikuti lebih jauh dengan beberapa kebijaksanaan deregulasi secara berantai di bidang perdagangan dan industri, yang kesemuanya itu bertujuan untuk menciptakan iklim dan peluang serta kesempatan sedemikian rupa sehingga menyebabkan para dunia usaha swasta terangsang untuk melakukan investasi. Yang sekaligus memberikan gambaran bahwa peranan investasi sektor swasta terhadap pembentukan PDB. pada tahun-tahun mendatang diperkirakan semakin meningkat.

Apabila kesempatan dan peluang itu ingin dimanfaatkan oleh dunia usaha swasta, pada gilirannya sudah barang tentu memerlukan pembiayaan, maka secara terencana pemerintah telah menderegulasi sektor keuangan sejak bulan juni 1983. Deregulasi disektor permintaan ini kemudian disempurnakan lagi dengan paket Desember 87, paket Oktober 88, paket Desember 88, dan seterusnya. Sebagai akibat dari semua itu bagi dunia usaha tersedia banyak pilihan untuk membiayai kegiatan investasinya.

Deregulasi perekonomian tersebut mencerminkan perubahan strategi pemerintah dalam membiayai pembangunan nasional. Penurunan nilai riil penerimaan negara dan peningkatan beban pembayaran utang luar negerinya, telah mengurangi ke-

mampuan pemerintah untuk melakukan investasi. Sehingga sejak tahun 1983 tersebut telah berusaha menggali dana pembangunan yang bersumber dari dalam negeri, yaitu pengerahan dana masyarakat lewat perbankan, peningkatan penerimaan dari sektor pajak, dan peningkatan penerimaan devisa dari ekspor non migas, serta mendorong investasi swasta, dengan mengeluarkan serangkaian paket deregulasi di bidang moneter, perdagangan dan penanaman modal. Dengan perubahan struktur perekonomian Indonesia dalam 5 tahun terakhir terutama orientasi kepada bukan migas, akan lebih mendorong minat investasi swasta. Pengalaman menunjukkan bahwa negara majupun - dapat sukses menata perekonomiannya karena adanya sumbangan sektor swasta yang lebih besar.

Berdasarkan uraian diatas, kami tertarik memilih judul: "PERDAGANGAN LUAR NEGERI, PENANAMAN MODAL, DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA" PERIODE 1979 - 1990.

1.2. Masalah Pokok

Tidak dapat disangkal lagi bahwa perdagangan luar negeri sangat penting dalam mengembangkan perekonomian suatu negara. Hampir setiap negara di dunia ini, terus mengupayakan agar eksportnya mengalami terus kenaikan. Upaya untuk meningkatkan ekspor tersebut baik volume maupun nilai eksportnya, oleh pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijaksanaan yang akan mendorong peningkatan ekspor, khususnya ekspor non migas. Demikian pula impor, peranannya tak kalah penting pula dalam usaha mengembangkan perekonomian negara.

Di negara-negara berkembang impor, dalam hal ini bahan baku dan barang modal, disamping untuk menutupi kekurangan juga untuk mempercepat proses alih teknologi dari negara-negara maju, sehingga negara-negara berkembang akan mampu memacu pertumbuhan ekonominya ke tingkat kesejahteraan ekonomi - yang lebih baik. Sementara itu disisi lain impor bahan baku dan barang modal hanya dapat dilakukan tanpa menimbulkan masalah dalam perekonomian negara, jika diikuti dengan persediaan devisa yang cukup memadai.

Juga sering dikatakan bahwa masalah utama dalam pembangunan adalah pengadaan investasi, karena kemampuan pemerintah sangat terbatas, sehingga pembiayaan investasi sebagian besar sangat diharapkan dari pihak swasta. Pemerintah berusaha menciptakan iklim yang menarik bagi pihak swasta, dengan mengeluarkan serangkaian paket deregulasi dan debirokratisasi. Sehingga diharapkan peranan sektor swasta semakin meningkat diantaranya melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA).

Namun yang menjadi permasalahan pokok adalah sejauh mana sektor luar negeri, dalam hal ini Ekspor dan Impor, baik itu ekspor migas atau ekspor non migas maupun impor-bahan baku dan barang modal, mempunyai pengaruh terhadap perekonomian nasional. Begitu pula kegiatan penanaman modal, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), seberapa besar mempunyai pengaruh terhadap perekonomian Indonesia selama periode pengamatan.

1.3. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk melihat hubungan antara ekspor, dalam hal ini ekspor migas dan ekspor non migas dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
- b. Untuk mengetahui sejauh mana ekspor mempengaruhi impor, demikian pula pengaruh impor terhadap pembentukan investasi (penanaman modal).
- c. Untuk melihat tingkat signifikansi antara Penanaman Modal, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), dengan Produk Domestik Bruto.

Dan adapun kegunaan penulisan ini adalah :

- a. Sebagai pemahaman dasar di dalam memanfaatkan peralatan-peralatan ekonomi, apabila akan dipergunakan sebagai alat pengambilan kebijaksanaan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian kearah yang diinginkan.
- b. Merupakan salah satu bahan perbandingan bagi yang akan mempelajari atau mendalami permasalahan yang serupa di masa yang akan datang, atau sebagai bahan informasi bagi yang membutuhkan.

1.4. H i p o t e s i s

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka studi ini menguji hipotesis sebagai berikut :

- a. Ekspor dan Impor yang merupakan sektor perdagangan luar negeri, diduga mempunyai pengaruh yang kuat dalam peningkatan Produk Domestik Bruto. Yaitu melalui ekspor mi-

gas dan ekspor non migas, dan kenaikan pada ekspor juga diduga mempunyai pengaruh yang kuat bagi peningkatan - impor bahan baku dan barang modal.

- b. Impor, dalam hal ini impor bahan baku dan barang modal diduga memberikan tingkat signifikansi bagi perkembangan penanaman modal.
- c. Diduga pula bahwa penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing memberikan - tingkat signifikansi atau pengaruh yang kuat terhadap perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB).

BAB II

M E T O D O L O G I

2.1. Kerangka Konseptual

Peranan sektor luar negeri dalam hal ini perdagangan internasional, sangat besar pengaruhnya terhadap peningkatan ekonomi suatu negara. Dan biasanya peningkatan tersebut dapat dilihat atau diukur dari rasio antara perdagangan internasional itu sendiri terhadap produk domestik bruto.

Sumbangan ekspor - impor terhadap pembangunan nasional ini, dapat ditelaah melalui hubungan laju pertumbuhan ekonomi nasional dengan perkembangan ekspor - impor, atau dengan kata lain perkembangan ekspor dalam membiayai barang-barang impor (bahan baku dan barang modal). Yang sangat dibutuhkan dalam proses industrialisasi maupun untuk menciptakan investasi, dalam rangka untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.

Untuk itu kaitan antara ekspor (migas dan non migas), impor (bahan baku dan barang modal) dan Penanaman Modal (penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing) serta produk domestik bruto akan diteliti dalam penulisan ini.

Lingkungan ekonomi eksternal yang dihadapi Indonesia telah memburuk dengan nyata sejak permulaan tahun 1980-an, dan terutama sejak tahun 1986. Merosoknya harga minyak yang merupakan sumber utama penerimaan pemerintah, mengakibatkan berkurangnya kemampuan pemerintah menyediakan dana pembangu-

nan, serta mengatasi beban pembayaran utang luar negerinya. Untuk menahan kemerosotan dalam anggaran keuangan dan neraca pembayarannya, Indonesia sesungguhnya sudah berada dalam proses penyesuaian sepanjang tahun 1980-an. Dalam pada itu, negara ini juga harus memelihara pertumbuhannya dan mendiversifikasikan ekonominya untuk mengurangi ketergantungan pada sektor minyak. Dalam pada itu reformasi kebijaksanaan ekonomi dengan serangkaian deregulasi dan debirokratisasi di bidang moneter, industri dan perdagangan telah dilakukan.

Usaha-usaha penyesuaian tersebut telah menunjukkan hasil yang mengesankan. Pada tahun 1987 pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) riil negara ini telah pulih kembali, sektor non migas telah diperkuat dan defisit anggaran negara maupun defisit neraca pembayarannya telah menurun dengan tajam. Atas dasar pertimbangan ini maka pembahasan ini mencakup periode pembangunan tahun 1979 - 1990.

2.2. Metode Penelitian

Dalam upaya untuk membuktikan hipotesis yang telah dibuat, maka metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian yang bersifat kepustakaan. Dimana data yang diperlukan diperoleh dari perpustakaan Bank Indonesia, kantor Biro Pusat Statistik Ujung Pandang, perpustakaan Universitas Hasanuddin dan dari berbagai tulisan yang berkaitan dengan data sekunder yang dibutuhkan. Setelah data tersebut diperoleh, untuk memudahkan pengolahan data guna membuktikan hipotesis tersebut, maka digunakan alat bantu komputer.

Disamping itu, untuk melengkapi pembahasan mengenai judul skripsi ini, juga dilakukan studi kepustakaan dari berbagai literatur yang berkaitan dengan keadaan perekonomian Indonesia dan masalah perdagangan internasional.

2.3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, adalah data "time series" dari tahun 1979 sampai tahun 1990, yaitu data tentang Produk Domestik Bruto Indonesia, data Ekspor dan Impor Indonesia, data Penanamam Modal Dalam Negeri dan Asing, serta rasio ekspor, impor dan investasi terhadap PDB. Data tersebut merupakan data sekunder yang bersumber dari laporan Bank Indonesia, Biro Pusat Statistik, Kantor Wilayah Perdagangan, perpustakaan Universitas Hasanuddin dan dari berbagai publikasi yang berkaitan dengan data yang diperlukan.

2.4. Definisi Variabel

Dalam membuktikan hipotesis ada beberapa variabel yang digunakan, yaitu :

- a. Produk Domestik Bruto, adalah jumlah barang dan jasa - yang dihasilkan keseluruhan dalam waktu tertentu dengan tanpa memperhitungkan orang yang bekerja di luar negara yang bersangkutan. Data yang digunakan yaitu nilai Produk Domestik Bruto Indonesia yang dinyatakan dalam harga konstant 1983.
- b. Ekspor, merupakan permintaan luar negeri terhadap kese-

luruhan barang yang diproduksi Indonesia. Ekspor yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah nilai ekspor migas dan ekspor non migas serta nilai ekspor secara keseluruhan yang dinyatakan dalam milyar rupiah.

- c. Impor, yaitu keseluruhan barang yang didatangkan dari luar negara yang bersangkutan, karena tidak dapat dihasilkan di dalam negeri. Impor yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah impor bahan baku dan barang modal, yang nilainya secara keseluruhan dinyatakan dalam milyar rupiah.
- d. Investasi (penanaman modal), yaitu pembelian alat-alat produksi (termasuk didalamnya barang-barang untuk dijual) atau dengan modal berupa uang, yang ditujukan untuk mengganti alat-alat modal yang tidak dapat dipergunakan lagi dan memperbanyak jumlah alat-alat modal dalam masyarakat. Investasi yang dimaksud dalam penulisan ini adalah PMDN. dan PMA., yang nilainya dinyatakan dalam milyar rupiah.

2.5. Metode Analisa

Dalam mencari hubungan antara Ekspor, Impor, Investasi dengan pertumbuhan ekonomi oleh Edward K.Y. Chen mengembangkan suatu model atas dasar model steady growth Harrod Domar, dengan memasukkan unsur Impor sebagai komponen yang sangat penting dalam proses pembentukan modal (investasi). Untuk melihat hubungan tersebut, dengan menggunakan data kuantitatif dan analisa regresi, maka menurut "Chen" dengan meregresi secara langsung antara pendapatan dan ekspor, im-

por barang modal dengan ekspor, selanjutnya investasi dengan impor barang modal dan kemudian dilakukan regresi antara pendapatan dengan investasi. Hanya dengan melakukan regresi antara variabel independen dan variabel dependen, maka hubungan positif tersebut dapat diperoleh. Dalam hal ini, Edward K.Y. Chen menyajikan suatu model simultan sbb:⁶

$$Y = a_0 + a_1 X + a_2 Y_{-1}$$

$$M = b_0 + b_1 X + b_2 M_{-1}$$

$$I = c_0 + c_1 M + c_2 I_{-1}$$

$$Y = d_0 + d_1 I + d_2 Y_{-1}$$

Berdasarkan model diatas, untuk kasus yang terjadi di-Indonesia dan untuk membuktikan hipotesa yang telah dikemukakan, dikembangkan dalam bentuk regresi linier berganda, dengan menganggap bahwa ; ekspor terdiri dari ekspor migas dan ekspor non migas, serta impor terdiri dari impor bahan baku dan impor barang modal, dan begitu pula investasi terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Yang secara bersama-sama dianggap berpengaruh terhadap persamaan fungsinya, dan juga untuk mengetahui berapa besar pengaruh masing-masing variabel bebas-tersebut terhadap variabel terikatnya. Sehingga model tersebut akan menjadi sebagai berikut :

6) Edward K.Y. Chen, Export Expansion and Economic Growth in some Asian Economic: A Simultaneous Equation Model Growth and Resource, Vol.3, hal.284

$$Y_t = a_0 + a_1 X_{mi} + a_2 X_{nm} + a_3 Y_{-1}$$

$$M = b_0 + b_1 X_{mi} + b_2 X_{nm} + b_3 M_{-1}$$

$$I = c_0 + c_1 M_{bb} + c_2 M_{bm} + c_3 I_{-1}$$

$$Y = d_0 + d_1 I_{dn} + d_2 I_{as} + d_3 Y_{-1}$$

Berhubung data masing-masing variabel diperkirakan tidak linier, dan untuk mendapatkan hasil regresi yang lebih baik dari data yang digunakan, maka akan dipergunakan ln.

$$\ln Y = a_0 + a_1 \ln X_{mi} + a_2 \ln X_{nm} + a_3 \ln Y_{-1}$$

$$\ln M = b_0 + b_1 \ln X_{mi} + b_2 \ln X_{nm} + b_3 \ln M_{-1}$$

$$\ln I = c_0 + c_1 \ln M_{bb} + c_2 \ln M_{bm} + c_3 \ln I_{-1}$$

$$\ln Y = d_0 + d_1 \ln I_{dn} + d_2 \ln I_{as} + d_3 \ln Y_{-1}$$

a_0, b_0, c_0, d_0 , = adalah konstanta. -1 = time lag.

a_1, b_1, c_1, d_1
 a_2, b_2, c_2, d_2
 a_3, b_3, c_3, d_3 } merupakan koefisien regresi atau parameter yang hendak ditaksir.

Keterangan :

Y = Produk Domestik Bruto

X_{mi} = Ekspor migas

X_{nm} = Ekspor non migas

M_{bb} = Impor bahan baku

M_{bm} = Impor barang modal

I_{dn} = Penanaman Modal Dalam Negeri

I_{as} = Penanaman Modal Asing

M = Impor (impor bahan baku dan barang modal)

I = Penanaman modal (PMA + PMDN)

2.6. Pengambilan Keputusan

Dasar pengambilan keputusan sebagai hasil pengujian hipotesis, untuk mengetahui tingkat signifikansi dari masing-masing koefisien regresi variabel independent terhadap variabel dependent, maka akan digunakan uji statistik sebagai berikut :

- Uji Statistik t

Untuk mengetahui tingkat signifikansi antara variabel independent terhadap variabel dependent secara individual, dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% atau 10%. Variabel-variabel tersebut dikatakan signifikan, jika nilai t hitung sama atau lebih besar dari t tabel.

- Uji Statistik F

Untuk mengetahui tingkat signifikansi antara variabel independent secara menyeluruh terhadap variabel dependent, variabel tersebut dikatakan signifikan, bila nilai uji F hitung sama atau lebih besar dari nilai F tabel. Pada tingkat signifikansi 1% atau 5%.

- Uji Statistik R^2

Digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara variabel independent terhadap variabel dependent.

- Uji Statistik Durbin Watson (DW)

Uji ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya otokorelasi pada data yang digunakan.

2.7. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, masalah pokok, tujuan dan kegunaan penulisan serta hipotesis.

Bab kedua, merupakan bab yang menguraikan tentang metodologi yang mencakup kerangka konseptual, metode penelitian, jenis dan sumber data, definisi variabel, metode analisis dan sistematika pembahasan.

Bab ketiga, merupakan bab yang menyangkut bahasan teori, yaitu konsep-konsep teori yang berkenaan atau berhubungan dengan pembahasan. Yaitu teori tentang pentingnya perdagangan luar negeri, peranan ekspor dan impor bagi pembangunan, kebijaksanaan perdagangan internasional dewasa ini, peranan penanaman modal dalam negeri dan asing.

Bab keempat, merupakan bab analisa pembahasan yang meliputi uraian tentang gambaran umum perekonomian Indonesia, perkembangan ekspor dan impor Indonesia, perkembangan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing serta hasil-hasil estimasi/pengujian empirik.

Bab kelima, merupakan bab kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan judul pembahasan.

BAB III

LANDASAN TEORITIK

3.1. Perdagangan Luar Negeri dan Pembangunan

Perdagangan luar negeri tak dapat dipungkiri menjadi penggerak utama roda pembangunan, bukan saja di negara maju tetapi juga di negara-negara berkembang. Atas dasar itulah maka kajian mengenai perdagangan luar negeri menjadi sangat relevan bagi semua negara.

Mengingat pentingnya perdagangan luar negeri tersebut, maka beberapa ahli ekonomi mengemukakan pandangan-pandangan teoritik mereka terhadap sebab-sebab timbulnya perdagangan internasional, diantaranya adalah Adam Smith yang beranggapan bahwa dasar terpenting timbulnya perdagangan adalah karena adanya perbedaan faktor produksi. Namun oleh David Ricardo mengemukakan bahwa yang menyebabkan timbulnya perdagangan yaitu perbedaan harga atau biaya secara komparatif dan bukannya perbedaan biaya mutlak ataupun perbedaan faktor produksi. Kemudian Marshall beranggapan pula bahwa faktor produksi dan luasnya pasar yang menjadi dasar hubungan antar negara.¹ Sementara itu Heckscher-Ohlin yang dikenal sebagai pioner dalam teori modern perdagangan internasional mengemukakan bahwa, faktor harga lah yang menjadi dasar ter-

1) Sobri, Ekonomi Internasional: Teori, Masalah dan Kebijakan, (Yogyakarta: BPFE - UII), 1986, hal.9

jadinya perdagangan internasional, dan perbedaan harga ini disebabkan oleh perbedaan komposisi dan proporsi faktor - faktor produksi yang dimiliki oleh negara-negara di dunia.²

Perdagangan internasional juga disebabkan karena tidak semua sumberdaya yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa dapat diperoleh di dalam negeri, dan ini menyebabkan perdagangan antar negarapun meningkat dengan cepat. Oleh Soelistyo mengemukakan bahwa :

"Perdagangan antar negara memungkinkan terjadinya tukar-menukar barang-barang dan jasa-jasa, pergerakan sumberdaya melalui batas-batas negara, serta pertukaran dan perluasan penggunaan teknologi sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi negara-negara - yang terlibat di dalamnya." 3)

Dalam dunia modern sekarang, suatu negara sulit untuk dapat memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri tanpa kerjasama dan melakukan interaksi dengan negara lain. Dengan melakukan perdagangan internasional maka setidaknya-tidaknya negara yang melakukan perdagangan tersebut dapat mengatasi kekurangan dan keterbatasan dalam memenuhi kebutuhannya. Berkaitan dengan hal tersebut Michael P. Todaro mengemukakan bahwa :

"Secara teoritis, perdagangan bebas berdasarkan pada keuntungan komparatif, mempunyai dua keuntungan. Yang pertama, bahwa perdagangan memungkinkan semua negara bisa menyelamatkan diri dari kekurangan atau keterbatasan persediaan sumber-sumber mereka dan komoditi-komoditi yang terletak di luar batas-batas - kemampuan produksi mereka, dan yang kedua adalah bahwa perdagangan bebas akan memaksimalkan output/luar-

2) Sobri, Ibid, hal.42

3) Soelistyo, Ekonomi Internasional, Edisi kedua, (Yogyakarta: Liberti), 1986, hal. 7

an global, dengan mengisinkan setiap negara untuk mengadakan/melakukan spesialisasi dalam bidang apa saja yang dianggap terbaik." 4)

Motif dasar kecenderungan suatu negara untuk melakukan perdagangan adalah karena adanya Gains From Trade (manfaat yang diperoleh dari perdagangan), yang mungkin diperoleh masing-masing negara yang melakukan perdagangan. Sebagai sumber utama dari timbulnya manfaat tersebut boleh jadi karena adanya perbedaan selera ataupun pola konsumsi antara dua negara atau lebih yang melakukan perdagangan. Namun para ahli ekonomi dewasa ini pada umumnya sependapat bahwa perbedaan pola konsumsi antar negara bukanlah merupakan penyebab yang paling utama dari timbulnya perdagangan internasional. Menurutnya, penyebab yang paling utama adalah terletak pada sisi produksi, dimana suatu negara dapat menghasilkan barang tertentu secara lebih efisien dibandingkan dengan negara lain.⁵

Jadi melalui perdagangan internasional yang dilaksanakan oleh negara maju maupun negara berkembang dapat memberikan manfaat secara langsung maupun manfaat yang diterima secara tidak langsung. Manfaat langsung yang diterima yaitu dari hasil ekspor berupa devisa negara, sedang manfaat tidak langsung sebagai akibat adanya perdagangan internasional yaitu setiap negara akan menspesialisasikan diri

4) Michael P. Todaro, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Jilid Kedua, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 1983, hal. 30. (alih bahasa; Amiruddin dan Mursidi).

5) Boediono, Ekonomi Internasional, (Yogyakarta : BPFE - UGM), 1981, hal. 8

pada produksi yang memiliki keuntungan komparatif, disamping itu produktivitas suatu barang yang dihasilkan akan dapat di tingkatkan dan dapat mengurangi kelebihan produksi di dalam negeri. Sebagaimana dikemukakan oleh John Stuart Mill mengenai manfaat yang diperoleh baik secara langsung maupun secara tidak langsung dengan adanya perdagangan, bahwa:

"Perdagangan secara proporsional menghasilkan suatu-penggunaan kekuatan-kekuatan produktif dunia yang lebih efisien dan hal ini dapat dianggap sebagai keuntungan ekonomis langsung dari perdagangan luar negeri. Disamping itu ada efek tidak langsung yang harus diperhitungkan sebagai manfaat suatu tatanan tingkat-tinggi, salah satu manfaat ekonomis secara tidak langsung yang paling penting adalah kecondongan dari setiap perluasan pasaran guna memperbaiki proses produksi, suatu negara yang memproduksi buat pasaran yang lebih besar dari pasaran di dalam negeri, dapat memperkenalkan suatu pembagian kerja yang lebih luas, dapat lebih banyak menggunakan mesin-mesin dan mempunyai lebih banyak kemungkinan-kemungkinan untuk mengadakan penemuan baru dan perbaikan dalam proses produksi."⁶⁾

Perdagangan yang dilakukan antara negara maju dengan negara berkembang, dalam kaitannya dengan pengembangan pembangunan suatu negara, secara umum untuk meningkatkan manfaat yang diperoleh dari hasil perdagangan yang dilakukan oleh masing-masing negara. Dengan adanya perdagangan memungkinkan adanya perluasan alternatif atau pilihan atas barang yang bisa dikonsumsi atau diproduksi suatu negara. Dengan perdagangan, skala ekonomi yang paling efisien bagi suatu negara dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Pencapaian skala ekonomi yang paling optimal dimungkinkan karena dengan per-

6) M.L. Jhingan, Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, (Jakarta: Rajawali), 1988, hal.564.

dagangan perluasan pasar dapat dilaksanakan. Secara teknis perdagangan juga memungkinkan berkembangnya inovasi teknologi baru, sehingga memperluas pilihan produksi.

Di dalam massa klasik analisa kaitan antara perdagangan luar negeri dan pembangunan mendapat perhatian yang cukup besar seperti Ricardo, Smith, dan Mill, mereka beranggapan bahwa perdagangan luar negeri dapat memberi suatu sumbangan yang mengesankan kepada pembangunan suatu bangsa. Perdagangan dianggap tidak hanya sebagai suatu alat guna-mencapai efisiensi produktif, ia juga merupakan suatu mesin pertumbuhan. Sehingga perdagangan luar negeri dapat memberikan sumbangan yang pada akhirnya dapat memperlaju pembangunan ekonomi suatu negara.

Para ahli ekonomi tersebut mengemukakan bahwa apabila keuntungan-keuntungan dari kegiatan perdagangan luar negeri digabungkan, maka akan memberikan tiga sumbangan penting dari kegiatan perdagangan luar negeri tersebut dalam pembangunan ekonomi. Keuntungan yang terutama, yang dikemukakan oleh Ricardo menunjukkan bahwa :

"Apabila suatu negara sudah mencapai tingkat kesempatan kerja penuh, perdagangan luar negeri memungkinkannya mencapai tingkat konsumsi yang lebih tinggi, dari pada yang mungkin dicapai tanpa adanya perdagangan luar negeri, kemudian Ricardo menunjukkan bahwa walaupun sumber-sumber daya yang ada dalam suatu negara sudah sepenuhnya digunakan, dan negara tersebut kegiatan produksinya tidak lebih efisien dari negara lain, perdagangan luar negeri dapat mempertinggi tingkat konsumsi dan tingkat kesejahteraan masyarakat." 7)

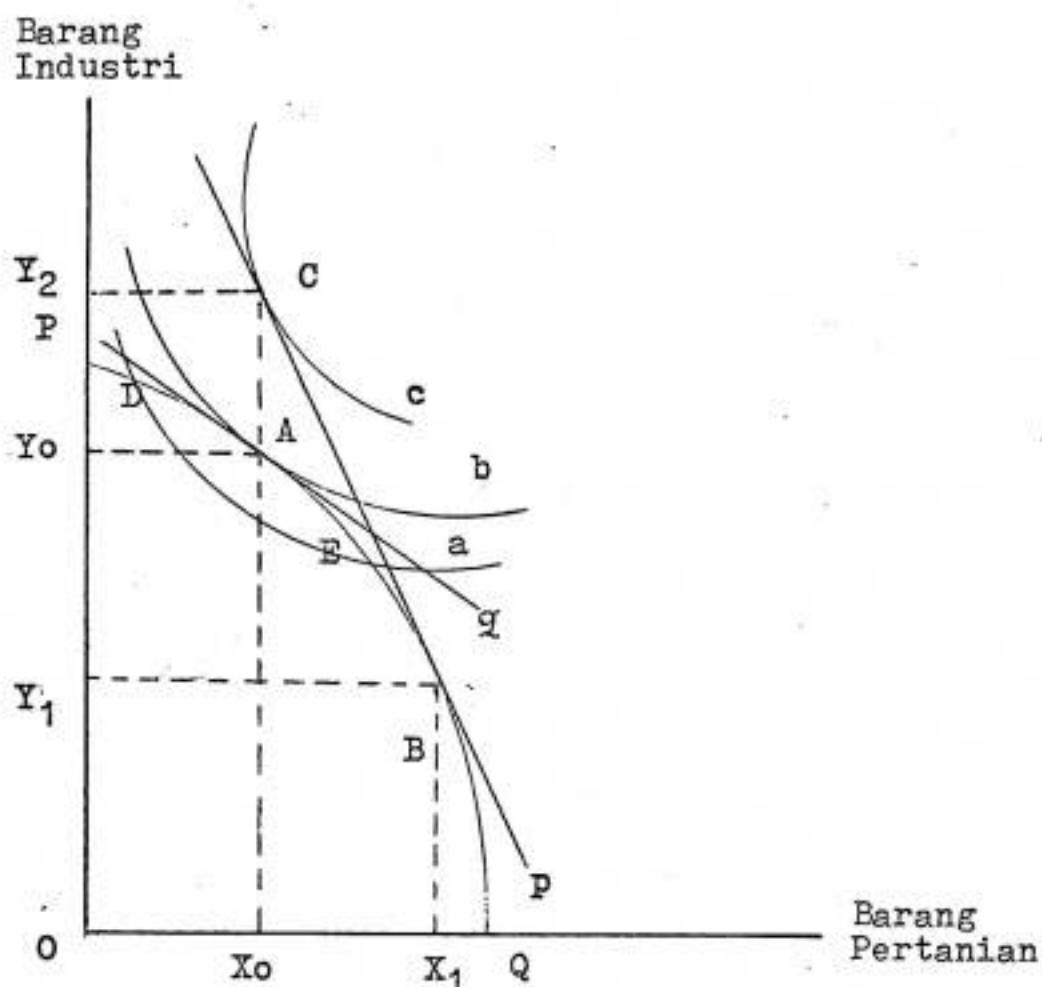
7) Sadono Sukirno, Ekonomi Pembangunan, Proses Masalah-dan Kebijaksanaan, (Jakarta: UI - Press), 1985, hal. 225

Keuntungan dari perdagangan luar negeri dalam keadaan yang dimisalkan tingkat kesempatan kerja penuh, timbul sebagai akibat adanya perbedaan harga relatif dari barang-barang yang diperdagangkan. Perdagangan yang dilakukan akan mengakibatkan tingkat konsumsi masing-masing negara akan bertambah tinggi. Sampai dimana keuntungan yang akan dinikmati suatu negara sebagai akibat adanya perdagangan luar negeri, dapat ditunjukkan dengan gambar seperti pada gambar III.1. Kurva PQ adalah kurva batas produksi, sedang kurva a, b dan c adalah "indifference curve" atau kurva kepuasan yang sama, yang menggambarkan kombinasi dari sejumlah barang yang dihasilkan, yang akan memberikan kepuasan yang sama kepada seseorang atau masyarakat. Garis vertikal menunjukkan barang industri, sedang garis horisontal menunjukkan barang pertanian. Tingkat kepuasan kurva c lebih tinggi dari pada kurva b, sedang kurva kepuasan b lebih tinggi dari pada kurva kepuasan a. Tanpa adanya perdagangan luar negeri, masyarakat akan mencapai tingkat kepuasan maksimal bila perekonomian memproduksi OX_0 barang pertanian dan OY_0 barang industri. Apabila produksi tersebut ditentukan pada titik D dan E, masyarakat belum mencapai kepuasan maksimum, karena kedua titik tersebut terletak pada kurva kepuasan yang sama yaitu kurva a, seperti telah dijelaskan bahwa kurva a lebih rendah dari kurva b.

Pada tingkat produksi seperti yang ditentukan pada titik A, harga relatif kedua barang tersebut ditunjukkan

GAMBAR III.1⁸

KEUNTUNGAN DALAM PERDAGANGAN LUAR NEGERI SEBAGAI
AKIBAT SPESIALISASI



oleh garis q untuk di dalam negeri, sedang di luar negeri ditunjukkan oleh garis p , ini berarti barang industri lebih murah di luar negeri dari pada di dalam negeri, dalam keadaan seperti ini maka bila dilakukan perdagangan akan memberikan keuntungan, dengan memperbesar produksi hasil pertanian untuk ekspor, guna mendapatkan barang industri. Sesudah perdagangan produksi pertanian menjadi OX_1 dan ba-

8) Sadono Sukirno, *Ibid*, hal. 226.

rang industri menjadi OY_1 .

Garis p menyinggung garis kepuasan sama c pada titik persinggungan yaitu titik C; berarti dengan adanya perdagangan luar negeri, tingkat konsumsi masyarakat menjadi sebesar OY_2 barang industri dan OX_0 barang pertanian. Jadi ekspor barang pertanian X_0X_1 dan impor barang industri yaitu Y_1Y_2 . Gambaran ini jelas menunjukkan bahwa perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara menikmati lebih banyak barang dari pada yang dihasilkannya di dalam negeri.

Dua keuntungan lainnya dari hubungan perdagangan luar negeri, dikemukakan oleh Adam Smith dan Mill, yaitu memungkinkan suatu negara memperluas pasar dan hasil-hasil produksinya dan memungkinkan diperkenalkannya teknologi yang lebih baik dari pada yang ada di dalam negeri. Selanjutnya Adam Smith berpendapat bahwa :

"Dengan adanya perdagangan luar negeri, pertama, suatu negara dapat menaikkan produksi barang-barang yang sudah tidak dapat dijual lagi di dalam negeri akan tetapi masih dapat dijual ke luar negeri. Selanjutnya dengan adanya ekspor tersebut negara itu dapat mengimpor barang-barang luar negeri bukan saja akan memperbesar tingkat produksi, akan tetapi juga akan menambah jumlah barang yang akan dikonsumsi oleh penduduk. Kedua, perluasan pasar yang terjadi akan mendorong sektor produktif untuk menggunakan teknik produksi yang lebih tinggi produktivitasnya. Salah satu cara yang ditempuh untuk melaksanakan hal ini adalah dengan mengimpor teknologi yang lebih tinggi dari luar negeri." 9)

Mengenai akibat perdagangan luar negeri yang dapat mempertinggi tingkat produktivitas kegiatan produksi, diu-

9) Sadono Sukirno, Ibid, hal. 228

raikan lebih mendalam oleh Mill. Mill berpendapat bahwa perluasan pasar yang diakibatkan oleh perdagangan luar negeri akan menciptakan dorongan untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam teknologi yang digunakan dalam proses produksi. Perdagangan luar negeri akan mempertinggi tingkat spesialisasi, mempertinggi efisiensi penggunaan mesin yang ada, dan akan mendorong usaha untuk memperbaiki efisiensi proses produksi dengan mengadakan pembaharuan-pembaharuan.

Mill kemudian mengemukakan pendapatnya tentang apa yang akan dinikmati terutama negara-negara yang tingkat perkembangannya masih rendah, bahwa :

"Perdagangan luar negeri memberi kesempatan kepada mereka untuk: (i) menggunakan teknik produksi yang lebih baik, yang dapat diperoleh dari negara-negara yang lebih maju. (ii) mengimpor modal dari negara lain, dengan demikian dapat meningkatkan produksi yang mungkin dicapai apabila pembentukan modal hanya dibiayai oleh modal yang dikerahkan di dalam negeri, dan (iii) mengembangkan ide-ide baru yang dapat menghilangkan pengaruh-pengaruh kebiasaan lama, menciptakan keinginan-keinginan baru, mengembangkan cita-cita baru dan memperluas pandangan kedepan." 10)

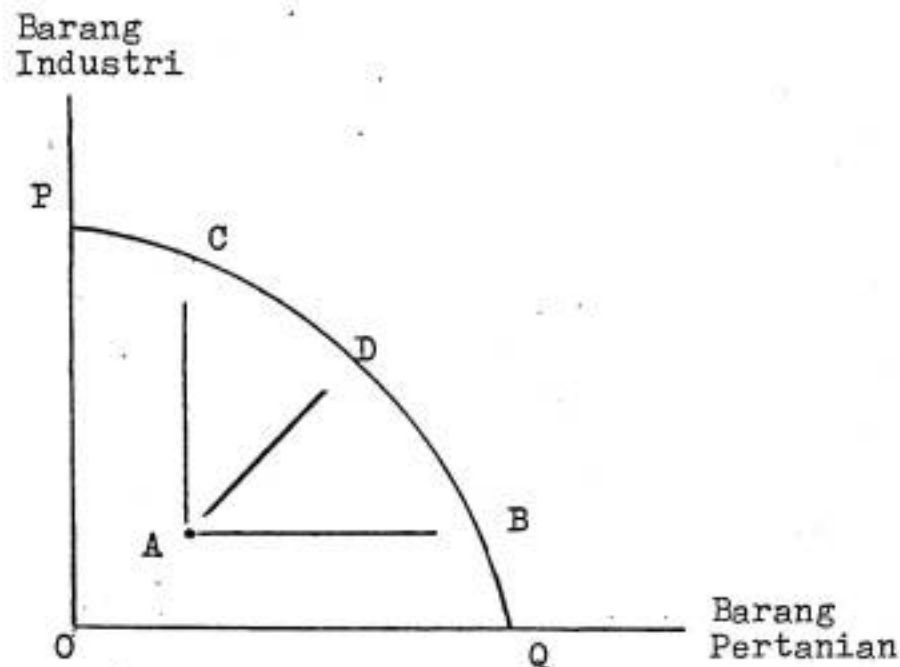
Timbulnya perluasan pasar sebagai akibat adanya perdagangan luar negeri yang dikemukakan oleh Smith, dinamakan sebagai "vent for surplus", sedang meningkatnya produktivitas sebagai akibat adanya perdagangan luar negeri yang dikemukakan oleh Mill, dinamakan sebagai "doktrin productivity". Untuk menggambarkan kedua pendapat tersebut dapat

10) Sadono Sukirno, Lo Cit.

11) Ibid., hal. 230

dilihat pada gambar III.2 dan III.3.¹¹

GAMBAR III.2
" DOKTRIN VENT FOR SURPLUS "



Pada gambar III.2. PQ merupakan kurva batas produksi sebelum perdagangan dilakukan, tingkat produksi ditentukan pada titik A. Berarti sumber-sumber daya yang terdapat dalam negara tersebut belum sepenuhnya digunakan, sebagian masih menganggur. Terjadinya keadaan seperti ini disebabkan karena permintaan terhadap barang-barang yang dapat dihasilkan di dalam negeri, yaitu barang pertanian dan industri adalah lebih sedikit dari kemampuan masyarakat tersebut untuk menghasikan. Maka dengan perdagangan luar negeri, menyebabkan pertambahan permintaan terhadap salah satu atau kedua barang tersebut, dan akan menciptakan kenaikan produksi dan penggunaan sumber-sumber daya yang lebih efisien.

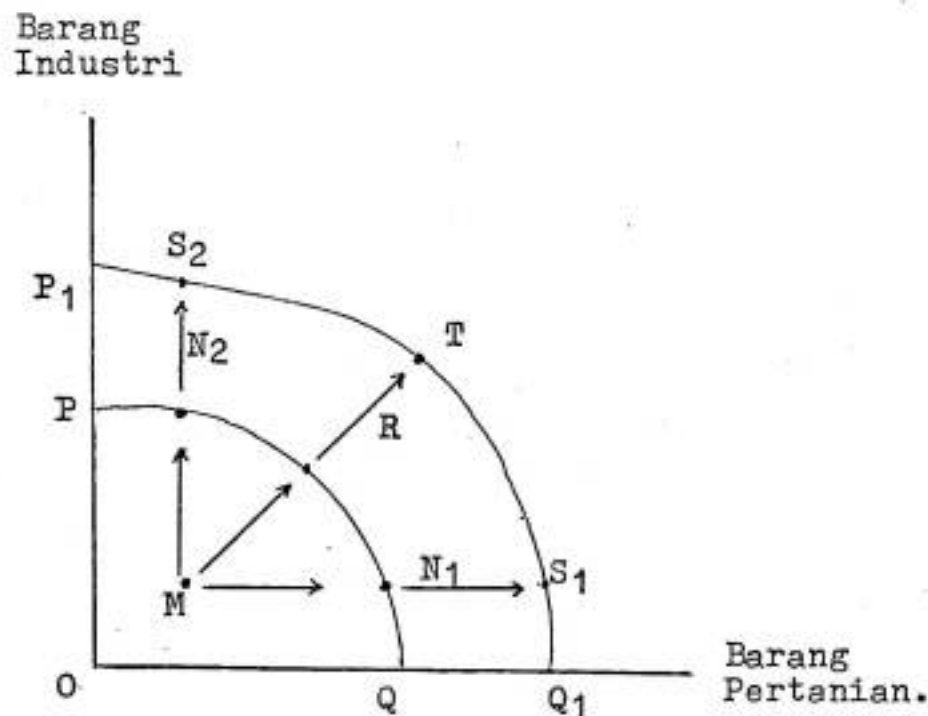
Kearah mana kenaikan produksi akan berlaku, kepada jenis barang yang akan diekspor ke luar negeri. Apabila yang mendapat pasaran di luar negeri hasil pertanian, tingkat produksi yang ditentukan oleh salah satu titik diantara A dan B, sedang apabila yang mendapat pasaran di luar negeri adalah barang industri, tingkat produksi di tentukan oleh salah satu titik yang terletak diantara A dan C. tetapi kalau barang pertanian maupun industri dapat diekspor ke luar negeri, tingkat produksi ditentukan oleh salah satu titik yang terletak dalam segitiga ABC, misalnya satu titik diantara A dan D. Apabila pasaran luar negeri dari salah-satu atau kedua jenis barang sangat luas, negara itu akan dapat mencapai tingkat kesempatan kerja penuh. Tingkat produksinya akan ditentukan oleh titik yang terletak pada kurva PQ, yaitu B atau C atau titik diantara B dan C. Sebenarnya titik tersebut tergantung pada jenis barang yang akan diekspor.

Dalam gambar III.3. Kueva PQ merupakan kurva batas produksi sebelum perdagangan luar negeri dilakukan. Selanjutnya dimisalkan sumber daya belum sepenuhnya digunakan, dengan demikian tingkat produksi ditentukan oleh titik di bawah kurva PQ, misalnya saja pada titik M. Apabila produksi dalam negeri mendapat pasaran yang luas di luar negeri, tetapi produktivitasnya tidak mengalami perubahan, produksi maksimum hanyalah terbatas sampai titik yang terletak pada N_1N_2 , yang ditentukan oleh titik R. Tetapi berdasar-

kan pada "doktrin produktivity", perdagangan luar negeri akan meningkatkan produktivitas, maka sebagai akibat adanya perdagangan luar negeri, kurva batas produksi akan berpindah ke atas, misalnya sekarang telah menjadi P_1Q_1 . Apabila terdapat cukup permintaan di luar negeri, tingkat produksi seperti ditunjukkan oleh titik tersebut akan dapat dicapai.

GAMBAR III.3

"DOKTRIN PRODUKTIVITY"



Jadi menurut teori Smith dan Mill, produksi barang yang dapat diekspor, dapat ditambah dengan menggunakan faktor produksi yang menganggur dan mempertinggi tingkat teknologi yang digunakan untuk proses produksi. Dipandang dari sudut ini kegiatan ekspor merupakan tenaga pendorong yang akan mempercepat laju pembangunan negara berkembang.

Dengan melihat hubungan antara perdagangan luar negeri dengan pembangunan akan tampak suatu keterkaitan antara keduanya, dimana perdagangan luar negeri mampu menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi suatu negara.

Namun, jika diharapkan sumbangan yang lebih besar dari sektor perdagangan luar negeri, maka perlu adanya suatu kebijaksanaan di bidang perdagangan luar negeri. Kebijaksanaan perdagangan ini memainkan peranan penting dalam pembangunan suatu negara, khususnya negara-negara berkembang.

Ada tiga sasaran yang penting untuk dipakai sebagai dasar penentuan kebijaksanaan di bidang perdagangan luar negeri. Sasaran yang pertama adalah memperluas atau mengembangkan perdagangan luar negeri, sasaran kedua adalah menjaga supaya hasil perdagangan luar negeri itu stabil dan lebih kontinue dan sasaran ketiga adalah mengusahakan agar sektor perdagangan luar negeri yang berkembang mempunyai efek yang maksimal terhadap kegiatan di sektor lain. Kalau ketiga sasaran ini bisa dicapai, maka berarti bahwa sektor perdagangan luar negeri benar-benar akan bertindak sebagai motor penggerak bagi pembangunan.

Dari uraian di atas, nampak bahwa sektor perdagangan luar negeri memberikan sumbangan terbesar bagi pembangunan ekonomi, meningkatkan laju pembentukan modal, meningkatkan industrialisasi dan menjaga keseimbangan neraca pembayaran di setiap negara; baik di negara maju terlebih di negara-negara berkembang.

3.2. Pentingnya Ekspor Bagi Pembangunan

Ekspor bagi negara yang melakukan hubungan perdagangan dengan luar negeri, sering disebut sebagai mesin penggerak pertumbuhan ekonomi. Ekspor dapat memberikan keuntungan pendapatan bagi eksportir, dengan adanya kegiatan di bidang ekspor ini, maka dapat memberikan tersedianya kesempatan kerja baru bagi masyarakat, disamping itu bagi kepentingan negara merupakan pendapatan devisa. Tersedianya devisa yang cukup dapat membantu dalam membiayai kegiatan pembangunan guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

Ekspor dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi atau pendapatan nasional riil suatu negara, oleh Hicks¹² memberikan gambaran dengan menganggap 2 negara A dan B yang melakukan hubungan perdagangan, seandainya ekonomi negara A berkembang sedang negara B tetap seperti keadaan semula, maka apabila perkembangan ekonomi di A terjadi secara merata, kemungkinan besar hal itu akan menguntungkan negara B. Hal ini timbul karena pendapatan di A meningkat, sedang di B tetap. Jadi bila dilakukan hubungan perdagangan antara A dan B, maka negara A akan dapat meningkatkan impornya yang berasal dari B. Sebagai akibat adanya kenaikan pendapatan di negara A, maka B mendapat keuntungan yaitu terjadinya kenaikan dalam pendapatan nasional riilnya dengan adanya hubungan perdagangan.

12) Soelistyo, Ekonomi Internasional, Edisi kedua, (Yogyakarta: Liberty), 1986, hal. 138

Mengenai hubungan antara ekspor dan pertumbuhan ekonomi, juga telah mendapat perhatian Kindleberger yang menyatakan bahwa : "That expanded exports offer investment opportunities and induce cost reducing innovation and economies of large scale production." ¹³ Kemudian Backerman dengan hipotesisnya : "The prospects of expanded export motivate entrepreneurs to increase their investment rate and therefore output and productivity." ¹⁴

Kedua pendapat yang dikemukakan oleh ahli tersebut bahwa, perluasan ekspor yang dilakukan oleh para eksportir dalam suatu negara dapat memberikan kesempatan untuk melakukan investasi dan dapat mengurangi biaya inovasi yang pada gilirannya dapat menciptakan produksi yang berskala besar. Bahkan hipotesis yang dikemukakan bahwa, prospek dari perluasan ekspor dapat memberikan motivasi kepada para pengusaha untuk meningkatkan investasi mereka dan pada akhirnya dapat meningkatkan output maupun produktivitas.

Jadi jelaslah dengan adanya ekspor, maka para pengusaha dapat meningkatkan investasi mereka atau melakukan inovasi baru sehingga tercipta lapangan kerja baru, dengan demikian dapat menyediakan lapangan kerja baru bagi masyarakat sehingga pendapatan mereka meningkat dan output secara keseluruhan mengalami kenaikan, hal itu dapat membe-

13) M. Yusri Zamhuri, Ekspansi Ekspor, Impor Bahan baku dan Barang modal Serta Pertumbuhan Ekonomi, (Ujung Pandang: Skripsi, tidak dipublikasikan), 1987, hal. 32

14) Ibid, hal. 33

rikan kenaikan pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Pendapat lain yang dikemukakan oleh Lamfalussy mengenai hubungan antara ekspor dengan pertumbuhan ekonomi, menekankan bahwa :

"The exportance of the balance of payment position of a country, the maintained that achievement of a surplus in the balance of payment as a result of expanded export would enable the goverment to follow expansionist policies which encouraged domestic invesment." 15)

Pendapat tersebut, bahwa sebagai hasil perluasan ekspor merupakan hal yang penting bagi posisi neraca pembayaran suatu negara, memelihara surplus pada neraca pembayaran dan memungkinkan bagi pemerintah untuk mengikuti kebijaksanaan ekspansi ekspor tersebut dalam upaya mendorong investasi domestik.

Dalam mencari hubungan antara ekspor dan pertumbuhan ekonomi, juga telah dikemukakan oleh Edward K.Y. Chen, pendapat Chen ini muncul sebagai kritik terhadap pendapat yang dikemukakan oleh Ball, yang tidak memasukkan komponen impor dalam proses pembentukan modal atau investasi. Chen mengembangkan modelnya atas dasar model Steady Growth Harrod Domar, dengan memasukkan unsur impor sebagai komponen yang sangat penting dalam proses pembentukan modal.

Upaya untuk mencari hubungan antara ekspor dengan pertumbuhan ekonomi, dapat dilihat rumusan model sebagai-

15) M. Yusri Zamhuri, Ibid, hal. 34

berikut :¹⁶

$$\begin{aligned}
 dY &= \frac{1}{v} (I) && \dots\dots\dots 1 \\
 S &= s \cdot Y && \dots\dots\dots 2 \\
 M &= m \cdot Y && \dots\dots\dots 3 \\
 X &= X_0 \cdot e^{xt} && \dots\dots\dots 4 \\
 I &= b \cdot M' && \dots\dots\dots 5 \\
 I - S &= M - X && \dots\dots\dots 6
 \end{aligned}$$

dimana :

Y = Pendapatan

S = Saving

I = Investasi

M = Impor

X = Ekspor

v = Capital Output Ratio

s = Marginal Propensity to save

m = Marginal Propensity to Impor

x = Eksponensial tingkat pertumbuhan ekspor

b = Proporsi impor barang modal dalam total investasi

M' = Impor barang-barang modal.

Pada persamaan 1, terlihat bahwa setiap perubahan dalam investasi (I) dapat mempengaruhi pendapatan nasional

16) Muhammad Yusuf, Ekspor dan Pertumbuhan Ekonomi 1976 - 1985, (Ujung Pandang: Skripsi, tidak dipublikasi), 1987, hal. 39

(Y), Dan besarnya perubahan dalam pendapatan nasional tersebut tergantung dari besarnya perubahan Capital Output-Ratio dan Investasi. Selanjutnya pada persamaan 2, perubahan tabungan (S) ditentukan oleh perubahan pendapatan (Y) dan marginal propensity to save (s) atau kecenderungan dalam menabung. Pada persamaan 3, dimana besarnya impor (M) dipengaruhi oleh kecenderungan untuk mengimpor (m) dan oleh perubahan dalam pendapatan (Y). Sedangkan besarnya perubahan dalam ekspor ditentukan oleh besarnya perubahan ekspor pada tahun dasar (X_0) dan eksponensial tingkat pertumbuhan ekspor, lihat pada persamaan 4. Selanjutnya pada persamaan 5, bahwa investasi ditentukan oleh proporsi impor barang modal dalam total investasi (b) dan jumlah impor barang-modal itu sendiri (M').

Pengembangan selanjutnya dari model Edward K.Y. Chen adalah melihat sisi impor dibagi dalam dua komponen yaitu impor barang modal (M') dan impor barang-barang konsumsi (M''). Bila diasumsikan keseimbangan perdagangan sebagai berikut :

$$X = M = M' + M'' \quad \dots\dots\dots 7$$

atau

$$M' = X - M'' \quad \dots\dots\dots 8$$

Untuk mencari hubungan antara tingkat pertumbuhan ekonomi dengan ekspor, maka pertama-tama dilakukan substitusi persamaan 8, ke dalam persamaan 5. Kemudian hasilnya disubstitusikan lagi pada persamaan 1. Sehingga pada akhir-

nya diperoleh rumusan model berikut :

$$\frac{dY}{Y} = \frac{b}{v} \left(\frac{X}{Y} - \frac{M'}{Y} \right) \dots\dots\dots 9$$

Berdasarkan perolehan rumus tersebut pada persamaan 9, maka menurut Edward K.Y. Chen, menghasilkan suatu model yang menunjukkan hubungan positif antara tingkat pertumbuhan pendapatan dan proporsi penerimaan yang berasal dari ekspor. Hubungan selanjutnya yang menunjukkan kaitan yang positif dan sangat berarti adalah setiap kenaikan dalam ekspor akan dapat membantu membiayai impor barang-barang modal. Dengan adanya impor barang-barang modal yang sangat diperlukan dalam proses pembangunan, maka pada gilirannya dapat merangsang dan mendorong pembentukan modal, yang akhirnya juga dapat menopang terciptanya tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Untuk melihat hubungan positif tersebut dengan menggunakan data kuantitatif dan analisa regresi, maka menurut "Chen" yaitu dengan meregresi secara langsung antara pendapatan dan ekspor, impor barang modal dengan ekspor, selanjutnya investasi dengan impor barang-barang modal dan kemudian dilakukan regresi antara pendapatan dengan investasi. Hanya dengan melakukan regresi antara variabel independent dan variabel dependent, maka hubungan positif tersebut dapat di peroleh.¹⁷

17) Muhammad Yusuf, Ibid, hal. 41

Dengan melihat hubungan antara ekspor dan pertumbuhan ekonomi, selanjutnya menurut Meier dan Baldwin bahwa penciptaan ekspor melalui perdagangan antar negara dapat menjadi penting karena :

"Sektor ekspor dapat menjadi sektor utama : Pertama, pasar di negara lain memperluas pasar bagi barang-barang tertentu. Sebagaimana telah ditekankan oleh ahli-ahli ekonomi klasik, suatu industri dapat bertumbuh lebih cepat jika industri tersebut dapat menjual hasilnya di negara lain, dari pada hanya pasar di dalam negeri yang lebih sempit. Kedua perluasan perdagangan untuk ekspor mempermudah pembangunan - apabila industri yang dibutuhkannya seandainya barang tersebut di jual di dalam negeri. Pasar dalam negeri terbatas, tidak saja karena tingkat pendapatan riil, tetapi juga karena hubungan fisik antar daerah pasar di dalam negeri. Untuk membuka pasar di dalam negeri hal ini membutuhkan pengeluaran-pengeluaran yang cukup besar untuk menyediakan fasilitas pengangkutan dan distribusi yang cukup. Akan tetapi jika negara itu memasuki pasar internasional, maka rintangan inipun dapat diatasi. Ketiga, ekspor menciptakan permintaan efektif yang baru, menambah permintaan barang-barang di dalam negeri. Karena adanya persaingan industri-industri dalam negeri untuk memperoleh sumber-sumber, maka industri ekspor itu juga mendorong industri dalam negeri untuk mencari inovasi-inovasi yang ditujukan untuk mempertinggi produktivitasnya." 18)

'Di negara berkembang maupun di negara maju, ekspor-mendapat perhatian yang sangat besar, karena ekspor merupakan salah satu sumber pemasukan devisa negara yang sangat dibutuhkan untuk keperluan pembiayaan barang-barang impor yang berasal dari luar negeri. Ekspor bagi negara-negara berkembang, sesuai dengan keadaan perekonomiannya dan tingkat penggunaan teknologi yang dimilikinya umumnya berupa-

18) Gerald M. Meier dan R.E. Baldwin, Ekonomi Pembangunan, (Jakarta: Bhatara), 1972, hal. 313-314.

bahan mentah dan hanya beberapa komoditi saja, berbeda dengan ekspor yang dimiliki oleh negara maju yang pada umumnya merupakan ekspor hasil industri.

Keadaan ekspor bahan mentah di pasaran dunia berbeda dengan keadaan ekspor barang industri, dimana ekspor bahan mentah mengalami persaingan yang ketat sesama negara berkembang dengan harga yang berfluktuasi serta perkembangan yang lebih lambat dibandingkan dengan barang hasil industri. Besarnya ekspor bahan mentah di pasaran internasional berkaitan dengan kemajuan industri yang dicapai oleh negara maju, sebab bahan mentah merupakan kebutuhan dasar dalam menghasilkan barang-barang industri.

Upaya yang dilakukan oleh negara-negara berkembang untuk memperluas ekspornya antara lain dengan melakukan diversifikasi barang ekspor, hal ini dimaksudkan untuk mengatasi keadaan fluktuasi harga yang terjadi di pasaran internasional, sehingga penerimaan dari ekspor tidak mengalami penurunan, maupun hambatan-hambatan terhadap kegiatan ekspor lainnya seperti pengenaan tarif terhadap komoditi tertentu. Disamping mengatasi hambatan-hambatan yang berkaitan dengan kegiatan ekspor. Perluasan dari perdagangan mereka itu cenderung berkaitan dengan keseluruhan penampilan ekspor mereka, karena penerimaan dari ekspor sangat menentukan kemampuan untuk membeli barang-barang impor yang berasal baik dari negara maju maupun dari negara-negara berkembang lainnya.

3.3. Pentingnya Impor Bagi Pembangunan

Impor memegang peranan penting dalam usaha mengembangkan perekonomian negara, khususnya di negara-negara berkembang. Impor, dalam hal ini bahan baku dan barang modal, pada umumnya berasal dari negara maju. Disamping karena negara-negara berkembang kekurangan barang modal, juga untuk mempercepat proses alih teknologi dari negara-negara maju, sehingga negara-negara berkembang akan mampu memacu pertumbuhan ekonominya ke tingkat kesejahteraan ekonomi yang lebih baik. Sementara itu disisi lain impor bahan baku dan barang modal hanya dapat dilakukan tanpa menimbulkan masalah dalam perekonomian negara, jika diikuti dengan persediaan devisa yang cukup memadai.

Perkembangan impor berkaitan erat dengan laju pertumbuhan kegiatan produksi di dalam negeri, yang berarti semakin besarnya kebutuhan akan impor bahan baku dan barang modal sesuai dengan pelaksanaan tahap-tahap pembangunan. Disamping itu, walaupun kenaikan pendapatan masyarakat mendorong kebutuhan akan impor barang konsumsi, namun dalam perkembangannya peranan impor barang konsumsi semakin menunjukkan penurunan. Pola impor dipengaruhi oleh kebijaksanaan yang ditempuh guna menunjang kegiatan produksi yang menghasilkan barang-barang substitusi impor dalam rangka penghematan devisa dan kebijaksanaan yang memberikan prioritas pada impor barang-barang kebutuhan pokok selama produksi dalam negeri belum dapat mengimbangi laju per-

tumbuhan pengeluaran untuk konsumsi,

Disetiap negara yang pembangunannya dianggap berhasil senantiasa ditandai dengan antara lain, makin meningkatnya sektor industri manufaktur baik dalam struktur produksi atau dalam komposisi produk domestik bruto (PDB) maupun dalam struktur ekspornya.

Erat kaitannya dengan hal tersebut, maka di beberapa negara telah dimulai dan telah terjadi transformasi ekonomi dari sektor dominan pertanian menjadi sektor yang dominan industri. Dengan dimulainya industrialisasi di negara-negara tersebut, maka kebutuhan akan barang-barang modal berupa mesin-mesin, peralatan-peralatan dan sebagainya juga bertambah besar. Namun kebutuhan akan barang modal tersebut belum seluruhnya dapat diproduksi di dalam negeri, oleh karena itu sebahagian besar masih di datangkan dari luar negeri berupa barang impor. Untuk itu dibutuhkan devisa yang cukup besar untuk mengimpor perlengkapan proyek-proyek industri manufakturing aneka jenis, sesuai dengan jenis produk yang dibuat.

Industri generasi pertama yang pada umumnya dikembangkan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, adalah jenis industri substitusi impor, yaitu barang-barang konsumsi yang tadinya di impor, kemudian dicoba dibuat di dalam negeri. Maka jenis industri yang berkembang kebanyakan industri yang menghasilkan barang konsumsi primer seperti tekstil, pakaian jadi, makanan kaleng, dan obat-obat-

an serta barang konsumsi lainnya. Disamping itu ikut pula dikembangkan industri untuk menunjang peningkatan produksi di dalam negeri.

Sebelum proyek industri di negara-negara berkembang tersebut didirikan, sebagian besar devisa terpaksa dipakai untuk mengimpor barang konsumsi, dan setelah dimulainya industrialisasi maka devisa lebih banyak dipakai untuk mengimpor mesin-mesin dan peralatan-peralatan serta bahan baku dan sisanya baru untuk barang konsumsi dan barang mewah, seperti mobil, televisi, video dan lain-lain.¹⁹

Kemampuan untuk melaksanakan proyek-proyek pembangunan bidang industri, prasarana, gedung-gedung, dan sebagainya, sangat ditentukan oleh kemampuan untuk mendorong dan mengembangkan ekspor, yang akan menambah persediaan devisa untuk mengimpor kebutuhan-kebutuhan pokok yang masih diperlukan dalam pembangunan. Jadi mengembangkan ekspor adalah untuk mengembangkan kemampuan mengimpor barang-barang yang masih belum dihasilkan dengan cukup atau tidak bisa dihasilkan sendiri dengan biaya yang murah.

Semakin besar kita mengekspor, makin besar pula kemampuan kita untuk mengimpor. Dan kalau kita melihat pola pertumbuhan negara-negara yang sedang membangun pada umumnya di dalam proses permulaan dari pertumbuhan ekonominya selalu kebutuhan akan impor meningkat dengan cepat, khu-

19) Amir MS., Ekspor Impor; Teori dan Penerapannya, Seri Umum No.3, (Jakarta: Pustaka B.Pressindo), 1986, hal.11

susnya kebutuhan impor barang-barang modal dan impor bahan-bahan baku. Ini juga bisa kita lihat pengalaman Indonesia sendiri, dimana kenaikan ekspor yang cepat segera diikuti oleh kenaikan impor yang cepat pula, sebagian besar berupa impor barang modal dan impor bahan baku. Hal tersebut sudah menjadi keharusan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat, sebagaimana yang dikemukakan oleh Lewis dalam konsep pertumbuhan seimbang (balance growth) bahwa :

"Dalam rangka untuk mempercepat pertumbuhan pembangunan ekonomi maka diperlukan juga keseimbangan antara sektor domestik dan sektor luar negeri. Untuk membangun ekonomi yang pesat diperlukan impor peralatan modal dalam jumlah besar. Impor ini akan dibiayai oleh ekspor untuk mencegah kesukaran-kesukaran pembayaran. Ekspor karena itu adalah perlu-baik sektor domestik maupun sektor luar negeri bertumbuh seimbang." 20)

Komposisi impor negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, digolongkan menjadi tiga kategori barang. Ketiga kategori ini mencerminkan tiga peranan yang berbeda pada barang impor di dalam perekonomian.

Pada tahap pembangunan sekarang ini, Indonesia masih belum mampu untuk menghasilkan di dalam negeri segala mesin-mesin, peralatan-peralatan dan bahan baku yang diperlukan untuk melaksanakan program pembangunan. Dan karenanya barang-barang tersebut harus di datangkan dari luar negeri. Tersedianya semua barang-barang yang diperlukan untuk pembangunan melalui impor, mengandung implikasi bahwa derap

20) Ambar Tadang, Ekonomi Pembangunan, Problema dasar dan Teori Pembangunan, (Surabaya: Bina Ilmu), 1984, hal.65

langkah pembangunan tidak boleh terhambat hanya karena terbatasnya barang-barang itu di dalam negeri. Ini berarti bahwa impor adalah merupakan keharusan bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Sejalan dengan perkembangan ekonomi yang semakin meningkat maka kebutuhan akan impor bahan baku dan barang modal juga bertambah besar.

Impor bahan baku dan barang modal pada dasarnya membebani devisa negara, sehingga pemerintah perlu mengambil kebijaksanaan dalam mengatur impor sedemikian rupa, agar diperoleh keseimbangan yang harmonis antara pemenuhan barang yang diperlukan dengan pemakaian devisa negara. Oleh karena itu, devisa negara sangat berpengaruh terhadap impor bahan baku dan barang modal, sebagaimana yang dikemukakan oleh Basri Hasanuddin :

"Devisa diperlukan untuk mendatangkan barang impor dari luar negeri, misalnya barang modal (capital-goods) dan bahan baku (raw materials) untuk pembangunan negara, dengan demikian dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi." 21)

Salah satu masalah yang makin terasa bagi negara-negara yang sedang membangun adalah kekurangan keahlian dan keterampilan di bidang industri, perdagangan, pertambangan dan sebagainya. Teknologi ini harus dipelajari dan didapatkan sebagian dari luar negeri, dengan kata lain teknologi ini harus ditransfer dari luar negeri, khususnya dari negara-negara maju. Kenyataan dari pengalaman negara-

21) Basri Hasanuddin, Perdagangan Internasional dan Pembangunan Ekonomi, (Ujung Pandang: Lephos.), 1986, hal.25

negara yang sudah maju menunjukkan bahwa transfer teknologi ini sebagian besar terjadi melalui perdagangan, yaitu melalui barang-barang dan jasa-jasa yang kita impor dari luar negeri.

Pengaruh transfer teknologi dalam jangka panjang sangat besar artinya bagi negara-negara yang sedang membangun, oleh karena negara-negara tersebut akan mengenal dan mempelajari teknologi modern. Semakin cepat perdagangan berkembang semakin besar arus teknologi yang masuk ke dalam negeri.

Dengan demikian, impor barang-barang modal yang memungkinkan terjadinya transfer teknologi dan impor bahan-bahan baku/penolong, hanya dapat dilakukan tanpa menimbulkan masalah dalam perekonomian negara jika diikuti oleh persediaan devisa yang cukup memadai. Dan untuk menghasilkan devisa yang cukup besar, maka ekspor harus senantiasa didorong dan dikembangkan melalui pengolahan sumber-sumber daya alam yang potensial, peningkatan produktivitas dan efisiensi faktor-faktor produksi dan usaha lainnya yang dapat mendukung pengembangan sektor ekspor.

Disamping itu, susunan barang-barang impor juga harus diubah komposisinya, artinya hendaknya barang impor itu lebih mengutamakan barang-barang untuk keperluan industri dalam negeri dari pada barang-barang konsumtif. Dengan cara ini lambat laun kita dapat mendirikan beraneka ragam industri sehingga komoditi ekspor kita berupa barang indus-

tri dan barang-barang setengah jadi.

Pemerintah Indonesia dewasa ini telah menggalakkan produksi dalam upaya membatasi impor, disamping melakukan proses industrialisasi di berbagai sektor untuk memajukan perekonomian negara. Proses industrialisasi yang dikembangkan utamanya strategi industrialisasi melalui industri substitusi impor dan industri yang mengarah ke ekspor. Perkembangan industrialisasi ini memerlukan impor bahan baku dan barang modal, yang akan menunjang industri dalam produksi barang dan jasa. Dengan berkembangnya industri-industri yang tingkat teknologinya lebih modern, memungkinkan semakin meningkatnya hasil produksi.

3.4. Sistim Perdagangan Internasional Dewasa Ini

Didalam perdagangan Internasional, seperti halnya lalu lintas di jalanan, dengan mengikuti peraturan-peraturan yang sebenarnya hal itu akan meningkatkan kebebasan setiap orang untuk melakukan sesuatu. Meletakkan sistim perdagangan dunia pada jalur yang benar memerlukan tindakan bersama yang terpadu. Apabila peraturan-peraturan tersebut secara konsisten diperkuat dan selalu disesuaikan dengan perkembangan, maka ia akan menambahkan rasa keadilan terhadap sistim perdagangan tersebut, dan memungkinkan persaingan antar negara secara ekonomis dengan sedikit mungkin terjadi pertentangan politis. Dan didalam perubahan-perubahan yang terjadi, peraturan-peraturan tersebut harus mengurangi ketidak-pastian serta memberikan stabilitas

dengan cara menentukan tindakan-tindakan untuk masa yang akan datang atau hal-hal lain yang dapat diramalkan.

Sistim perdagangan multilateral yang mengatur perdagangan dunia dewasa ini dimuat didalam "General Agreement on Tariffs and Trade" (GATT). GATT, memuat peraturan-peraturan pokok sistim perdagangan internasional dan merupakan forum dimana negara-negara anggotanya dapat saling berunding dan berkonsultasi guna memecahkan perselisihan-perselisihan perdagangan serta guna menjelaskan arti peraturan GATT. Salah satu tujuan utama GATT adalah mengurangi hambatan-hambatan perdagangan melalui perundingan.

GATT dibentuk untuk mencegah "trade chaos" dalam perdagangan internasional sebagaimana yang pernah terjadi pada dekade 1930-an, menyusul kemelut dagang antar blok negara-negara maju. Pada waktu itu hubungan perdagangan yang multilateral hampir tidak ada. Yang ada hanyalah hubungan perdagangan bilateral antar blok, misalnya Amerika Serikat-Kanada, Amerika Serikat - Karibia, Amerika Serikat - Eropa. Akibat kemelut dagang pada waktu itu, perekonomian banyak negara sebagian mengalami kesulitan yang menjurus ke situasi colapse. Perdagangan dunia mengalami penurunan tajam, banyak pabrik dan perusahaan mengalami kebangkrutan, yang pada gilirannya memerosotkan standard kehidupan pada titik paling rendah.

Adapun ketentuan-ketentuan GATT, meliputi lima (5) elemenpokok perjanjian dagang meliputi :

1. Norma prosedural, yakni Most Favoured Nations (MFN) atau perlakuan dagang non diskriminatif pada setiap contracting parties GATT dan faktor tarif sebagai instrumen utama yang mengikat.
2. Azas reciprositas, yakni ketimbalbalikan dalam hal penurunan tarif.
3. Safeguards measures, yakni tindakan pengamanan yang mengizinkan pembatasan perdagangan secara temporer apabila perdagangan impor suatu negara mendatangkan kerugian (serious injury) terhadap industri domestik.
4. Mengenai sanksi-sanksi dalam hal pelanggaran setiap ketentuan GATT, yang berupa kompensasi atau retaliasi (tindakan balasan).
5. Mengenai dispute settlement (penyelesaian sengketa) dimana prosedurnya diatur melalui suatu panel sekretariat GATT yang anggotanya terdiri dari beberapa ahli perdagangan (trade experts).

Ketentuan pokok GATT pada hakekatnya adalah prinsip-prinsip "non diskriminasi", yang melarang negara anggotanya untuk mengadakan perbedaan perlakuan di dalam menerapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan perdagangan mereka. Ketentuan pokok GATT tersebut, dengan beberapa pengecualian yang secara hati-hati ditentukan, yang disebut dengan istilah "Unconditional Most Favoured Nations Treatment", dimana diwajibkan agar setiap keuntungan di bidang perdagangan yang diberikan oleh negara penandatanganan GATT kepada

sesuatu negara harus diberikan pula kepada semua anggota GATT lainnya. Sebaliknya setiap pembatasan impor harus dikenakan kepada impor dari semua sumber.

GATT juga memuat peraturan-peraturan yang dimaksudkan untuk menjamin kompetisi yang wajar. Misalnya GATT. memperbolehkan sesuatu negara untuk mengambil tindakan apabila produk yang diimpor dari negara lain mendapatkan "dumping" (dijual dengan harga lebih rendah dari pasaran di negara pengekspor) atau mendapat subsidi. Tindakan-tindakan pengamanan (safeguard) dapat diambil, apabila industri di dalam negeri dirugikan oleh membanjirnya barang-barang impor.

Selain itu suatu negara yang sedang dalam kesulitan neraca pembayaran misalnya, dapat melakukan pembatasan-pembatasan impor untuk sementara. Namun berdasarkan ketentuan (MFN), semua tindakan harus dilaksanakan tanpa perbedaan terhadap semua sumber.

Dari semula peraturan-peraturan GATT bersifat luwes dan pragmatis. Masalah yang kritis dewasa ini adalah bahwa peraturan-peraturan tersebut tidak lagi dianggap sepenuhnya efektif atau tidak seluruhnya dipatuhi. Beberapa negara telah menyalagunakan keluwesan sistim tersebut untuk menghindari kewajibannya untuk memenuhi peraturan-peraturan dasar tersebut. Banyak negara telah mencari keuntungan dengan cara melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan GATT.

Maka atas prakarsa Direktur Jenderal GATT dalam bulan Nopember 1983 telah dibentuk suatu Kelompok Independent yang terdiri dari tujuh orang tokoh dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Ketujuh tokoh anggota kelompok tersebut adalah Senator Bill Bradley (Amerika Serikat), Mr. Pehr Gyllenhammar (Swedia), Dr. Guy Ladreit de Lacharriere (bekas pejabat tinggi Perancis), Dr. Ftiz Leutwiler (Switzerland), Dr. Indraprasad G. Patel (India), Professor Mario H. Simonsen (Brazil), dan Dr. Sumitro Djojohadikusumo (Indonesia).

Kelompok tersebut dibentuk guna menelaah masalah-masalah yang timbul dalam sistim perdagangan internasional, dan menetapkan penyebab-penyebab pokok dari permasalahan yang timbul serta membahas cara-cara untuk mengatasinya. Hasil penelitian dan pembahasan beserta rekomendasi-rekomendasi mereka, yang diusulkan bagi langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperbaiki sistim perdagangan internasional yang dimuat dalam suatu laporan yang disampaikan secara resmi kepada Direktur Jenderal GATT dalam bulan Februari 1985. Yang berjudul "Trade Policies For a better Future". Rekomendasi-rekomendasi bagi kebijaksanaan perdagangan, menurut pandangan ketujuh tokoh ini, harus bertitik tolak pada prinsip-prinsip dasar yakni kebutuhan akan perdagangan yang didasarkan persaingan yang wajar berdasarkan keuntungan komparatif (comparatif advantage) yang murni, kebutuhan akan kebijaksanaan perdagangan yang terbuka, pengakuan bahwa azas non diskriminasi adalah merupakan inti

sistim perdagangan multilateral, kebutuhan akan peraturan-peraturan yang jelas dan dapat disepakati bersama untuk mengatur kebijaksanaan-kebijaksanaan perdagangan, dan pengakuan bahwa kebijaksanaan perdagangan hanya merupakan bagian dari kebijaksanaan di bidang ekonomi secara menyeluruh.

Meskipun demikian perdagangan internasional saat ini diwarnai dengan persaingan dagang yang keras dan nyaris menjurus pada perang dagang. Bisa kita amati misalnya perdagangan antar negara maju. Defisit perdagangan negara tertentu dengan partner dagangnya, segera dikompensasi dengan memasang tembok proteksi. Sehingga praktis menghalangi akses ke pasar partner dagang negara bersangkutan.

Maka berkembanglah modus protektif, yang kini tidak saja digunakan oleh satu negara tapi meluas dan mengekang perkembangan perdagangan dunia serta mengancam perdagangan ekspor negara-negara berkembang.

Usaha untuk memperluas ekspor ekspor negara-negara berkembang, terutama ekspor barang-barang hasil industri yang dihasilkan di dalam negeri, banyak mendapat hambatan maupun kemampuan bersaing dengan hasil industri yang dihasilkan negara maju. Sebagaimana yang dikemukakan oleh ahli ekonomi Kanada, Gerald Helleiner bahwa :

"Masalah dasar yang penting bagi prospek ekspor barang-barang industri dari negara-negara dunia ketiga adalah, hambatan-hambatan yang dikeluarkan negara-negara maju, untuk membatasi masuknya produk-produk ini ke dalam pasaran mereka. 'Tarif', 'quota' dan hambatan-hambatan lain dalam pasar negara kaya, merupakan halangan/rintangan yang penting bagi ekspor barang-barang industri dalam skala besar. Struktur

'tarif' negara-negara kaya, nampaknya memberikan proteksi yang sangat efektif bagi para produsen barang-barang industri mereka, dimana para produsen dari negara-negara miskin harus bersaing industri-industri ringan yang relatif menggunakan intensifikasi tenaga-tenaga tidak trampil seperti pabrik tekstil, pabrik sepatu, pabrik permadani, pabrik alat-alat olah raga, koper, pabrik makanan dan lain-lain. Persisnya adalah, karena industri-industri ini tidak dapat bersaing secara bebas, intensitas tenaga kerja yang tidak trampil, menyebabkan mereka mengalami kerugian komparatif dalam konteks perekonomian mereka yang memberikan pengupahan relatif tinggi."22)

Beberapa bentuk restriksi perdagangan negara-negara-maju tersebut antara lain :

- Pelaksanaan undang-undang perdagangan Amerika Serikat, yaitu Omnibus Trade and "Competitiveness Act 1988" yang mampu mengambil tindakan balasan sepihak kepada negara-negara tertentu yang dianggap melakukan praktek perdagangan tidak wajar. Oleh banyak negara hal ini dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan GATT.
- Pembentukan perjanjian bilateral yang amat intensip sehingga mampu mengurangi atau bahkan meniadakan sama sekali bea masuk impor dari dua negara yang mengadakan perjanjian. Akibatnya produk-produk kedua negara menjadi tinggi daya saingnya. Sementara produk-produk negara lain dipersukar masuknya ke pasar negara-negara yang bersangkutan, (misalnya antara Amerika Serikat dengan Kanada, dan Australia dengan New Zealand).
- Akan terbentuknya pasar tunggal Eropa 1992, dimana per-

22) Michael P. Todaro, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Jilid kedua, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 1983, hal.75

dagangan antar Masyarakat Eropa akan lebih lancar akibat dihapusnya perbatasan bea dan cukai. Dengan demikian, daya saing produk-produk setempat semakin tinggi.

- Meningkatnya kerja sama antar negara maju (Amerika Serikat, Eropa, Jepang, Cina) yang tentunya memberi konsesi-konsesi dagang tertentu diantara mereka dan akan menghambat perdagangan dengan negara-negara lainnya.
- Secara sendiri-sendiri timbul kecenderungan masing-masing negara untuk juga menetapkan hambatan-hambatan perdagangan baik tarif maupun non tarif.

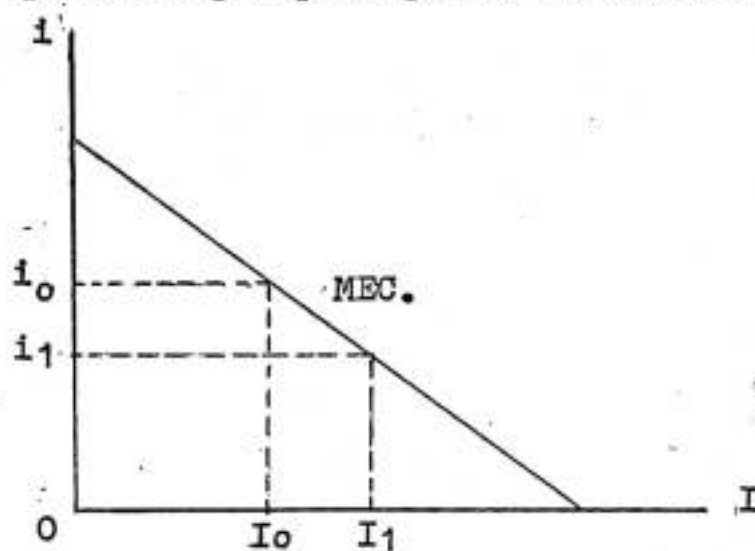
Secara global, perubahan tatanan kekuatan ekonomi-perdagangan dan moneter dunia sejak awal dekade tujuh puluhan, memperkuat interdependensi antar negara dan sekaligus menciptakan ketidak pastian dalam perekonomian dunia, pada gilirannya amat mempengaruhi ekonomi perdagangan Indonesia yang menganut ekonomi terbuka.

Indonesia sebagai negara yang sangat berkepentingan dengan perdagangan internasional yang bebas dan terbuka, sebagaimana diatur GATT, menginginkan agar komoditas eksportnya mendapat konsesi perdagangan yang menguntungkan untuk memasuki pasaran internasional.

Apapun bentuk praktek-praktek "unfair trade" yang cenderung menyuramkan perdagangan dunia, adalah suatu keharusan bagi dunia usaha Indonesia untuk secara serius mengantisipasi ancaman ekspor dari manapun datangnya. Dan memanfaatkan secara wajar ketentuan dalam setiap perundingan-GATT.

3.5. Peranan Penanaman Modal Dalam Pembangunan

Secara teoritis dikatakan bahwa penanaman modal (investasi) akan dilakukan, jika balas jasa kapital (r) yang diharapkan akan diterima dari kegiatan investasi tersebut, lebih tinggi dari tingkat bunga yang sedang berlaku di pasar. Hal ini ditunjukkan oleh Marginal Efisiensi of Capital (MEC), seperti nampak pada gambar di bawah ini :



Apakah kita memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan investasi, tergantung dari perbandingan antara kurva MEC dengan tingkat bunga yang berlaku di pasar.

Pengertian Marginal Efisiensi of Capital (MEC), tidak sedikit buku teks yang tidak membedakannya dengan pengertian Marginal Efisiensi of Invesmen.²³ Dimana MEC atau MEI menunjukkan kaitan antara tingkat bunga dan tingkat investasi perekonomian. Dimana kurva MEI tersebut mempunyai sudut kecenderungan yang negatif, artinya tingkat investasi

²³) Soediyono.R. Ekonomi Makro, Analisa IS-LM dan Permintaan-Penawaran Agregatif, (Yogyakarta: Liberty), Edisi I, 1981, hal. 169.

adalah fungsi yang semakin menurun dari tingkat bunga, dan karena itu para ahli ekonomi sering menggambarkan fungsi permintaan akan investasi sebagai berikut :²⁴

$$I = f (i)$$

Investasi terdiri dari dua komponen. Pertama adalah investasi pengganti barang-barang modal yang sudah aus, sehingga jumlah capital stock tetap terpelihara. Kedua adalah investasi netto, yang diperlukan untuk menambah atau memperbesar capital stock. Para ahli ekonomi menganggap berguna untuk melakukan investasi netto sebagai langkah para pengusaha untuk menyesuaikan persediaan antara capital stock yang ada dengan capital stock yang diinginkan. Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa jumlah barang-barang modal (capital stock) yang diinginkan oleh dunia usaha adalah proporsional dengan tingkat output produksi yang dilaksanakan. Kaitan ini dapat ditulis sebagai :²⁵

$$K_d (t) = \alpha Y (t)$$

dimana $K_d (t)$ adalah capital stock yang diinginkan pada saat t dan α adalah capital output rasio yang menghubungkan capital stock yang diinginkan dengan tingkat output produksi. Persamaan di atas menunjukkan bahwa kalau tingkat output produksi tidak berubah, maka capital stock yang diinginkanpun tidak berubah juga, sehingga kalau capital

²⁴) T.F. Dernburg dan D.M. McDougall, Ekonomi Makro (Jakarta: Erlangga), Edisi Keenam, 1985, hal. 136

²⁵) Ibid, hal. 136.

stock yang tersedia sama dengan capital stock yang diinginkan, maka tak ada kebutuhan untuk melakukan investasi netto yang bagaimanapun. Jadi jelaslah bahwa peningkatan terus-menerus dari tingkat investasi netto tidak dapat terjadi tanpa adanya kekurangan kapasitas produksi, dibandingkan dengan kapasitas produksi yang diinginkan, dan hal ini mungkin terjadi kalau output tumbuh secara berbarengan.²⁶ Berkenaan dengan hal tersebut, Soediyono mengemukakan pula pendapatnya bahwa :

"Investasi mempunyai dua efek. Yang pertama adalah efeknya terhadap tingkat pendapatan nasional dan tingkat kesempatan kerja, sedangkan yang kedua adalah efeknya terhadap kapasitas produksi nasional."²⁷)

Sejalan dengan itu, kaum Klassik berpendapat bahwa, investasi atau pembentukan modal adalah pengeluaran yang akan mempertinggi alat-alat modal dalam masyarakat dan apabila itu bertambah berarti produksi dan pendapatan nasional akan meningkat dengan demikian perkembangan ekonomi akan terjadi, sedangkan Keynes berpendapat bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi itu akan ditentukan oleh tingkat pengeluaran seluruh masyarakat dan bukan kepada kesanggupan alat-alat modal untuk memproduksi. Sedangkan Harrod Domar berpendapat bahwa pembentukan modal dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kesanggupan suatu perekonomian untuk menghasilkan, sekaligus juga sebagai pengeluaran yang akan menam-

26) T.F.Dernburg dan D.M. McDougall, Ibit, hal.140

27) Soediyono, op cit, hal 170

bah permintaan efektif seluruh masyarakat

Harrod Domar menganalisa mengenai persyaratan-persyaratan yang harus ada dalam perekonomian agar terjamin kemampuan berproduksi yang terus meningkat sebagai akibat kesempatan penanaman modal yang sepenuhnya dipergunakan, sehingga tercapai pertumbuhan yang mantap (steady growth) dalam perekonomian.

Menurut Harrod Domar, penanaman modal yang dilakukan masyarakat dalam suatu waktu tertentu akan digunakan untuk dua tujuan : 1) Mengganti alat-alat modal yang tidak dapat dipergunakan lagi, dan 2) Untuk memperbanyak jumlah alat-alat modal dalam masyarakat. Akibatnya adalah apabila dibandingkan jumlah pertambahan produksi dengan penanaman modal yang dilakukan akan didapat rasio modal produksi (capital output ratio), yaitu suatu rasio yang menunjukkan pertambahan efektif kapasitas berproduksi sebagai akibat adanya penanaman modal baru pada suatu tahun tertentu :²⁸

Selanjutnya pertambahan kapasitas efektif dari alat-alat modal (setelah dikurangi defresiasi) dapat dirumuskan sebagai berikut :²⁹

$$\Delta Y_s = \delta \cdot I$$

Dimana : ΔY_s = Pertambahan kapasitas efektif alat-alat modal yang baru.

I = Besarnya pembentukan modal.

28) Bintoro Tj. dan Mustopadidjaya, op cit, hal.35

29) Ibid, hal. 36

δ = Rasio produksi modal (produktivitas modal)

Dan sampai dimana penambahan penanaman modal akan menaikkan pendapatan nasional, ini akan ditentukan oleh besarnya multiplier. Dengan mengingat konsep ekonomi makro yang menyatakan bahwa besarnya multiplier tersebut adalah kebalikan dari besarnya "marginal propensity to save" = α , maka hubungan antara besarnya penambahan dalam pendapatan nasional ($=\Delta Y_d$) dengan penambahan dalam penanaman modal ($=\Delta I$), dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y_d = \frac{1}{\alpha} \cdot \Delta I$$

Pada uraian di atas memberikan indikasi bahwa investasi merupakan motivator dalam pembangunan ekonomi, sebab dengan adanya investasi maka usaha produksi dapat dilakukan secara teknis, dan kualitas barang dan jasa dapat dipertahankan. Dengan demikian, investasi mempunyai fungsi untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Oleh karena itu usaha-usaha untuk meningkatkan investasi perlu digalakkan baik oleh pemerintah, melalui penyer-taan modalnya dan melalui penciptaan prasarana dan sarana yang diperlukan bagi peningkatan investasi, maupun oleh pihak swasta. Dimana keputusan untuk melakukan investasi dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu: tingkat suku bunga yang akan mempengaruhi biaya barang-barang modal dan keuntungan yang diharapkan dari investasi tersebut. Faktor lain yang turut mempengaruhi investasi, antara lain: Pajak, penyusutan, harapan mengenai ekonomi dimasa depan.

3.5.1. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Penanaman modal atau investasi mutlak diperlukan dalam usaha mempercepat proses pembangunan di negara-negara berkembang. Namun investasi tersebut sering diperhadapkan pada pembentukan modal yang sangat rendah di negara-negara berkembang. Padahal peranan modal dalam pembangunan sangat besar artinya untuk pembiayaan pembangunan yang akan dilaksanakan. Karena jika modal yang tersedia cukup besar maka pembangunan akan berjalan lebih lancar, sebab dapat dilakukan investasi pada berbagai macam sektor ekonomi.

Walaupun pembangunan ekonomi itu bukan hanya ditentukan oleh tersedianya modal akan tetapi pembangunan haruslah merupakan perpaduan dari modal, tersedianya tenaga ahli dalam berbagai bidang, terdapatnya wiraswasta yang cakap, terdapatnya sistim pemerintahan yang stabil dan efektif, besarnya kesanggupan untuk menciptakan dan menggunakan teknologi yang modern dan partisipasi masyarakat memegang peranan yang penting di dalam melakukan pembangunan ekonomi itu. Tetapi harus disadari bahwa modal merupakan faktor penting, sebab dengan tersedianya modal maka faktor produksi lainnya akan dapat terpenuhi.³⁰

Dalam memperoleh modal pembangunan sering dihadapkan pada lingkaran yang tidak berujung pangkal, artinya bahwa

³⁰⁾ Malayu S.P. Hasibuan, Ekonomi Pembangunan dan Perekonomian Indonesia, (Bandung: Armico), 1987, hal.107

pendapatan nasional negara yang sedang berkembang rendah, maka tabungan (saving) rendah, akibatnya investasi kecil, dan seterusnya. Bagi negara sedang berkembang besarnya tabungan dan investasi saling mempengaruhi artinya besarnya tabungan tergantung pada besarnya pendapatan, dan investasi yang dapat dilakukan tergantung dari besarnya modal yang terbentuk dari tabungan.

Dengan demikian perubahan besar dalam investasi akan sangat mempengaruhi permintaan agregat dan akhirnya berakibat juga pada output dan penggunaan tenaga. Demikian pula investasi sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi serta perbaikan dalam produktivitas tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pada tenaga kerja dan jumlah stok modal, sedangkan investasi menghimpun akumulasi modal. Dengan membangun sejumlah gedung dan peralatan yang berguna, output potensial suatu bangsa akan bertambah dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang juga meningkat.³¹

Pengertian investasi ditinjau dari makro ekonomi diartikan bahwa modal yang diinvestasikan itu akan menambah produksi, menaikkan pendapatan nasional, memperluas lapangan kerja, dan memperbanyak lapangan kehidupan masyarakat.³²

Kaum Klassik berpendapat bahwa pembentukan modal adalah pengeluaran yang akan mempertinggi jumlah alat-alat modal dalam masyarakat, dan apabila itu bertambah akan berar-

31) Nopirin, Ekonomi Moneter, (Yogyakarta: BPFE-UGM), 1988. hal.32.

32) Malayu S.P. Hasibuan, Ibid, hal. 111.

ti produksi dan pendapatan nasional akan meningkat dengan demikian perkembangan ekonomi akan terjadi. Selanjutnya Harrod Domar berpendapat bahwa :

"Investasi harus tetap ada, pendapatan nyata dan output akan senantiasa membesar. Namun demikian, untuk mempertahankan tingkat 'equilibrium' pendapatan dan pekerjaan penuh dari tahun ketahun, baik pendapatan nyata maupun output tersebut keduanya harus meningkat dalam laju yang sama pada saat kapasitas produktif modal meningkat. Kalau tidak, setiap perbedaan antara keduanya akan menimbulkan kelebihan kapasitas atau ada kapasitas menganggur (idle). Hal ini memaksa para pengusaha membatasi pengeluaran investasinya sehingga pada akhirnya akan berpengaruh buruk terhadap perekonomian yaitu menurunkan pendapatan dan pekerjaan pada periode berikutnya dan menggeser perekonomian keluar jalur 'equilibrium' pertumbuhan mantap. Jadi apabila pekerjaan hendak di pertahankan dalam jangka panjang, maka investasi harus senantiasa di perbesar. Pertumbuhan pendapatan nyata secara terus menerus pada tingkat yang cukup untuk menjamin penggunaan kapasitas secara penuh atas stock modal yang sedang tumbuh." 33)

Keadaan yang digambarkan oleh Harrod Domar melihat perlunya investasi bagi pertumbuhan ekonomi, yang akan memberikan pengaruh terhadap pengeluaran masyarakat merupakan hal yang penting sebab hal ini akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan investasi selanjutnya. Sedangkan oleh Schumpeter dikemukakan bahwa :

"Penanaman modal dalam perekonomian dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu penanaman modal otonomi (autonomous investment) dan penanaman modal terpengaruh (induced investment). Autonomous Investment ditentukan oleh perkembangan dalam jangka panjang, terutama oleh penemuan kekayaan alam yang baru dan kemajuan teknologi. Ini berarti bahwa Autonomous Investment adalah penanaman modal untuk menciptakan pembaharuan-pembaharuan. Sedangkan Induced

33) M.L. Jhingan, Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, (Jakarta: Rajawali), 1988, hal. 142

investment adalah penanaman modal yang dilakukan sebagai akibat dari adanya kenaikan dalam produksi, pendapatan, penjualan, atau keuntungan perusahaan-perusahaan. Induced investment ini lebih besar jumlahnya bila dibandingkan dengan autonomous investment." 34)

Dari berbagai pengertian tentang investasi tersebut di atas, maka beberapa ahli ekonomi menggolongkan investasi menjadi: (1) investasi tetap perusahaan (business fixed investment) yang terdiri dari pengeluaran perusahaan untuk mesin tahan lama, perlengkapan, dan bangunan-bangunan seperti: fasilitas pabrik dan perlengkapan mesin lainnya; (2) investasi perumahan (residential investment), pada umumnya mencakup investasi untuk tempat tinggal atau perumahan. (3) investasi persediaan (inventori) yang mencakup penambahan persediaan.³⁵

Namun penanaman modal, khususnya penanaman modal dalam negeri hanya bisa berkesinambungan dan berkembang apabila masyarakat mempunyai pendapatan yang cukup tinggi dan distribusinya cukup merata sehingga mereka mampu:³⁶

- a. Menabung secara memadai.
- b. Bekerja dengan produktivitas yang tinggi karena terjamin kesehatannya.
- c. Berfungsi sebagai pasaran barang dan jasa yang telah dihasilkan, sehingga kegiatan berproduksi dan investasi-

34) Sadono Sukirno, Op. cit., hal. 283

35) Dernburg, T.F., Ekonomi Makro, Konsep, Teori dan Kebijakan, (Jakarta: Erlangga), 1986, hal. 135

36) Hendra Esmara, Teori Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, (Jakarta: Gramedia), 1987, hal. 410

oleh para pengusaha cukup terdorong untuk berkembang terus secara berkesinambungan.

Setiap negara tidak akan berhasil mengadakan investasi, apabila penduduk negara yang bersangkutan tabungannya sangat kecil dan tidak mempunyai pasaran untuk menjual hasil-hasilnya. Dan investasi yang tinggi tak akan terlaksana apabila di negara yang bersangkutan jumlah penduduk yang mempunyai jiwa usaha terlalu kecil. Selanjutnya pasaran untuk barang-barang yang dihasilkan akan terlalu kecil apabila sebagian besar penduduknya masih sangat rendah pendapatannya, atau apabila sebagian besar barang konsumsi dan barang produksi dipenuhi oleh impor.

Disamping itu apabila penanaman modal di berbagai sektor ekonomi di harapkan berhasil, maka para pengusaha harus berpendidikan, berhasrat maju dan berdisiplin, memiliki keterampilan dan pengetahuan manajemen, serta mempunyai pandangan, sikap, dan orientasi ke depan. Dan yang terpenting memiliki jiwa usaha dan mampu melaksanakan investasi atas dasar pandangan ke depan.

Oleh karena itu, terlaksananya penanaman modal secara berkesinambungan pada suatu negara sesungguhnya merupakan hasil atau resultante dari telah terpenuhinya syarat-syarat yang disebutkan diatas.

Perubahan struktur ekonomi suatu negara pada akhirnya mengarah pada industrialisasi. Di Indonesia gejala seperti itu sudah mulai terjadi. Pada saat sekarang, peranan

sektor pertanian sudah semakin berkurang dan peranan sektor industri terutama industri manufaktur semakin meningkat. Begitupun ekspor Indonesia tidak lagi tergantung pada komoditi primer dan juga impor tidak seluruhnya dalam bentuk barang jadi. Betapa cepat dan sampai berapa jauh proses industrialisasi akan berlangsung, akan ditentukan oleh banyak faktor, diantaranya penanaman modal disektor industri yang diharapkan semakin besar.

Investasi dalam negeri pada umumnya bergerak ke arah industri yang sebagian besar masih bersifat pengganti impor. Strategi industrialisasi yang bersifat "inward looking oriented" ini, memulai tahapan industrialisasi dengan menghasilkan sendiri di dalam negeri berbagai jenis barang-barang konsumsi tahan lama yang sebelumnya di impor dari luar negeri. Proses industrialisasi ini berlangsung dengan mengimpor barang-barang produksi (termasuk barang modal, barang setengah jadi dan bahan baku lainnya) yang diperlukan untuk memproduksi barang-barang konsumsi tersebut.

Pasar dalam negeri yang tersedia untuk berbagai jenis barang-barang konsumsi tersebut ditambah kebijaksanaan proteksi yang merupakan pelengkap strategi industrialisasi melalui substitusi impor ini, telah menjamin kelangsungan dari industri-industri substitusi impor tersebut. Fasilitas-fasilitas tersebut juga telah memberikan kesempatan bagi industri-industri substitusi impor untuk memanfaatkan sistim produksi berskala besar, sehingga satuan biaya dapat ditekan.

Keberhasilan dalam memanfaatkan produksi skala besar ini kemudian dapat meningkatkan daya saing barang-barang konsumsi yang dihasilkan di pasaran internasional, sehingga industri substitusi impor ini kemudian beranjak menjadi barang untuk ekspor.

Keberhasilan proses industrialisasi melalui tahapan substitusi impor ke ekspor industri ini ditentukan oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain:

- a. Tersedianya kemampuan dan keterampilan yang memadai untuk menghasilkan barang-barang tersebut.
- b. Tersedianya pasar di dalam negeri yang memungkinkan produksi skala besar.
- c. Adanya sejumlah usahawan yang memiliki keberanian untuk terjun dalam kegiatan-kegiatan industri.

Tujuan pokok pembangunan ekonomi adalah untuk membangun peralatan modal dalam skala yang cukup untuk meningkatkan produktivitas di bidang pertanian, pertambangan, perkebunan, dan industri. Modal juga diperlukan untuk mendirikan sekolah, rumah sakit, jalan raya, dan lain-lain. Pada hakekatnya pembangunan ekonomi adalah penciptaan modal prasarana sosial dan ekonomi. Hal ini mungkin jika laju penanaman modal (investasi) di dalam negeri cukup tinggi, yaitu jika bagian dari pendapatan atau output masyarakat yang ada sedikit saja yang dipergunakan untuk konsumsi dan sisanya ditabung untuk diinvestasikan dalam peralatan modal.

Investasi dalam peralatan modal tidak saja meningkat-

kan produksi tetapi juga kesempatan kerja, karena menghasilkan kemajuan teknik yang menunjang tercapainya ekonomi produksi skala luas dan meningkatkan spesialisasi. Pembentukan modal, memberikan mesin, alat dan perlengkapan bagi tenaga kerja yang semakin meningkat, sehingga akan menguntungkan juga bagi buruh.

Mengingat investasi merupakan faktor paling penting dan strategis dalam proses pembangunan ekonomi, maka negara-negara sedang berkembang tidak saja harus menentukan besarnya tingkat investasi tetapi juga komposisinya, dan disamping itu menjadi tanggung jawab negara untuk melakukan investasi yang paling menguntungkan masyarakat. Pola optimum investasi terutama tergantung-pada iklim investasi yang tersedia di dalam negeri dan pada produktivitas marginal sosial dari berbagai jenis investasi.

Beberapa ahli ekonomi mengemukakan kriteria dan sasaran investasi terutama bagi negara-negara sedang berkembang (Jhingan, 1988), yakni: (1) investasi harus diarahkan pada penggunaan yang paling produktif sehingga rasio output uang (current output) terhadap investasi menjadi maksimum; (2) investasi harus dilakukan terhadap proyek yang akan memanfaatkan buruh secara maksimum, dalam hal ini rasio buruh investasi maksimum; (3) proyek investasi itu harus diseleksi sehingga menghasilkan barang yang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan meningkatkan ekonomi eksternal lebih luas; (4) proyek investasi adalah proyek yang di-

rancang paling banyak menggunakan bahan baku dalam negeri dan berbagai bahan penolong lainnya; (5) proyek investasi tersebut harus diseleksi sehingga dapat memperbaiki distribusi pendapatan nyata; dan (6) investasi harus diarahkan pada industri yang menghemat devisa, mengurangi beban neraca pembayaran dan memaksimumkan rasio barang ekspor terhadap investasi.

Oleh karena berbagai sektor perekonomian saling tergantung dan berkaitan satu sama lain, maka investasi perlu diarahkan ke berbagai sektor, sehingga sektor-sektor tersebut dapat bergerak dalam keserasian. Jika investasi dilakukan pada suatu jajaran industri yang luas, pasar akan melebar karena industri yang satu akan membutuhkan produk dari industri yang lain. Keseimbangan juga diperlukan antara investasi di bidang industri dan investasi di bidang pertanian, karena pertanian dan industri saling melengkapi. Kenaikan output di bidang industri memerlukan kenaikan output di bidang pertanian. Jika output dan lapangan kerja meningkat di sektor industri, kenaikan ini akan menyebabkan naiknya permintaan akan bahan mentah dan bahan makanan. Demikian pula, keseimbangan diperlukan antara prasarana ekonomi dan sosial dengan investasi yang langsung produktif. Investasi di bidang prasarana sosial dan ekonomi harus dalam jumlah yang cukup untuk merangsang dan mendukung sektor pertanian dan industri dalam perekonomian suatu negara.

Investasi juga harus dilakukan sedemikian rupa se-

hingga tidak menyebabkan kesulitan neraca pembayaran. Laju investasi harus dikaitkan dengan kemampuan ekspor dan impor negara bersangkutan. Impor harus dibatasi pada pembelian bahan baku dan peralatan modal yang perlu, dan bukan pada pembelian barang-barang mewah yang produktif. Hal ini hanya mungkin jika investasi ditujukan pada pengembangan sektor ekspor. Karena apabila impor lebih besar dari pada ekspor, pemasukan devisa akan menurun sehingga mengganggu program pembangunan.

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam upaya mempercepat laju pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang seperti Indonesia, maka investasi memegang peranan penting. Investasi merupakan kunci utama dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa, untuk memajukan kesejahteraan kehidupan dan meningkatkannya ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan adanya berbagai kemungkinan pengembangan industri manufaktur di Indonesia, maka para investor dalam negeri diharapkan mampu berperan dalam memajukan industri nasional. Cepat atau lambatnya proses pembangunan tergantung kepada besar kecilnya modal yang tersedia, sehingga jelaslah betapa penting dan strategis peranan yang dimiliki oleh investasi dalam pembangunan ekonomi.

3.5.2. Penanaman Modal Asing (PMA)

Penanaman modal asing di negara-negara sedang berkembang merupakan arus sumber daya yang dapat memegang peranan

yang sangat penting dalam pembangunan, khususnya di sektor industri. Arus sumber daya ini merupakan suatu paket atau kombinasi yang khas, yang terdiri dari modal investasi jangka panjang, teknologi, keterampilan teknis dan managerial, serta saluran ke pasar dunia yang umumnya masih langka sekali di negara-negara berkembang.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka kebanyakan negara sedang berkembang menyadari manfaat yang dapat diperoleh dari penanaman modal asing yang langsung (direct foreign investment), sehingga arus PMA ke negara-negara ini juga makin meningkat.³⁷ Juga semakin disadari di negara-negara berkembang bahwa penanaman modal asing (PMA) dapat memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi pembangunan ekonomi. Oleh G.M. Meier dikemukakan bahwa :

"Kebijaksanaan yang ditempuh di negara berkembang sehubungan dengan investasi swasta asing adalah bagaimana merangsang arus masuk modal swasta asing dalam jumlah besar, sementara pada waktu yang sama, memperoleh dari modal itu suatu sumbangan yang berarti bagi program pembangunan negara itu." 38)

Makin kuatnya usaha-usaha negara berkembang untuk menarik modal langsung dari luar negeri dan pinjaman luar negeri masih belum cukup untuk mengatasi masalah jurang tabungan dan jurang mata uang asing yang dihadapi. Seperti juga dengan bantuan luar negeri, penanaman modal asing, khususnya penanaman modal langsung, dapat membantu negara-

37) Hendra Esmara, Op. Cit, hal. 119

38) G.M. Meier, Ekonomi Pembangunan Negara Berkembang, (Jakarta: Bina Aksara), 1985, hal. 136

negara berkembang mengatasi kekurangan tabungan dan kekurangan mata uang asing. Berkaitan dengan hal tersebut, M.P. Todaro mengemukakan pendapatnya bahwa :

"Investasi swasta asing, biasanya dipandang sebagai suatu cara mengisi celah diantara persediaan tabungan, devisa, penghasilan domestik pemerintah yang tersedia, dan tingkat keterampilan serta sumber-sumber yang diperlukan untuk mencapai target pembangunan Bantuan yang pertama dan sering diberikan oleh investasi swasta asing kepada pembangunan nasional (apabila pembangunan di tentukan menurut tingkat pertumbuhan GNP), adalah peranannya dalam mengisi celah antara investasi yang ditargetkan atau yang dikehendaki, dan tabungan dalam negeri yang bisa digerakkan. Kontribusi kedua adalah bantuannya mengisi celah antara kebutuhan yang ditargetkan dan penghasilan bersih yang diperoleh dari ekspor ditambah dengan bantuan pemerintah asing..... Celah yang ketiga harus diisi oleh investasi asing adalah antara pendapatan pajak pemerintah yang ditargetkan dan meningkatnya pajak dalam negeri..... Yang keempat ialah celah di bidang manajemen, semangat kewiraswastaan, teknologi dan keterampilan yang diharapkan bisa diisi oleh sebagian atau seluruhnya oleh perusahaan-perusahaan swasta asing yang beroperasi di dalam negeri." 39)

Jika ditinjau dari sudut ini, maka penanaman modal asing akan mempertinggi tingkat penanaman modal dan selanjutnya mempercepat tingkat pembangunan ekonomi.

Walaupun penanaman modal asing telah meningkat meningkat dalam dasa warsa tujuhpuluhan, namun sebahagian perannya telah diambil alih oleh pinjaman yang diberikan bank - komersil kepada negara berkembang. Pada periode tersebut pinjaman komersil telah meningkat secara spektakuler sebagai akibat rendahnya tingkat bunga riil di pasar interna-

39) Michael P. Todaro, Op. Cit., hal. 121

sional. Kemudian kenaikan jumlah investasi langsung swasta asing yang berlanjut selama awal dasawarsa delapanpuluh-an, disebabkan karena menurunnya dengan tajam jumlah pinjaman baru yang diberikan oleh bank komersil sebagai akibat banyaknya negara berkembang yang terus mengalami kesulitan dalam membayar bunga dan cicilan utang komersil yang telah di buat. Berkurangnya prospek peningkatan ODA, juga telah memberikan kontribusi terhadap kenaikan jumlah investasi langsung swasta asing.

Disamping itu berkurangnya kesempatan untuk melakukan investasi (investment opportunities) di negara maju juga telah mendorong masuknya investasi langsung swasta-asing dari negara maju ke negara berkembang. Memburuknya kesempatan melakukan investasi tersebut di negara-negara maju adalah akibat resesi ekonomi dunia yang berkelanjutan sehingga menurunkan tingkat produktivitas, kenaikan tingkat upah riil, dan berkurangnya tingkat laba di negara tersebut. Selanjutnya kebijaksanaan negara pemilik kapital mengenai investasi yang akan ditanamkan di luar negeri juga dapat mempengaruhi aliran modal asing ke negara berkembang.

Faktor eksternal lainnya yang juga turut menentukan aliran investasi langsung ke negara berkembang adalah adanya keinginan politik negara maju yang sekaligus merefleksikan keinginan politik dan motif ekonomi para investor yang ada di negara maju tersebut. Seandainya keinginan politik tersebut cukup tinggi, maka dana investasi langsung

swasta asing akan mengalir dalam jumlah yang lebih besar ke negara berkembang. Sebaliknya, jika keinginan politik yang dimaksud relatif rendah, maka aliran investasi langsung tersebut akan lebih sedikit jumlahnya.

Disamping faktor eksternal, faktor internal juga turut menentukan masuknya investasi langsung swasta asing ke negara berkembang. Situasi politik dan kebijaksanaan pembangunan ekonomi negara berkembang sering menciptakan iklim berusaha yang kurang menguntungkan para investor asing. Stabilitas politik yang kurang mapan menyebabkan terlalu besarnya resiko untuk tidak memperoleh laba yang diharapkan atau resiko kehilangan modal yang telah ditanamkan. Selanjutnya, kebijaksanaan ekonomi yang terlalu membatasi ruang gerak para investor asing dan terlalu besarnya campur tangan pemerintah dalam dunia usaha juga akan menyebabkan berkurangnya aliran investasi langsung swasta asing. Demikian pula peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang kurang atau tidak memperhatikan pemberian insentif untuk penanaman modal asing juga akan mempunyai akibat yang sama.

Terlepas dari hal tersebut diatas, investasi langsung swasta asing sangat penting artinya bagi negara-negara sedang berkembang, karena mendatangkan unsur sertaan berupa bantuan teknik (pengetahuan pengelolaan dan teknis), sebagai sarana untuk pengalihan perubahan teknis dan organisatoris, memadukan bantuan teknis dan finansial, dan membantu mengatasi keterbatasan keterampilan dan pengelolaan

pembangunan.⁴⁰

Dalam jangka panjang penanaman modal langsung swasta asing dapat melatih golongan pribumi mendapat keahlian dalam bidang-bidang yang diusahakan oleh modal asing. Selain itu perusahaan-perusahaan asing dapat mempercepat proses pengenalan teknologi baru (transfer of technology) ke negara-negara berkembang, karena dalam mendirikan perusahaan-perusahaan di negara berkembang teknologi yang akan digunakan adalah teknologi yang jauh lebih baik daripada yang ada di negara-negara berkembang.⁴¹

Perusahaan-perusahaan asing yang melakukan investasi di negara berkembang juga memberikan keuntungan kepada masyarakat. Yaitu memungkinkannya lebih banyak tenaga buruh yang dipekerjakan. Hal ini akan menambah kesempatan kerja dan mengurangi masalah pengangguran yang dihadapi pemerintah. Kemampuan perusahaan-perusahaan asing menggunakan teknologi yang lebih tinggi, menyebabkan tingkat produktifitas tinggi, dan oleh karena itu mereka dapat membayar gaji yang lebih tinggi, dari pada yang sanggup dibayar oleh perusahaan-perusahaan nasional. Keuntungan investasi juga menunjang konsumen. Jika investasi bersifat hemat biaya dalam industri tertentu, hal ini akan menguntungkan tidak hanya bagi para suplair, tetapi juga para konsumen, karena harga produk-produknya menjadi lebih murah. Jika investasinya ber-

40) G.M. Meier, Op. Cit., hal. 138

41) Sadono Sukirno, Op. Cit., hal. 380

sifat perbaikan produk atau inovasi, para konsumen dapat menikmati kualitas produk yang lebih baik atau produk baru.⁴²

Investasi langsung swasta asing juga memberikan keuntungan kepada pemerintah, yaitu sebagai sumber pendapatan, berupa pajak yang dikenakan atas keuntungan yang diperoleh mereka dan royalties yang dibayar perusahaan-perusahaan asing untuk memperoleh konsesi perusahaan kekayaan alam yang dimiliki negara tersebut.⁴³

Dipandang dari segi sumbangannya kepada pembangunan, kebaikan utama investasi asing, mungkin muncul dalam bentuk ekonomi eksternal. Sebagai pembawa perubahan teknologi dan organisatoris, investasi asing akan mempunyai arti sangat penting dalam penyediaan bantuan teknis swasta dan "demonstration effect" yang membawa faedah juga pada bidang ekonomi yang lain. Teknik baru yang menyertai arus masuk modal, dan melalui contoh yang mereka berikan, perusahaan asing mendorong penyebaran kemajuan teknologi di dalam ekonomi. Kecuali itu investasi asing seringkali memberikan latihan keterampilan bagi buruh, dan pengetahuan yang diperoleh karyawan ini dapat ditularkan kepada anggota lain dari jajaran buruh, atau karyawan yang baru menyelesaikan latihan itu kelak dapat bekerja pada perusahaan setempat.

Dari beberapa keuntungan yang diperoleh dengan adanya investasi langsung swasta asing tersebut di atas, ma-

42) G.M. Meier, Op. Cit., hal. 144

43) Sadono Sukirno, Loc. Cit., hal. 380

sih ada beberapa keuntungan yang diperoleh dengan membuka kesempatan penanaman modal asing, yaitu seperti yang dikemukakan oleh Kartasapoetra, bahwa :

"Pertama, produk-produk yang dihasilkan dengan menggunakan bahan baku yang terdapat di dalam negeri akan jauh meningkat, baik kualitas maupun kuantitas. Kedua, jika produksi mengalami kegagalan, resiko dipikul penanaman modal sendiri. Ketiga, para pekerja Indonesia memperoleh kesempatan kerja dan membiasakan diri dengan teknologi tinggi. Keempat, bila perjanjian kontrak telah habis, maka segala peralatan-peralatan akan menjadi milik perusahaan Indonesia. Kelima, para pekerja tersebut memperoleh cukup pengalaman serta keterampilan untuk membangun perusahaan nasional yang sejenis dengan perusahaan yang dibangun melalui penanaman langsung swasta asing. Keenam, devisa negara akan meningkat, pendapatan perkapita akan meningkat dan produk-produk kebutuhan rakyat banyak akan mudah diperoleh di pasaran dengan mutu yang lebih baik." 44)

Oleh karena itu, pemerintah harus berusaha memikat para investor asing untuk menanamkan modalnya di dalam negeri dengan menyediakan fasilitas, mengusahakan tambahan jasa umum, memperluas bantuan, atau memberikan subsidi untuk masukan pada usaha asing, perangsang istimewa dan konsesi pajak. Hal ini disebabkan karena ruang gerak investor asing sering dikendala dengan berbagai peraturan yang melarang masuknya modal asing ke dalam sektor ekonomi tertentu. Memberikan batas pada tingkat partisipasi asing dalam hak memiliki atau pengelolaan, memberikan syarat khusus bagi lapangan kerja domestik dan asing, membatasi jumlah laba, mengadakan pengawasan atas transfer laba dan repatriasi-

44) G. Kartasapoetra, Manajemen Penanaman Modal Asing, (Jakarta: Bina Aksara), 1985, hal. 91

modal. Namun selama tahun-tahun terakhir, nampak adanya kebijaksanaan mengenai investasi asing, dan sejumlah tindakan perangsang telah diberlakukan. Sarana perangsang ini mencakup keputusan tentang fasilitas overhead seperti yang terdapat dalam kawasan industri, tarif proteksi untuk komoditi impor yang bersaing dengan komoditi setempat yang dihasilkan oleh perusahaan asing, pembebasan bea impor pada peralatan dan bahan yang diperlukan, pemberian jaminan valuta asing atau hak khusus. Kebijakan konsesi pajak untuk mendorong investasi baru yang dikehendaki dan undang-undang khusus demi melindungi modal asing.⁴⁵

Prioritas yang diberikan oleh pemerintah bagi penanaman modal asing yaitu, yang dapat memenuhi ketentuan sebagai berikut.⁴⁶

- a. Dapat menambah penerimaan devisa bagi negara.
- b. Yang dapat membantu mengurangi impor sesuatu barang, bahan dan jasa.
- c. Yang meskipun tidak mengubah penerimaan devisa maupun mengurangi impor secara berarti, akan tetapi :
 - Dapat memberi hasil dengan cepat.
 - Dapat menambah kesempatan kerja.
 - Mengintroduksi teknologi atau cara kerja baru yang dapat menaikkan produktifitas dalam sektor produksi.
 - Membawa alat-alat perlengkapan modern yang dapat mem-

45) G.M. Meier, Op. Cit., hal. 137

46) G. Kartasapoetra. Op. Cit., hal. 355

perbesar efektifitas kerja/ menurunkan biaya produksi.

Dari berbagai sumbangan yang dapat diciptakan oleh penanaman modal langsung seperti yang telah dijelaskan, tidaklah berarti bahwa kehadiran modal asing akan sepenuhnya menjamin bahwa pembangunan ekonomi yang lebih cepat akan tercipta. Penanaman modal asing juga dapat menimbulkan beberapa akibat yang tidak menguntungkan kepada pembangunan ekonomi. Penanaman modal langsung dapat mengurangi tingkat tabungan yang tercipta pada masa yang akan datang apabila kegiatan mereka mempertinggi tingkat konsumsi masyarakat, sebagai akibat dari lebih banyaknya barang konsumsi yang tersedia, dan menghalangi perkembangan perusahaan-perusahaan nasional yang sejenis. Demikian pula, dalam jangka panjang modal langsung dapat memperburuk masalah kekurangan mata uang asing, yaitu apabila hasil-hasil mereka tidak diekspor atau tidak menggantikan barang-barang impor, dan mereka mengimpor bahan mentah dari luar negeri dan mengirimkan keuntungan yang diperoleh mereka kepada perusahaan-perusahaan induknya di luar negeri.

Perusahaan-perusahaan asing dapat mematikan kompetisi atau persaingan dan menghambat perkembangan perusahaan-perusahaan yang sejenis dengan mereka. Pengetahuan teknologi, keahlian manajemen dan keahlian pemasaran yang lebih baik yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan asing akan melemahkan persaingan dari perusahaan-perusahaan nasional. Apabila berkembangnya perusahaan-perusahaan asing hanya

mengakibatkan kesukaran untuk menumbuhkan perusahaan-perusahaan nasional sejenis, akibat seperti itu tidaklah terlalu serius. Tetapi kalau akibat yang ditimbulkan oleh berkembangnya perusahaan-perusahaan asing adalah mematikan perusahaan-perusahaan nasional yang sudah ada, maka akibat yang tidak menguntungkan tersebut adalah cukup serius karena menimbulkan pengangguran dan menghapuskan mata pencaharian segolongan masyarakat.

Oleh karena itu usaha mendorong partisipasi luar negeri untuk menanam modalnya di Indonesia harus diarahkan pada peningkatan kemampuan sendiri dalam mengatasi keterbatasan-keterbatasan bangsa kita. Potensi luar negeri perlu dimanfaatkan melalui penanaman modal luar negeri (PMA), dengan mengarahkan investasinya secara selektif ke bidang-bidang usaha yang menggunakan teknologi tinggi, serta sesuai dengan program dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

BAB IV

ANALISA PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Perekonomian Indonesia

Perkembangan perekonomian Indonesia, sejak ditetapkannya pembangunan lima tahun pertama hingga pembangunan lima tahun kelima ini, tidak banyak berbeda dengan negara-negara berkembang pada umumnya yang menganut perekonomian terbuka. Keadaan perkembangan perekonomian di dalam negeri negara-negara berkembang, banyak dipengaruhi oleh perekonomian negara-negara maju.

Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup tinggi berawal dengan adanya kenaikan harga minyak di pasaran internasional pada tahun 1973, harga tersebut terus mengalami kenaikan hingga pada tahun 1981. Hal tersebut telah memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia, yang dapat dilihat pada laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi pada periode 1973 - 1981, yang merupakan masa emas bagi perekonomian Indonesia. Laju pertumbuhan ekonomi yang mengesankan itu, sejak tahun pertama hingga tahun 1981 rata-rata mencapai diatas 7%. Pada akhir tahun 1981 laju pertumbuhan ekonomi mencapai 7,9 %, kemudian setelah itu pada tahun 1982 laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang cukup drastis hingga mencapai 2,2%. (lihat pada tabel IV.I.1). Jadi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan sebesar 5,7 %, penurunan se-

TABEL IV.1.1
 PERKEMBANGAN PRODUK DOMESTIK BRUTO DAN
 LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TA-
 HUN (1978 - 1990), DALAM MILYAR RUPIAH.

TAHUN	! PDB.HARGA BERLAKU	! PDB.HARGA KONST.83	! LAJU PER- TUMB.EK.
1978	! 35.876	! 57.826,3	! 7,7 %
1979	! 39.629	! 61.468,5	! 6,3 %
1980	! 45.446	! 67.554,6	! 9,9 %
1981	! 54.027	! 72.891,8	! 7,9 %
1982	! 59.633	! 74.495,8	! 2,2 %
1983	! 77.623	! 77.623,0	! 4,2 %
1984	! 89.885	! 83.037,4	! 6,7 %
1985	! 96.997	! 85.081,9	! 2,5 %
1986	! 102.683	! 90.080,5	! 5,9 %
1987	! 124.817	! 94.517,8	! 4,9 %
1988	! 142.020	! 99.936,0	! 5,7 %
1989	! 166.330 *	! 107.321,1 *	! 7,4 %
1990	! 191.060 **	! 114.833,5 **	! 7,0 %
	122.6026.	103660.7	

- umber : - Biro Pusat Statistik (BPS)
 - Central Policy Studies (CPS) Jakarta 1990
 - * Angka sementara
 ** Angka sangat sementara.

cara drastis pada tahun 1982 tersebut, disebabkan oleh anjloknya harga minyak di pasaran internasional, disamping merosoknya harga ekspor komoditi primer yang telah bertahun-tahun merupakan andalan sumber devisa bagi Indonesia.

Keadaan laju pertumbuhan ekonomi 2,2 % pada tahun 1982 belum juga ada tanda-tanda yang menunjukkan akan kembalinya ke keadaan pemulihan resesi ekonomi yang berkelanjutan, hal ini berdampak terhadap perekonomian Indonesia, yang ditunjukkan oleh perkembangan produk domestik bruto yang tumbuh rata-rata di bawah 5% pada tahun 1982 hingga tahun 1987. Baru pada tahun 1988 keadaan laju pertumbuhan ekonomi mulai pulih kembali yang ditunjukkan oleh produk domestik bruto yang tumbuh 5,7 % dan 7,4 % pada tahun 1988 dan 1989. Hal tersebut terutama diakibatkan oleh pesatnya perkembangan ekspor non migas dan adanya perbaikan harga pada ekspor komoditi migas.

Sebagai akibat resesi ekonomi pada tahun 1982, yang menyebabkan penerimaan dari sektor ekspor mengalami penurunan, upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perdagangan guna memacu tingkat pertumbuhan ekonomi serta kegiatan pembangunan diberbagai sektor, telah dilakukan berbagai upaya, seperti dilakukannya devaluasi pada tahun 1983 dan tahun 1986. Pelaksanaan devaluasi tahun 1983 bertujuan untuk menyelamatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, meningkatkan ekspor, menekan impor serta untuk menstabilkan defisit transaksi berjalan, sedang deva-

luasi tahun 1986 disamping untuk meningkatkan ekspor, stabilisasi defisit transaksi berjalan, juga untuk stabilitas di bidang moneter. Secara umum devaluasi tahun 1983 dan tahun 1986, bila dikaitkan dengan keadaan pasar internasional adalah agar supaya barang Indonesia yang diekspor dapat bersaing dipasaran internasional, sehingga permintaan barang Indonesia di pasaran internasional dapat meningkat.

✓ Dilain pihak, usaha pemerintah untuk terus meningkatkan pendapatan devisa negara, guna memenuhi kebutuhan pembangunan yang diperoleh dari luar negeri dalam bentuk impor, diperhadapkan pada lemahnya keinginan untuk melakukan investasi oleh para investor. Sementara itu, laju inflasi merupakan salah satu masalah yang dihadapi dalam pembangunan sebagai akibat lemahnya sisi "penawaran".

Dalam perekonomian Indonesia inflasi merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi aktivitas kegiatan ekonomi, lemahnya penawaran dalam suatu perekonomian akan berdampak pada kenaikan harga barang, dan hal ini akan melemahkan daya beli masyarakat yang pada akhirnya keinginan para investor untuk melakukan investasi berkurang, sebagai akibat berkurangnya permintaan masyarakat. Perkembangan laju inflasi di Indonesia dapat dilihat pada tabel IV.I.2. Dimana pada tahun 1979 dan 1980 adalah 20,7 dan 15,9 %, atau hingga tahun 1980, keadaan laju inflasi menunjukkan fluktuasi yang masih tinggi yaitu berada diatas rata-rata 20% selama periode 1973 - 1980. Seperti diketahui periode

TABEL IV.I.2
LAJU INFLASI DI INDONESIA
TAHUN 1979 - 1990 (DALAM PERSEN)

TAHUN	TINGKAT INFLASI
1979	20,7
1980	15,9
1981	7,1
1982	9,7
1983	11,5
1984	8,8
1985	4,3
1986	8,8
1987	8,9
1988	5,5
1989	6,0
1990	9,5

Sumber : Laporan Bank Indonesia 1990

tersebut bagi Indonesia merupakan masa keemasan bagi penerimaan devisa dari migas, sebagai akibat adanya kenaikan harga minyak di pasaran internasional.

Laju inflasi yang ditunjukkan pada akhir Pelita III hingga pada Pelita IV, menunjukkan suatu tingkat yang lebih baik dibanding laju inflasi pada pelita sebelumnya, penurunan laju inflasi tersebut hingga mencapai rata-rata

di bawah 10%, merupakan suatu keberhasilan yang dicapai oleh pemerintah dalam usaha memerangi penyakit ekonomi tersebut. Melalui berbagai kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan keinginan masyarakat dalam melakukan investasi di berbagai sektor ekonomi sehingga tercipta kondisi perekonomian yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga stabil. Penurunan inflasi pada dekade 80-an, juga disebabkan oleh karena menurunnya penerimaan pemerintah di sektor ekspor migas yang diakibatkan penurunan harga minyak bumi di pasaran internasional.

* Permasalahan ekonomi yang banyak diperbincangkan oleh para ekonom yaitu kesulitan yang dihadapi perekonomian Indonesia menyangkut pembayaran utang luar negeri. Keadaan perekonomian Indonesia yang dibebani oleh hutang luar negeri, telah menciptakan kondisi bagi perekonomian untuk meningkatkan ekspor non migas, sehingga beban hutang tersebut dapat diatasi. Namun demikian, pembangunan ekonomi Indonesia yang sumber pembiayaan utamanya adalah dari tabungan pemerintah disamping yang bersumber dari bantuan luar negeri, terus mengalami kenaikan.*

Perkembangan bantuan luar negeri seperti yang terlihat pada tabel IV.I.3, pada pelita III sebesar 10.406,3 milyar rupiah, dengan perincian untuk bantuan program sejumlah 204 milyar rupiah dan bantuan proyek sejumlah yaitu 10.202,3 milyar rupiah. Sementara itu pada pelita IV pinjaman luar negeri terus membengkak hingga mencapai 28.952,1

TABEL IV.I.3
KOMPOSISI BANTUAN LUAR NEGERI
TAHUN 1979/1980 - 1990/1991 (MILYAR RUPIAH)

TAHUN ANGGARAN	BANTUAN PROGRAM	BANTUAN PROYEK	JUMLAH	KENAIKAN	
				JUMLAH	%
Pelita III					
1979/80	64,8	1.316,3	1.381,1		
1980/81	64,1	1.429,7	1.493,8	112,7	8,2
1981/82	45,1	1.663,9	1.709,0	215,2	14,4
1982/83	15,1	1.924,9	1.940,0	231,0	13,5
1983/84	14,9	3.867,5	3.882,4	1.942,4	100,1
Jumlah	204,0	10.202,3	10.406,3		
Pelita IV					
1984/85	69,3	3.408,7	3.478,0	-404,4	-10,4
1985/86	69,2	3.503,3	3.572,5	835,5	24,1
1986/87	1.957,2	3.795,0	5.752,2	2.179,7	61,0
1987/88	728,3	5.429,7	6.158,0	405,8	7,1
1988/89	2.041,1	7.950,3	9.991,4	3.833,4	62,3
Jumlah	4.865,1	24.087,0	28.952,1		
Pelita V					
1989/90	1.007,3	8.422,2	9.429,5	-561,9	-5,6
1990/91	1.396,9	8.508,1	9.905,0	475,5	5,1

Sumber : - Nota keuangan, RAPEN 1988/89.

- Laporan Bank Indonesia 1991.

milyar rupiah, untuk bantuan proyek berjumlah 24.087,0 milyar rupiah dan untuk bantuan program berjumlah 4.865,1 milyar rupiah. Sedangkan untuk tahun pertama dan kedua pelita V bantuan luar negeri berjumlah 9.429,5 pada tahun anggaran 1989/90 dan 9.905,0 milyar rupiah untuk tahun anggaran - 1990/91.

Bila dilihat perkembangan bantuan luar negeri dari prosentase kenaikannya setiap tahunnya, terlihat bahwa pada tahun 1983/1984 menunjukkan kenaikan yang sangat besar, kenaikan tersebut karena adanya kenaikan harga minyak maupun volume eksportnya pada tahun 1981, sehingga memiliki cadangan devisa yang cukup untuk mengatasi bunga dan cicilan pinjaman luar negeri. Sementara itu pada tahun 1984/1985 prosentase kenaikannya adalah negatif, hal ini disebabkan karena terjadinya penurunan pada bantuan proyek.

Semakin besar bantuan luar negeri Indonesia, hal ini tidak akan terlepas dari beban hutang yang semakin membengkak dari tahun ketahun. Pembengkakan jumlah cicilan dan bunga pinjaman dapat disebabkan karena jumlah hutang pokok dari tahun ketahun yang telah jatuh tempo dan juga karena adanya defresiasi dollar terhadap mata uang seperti Yen, Mark, Poundsterling dan sebagainya. Defresiasi dollar terhadap mata uang tersebut dapat mempengaruhi cicilan dan bunga pinjaman Indonesia, mengingat komposisi hutang Indonesia sebagian besar bukan dalam bentuk valuta US dollar. Sementara itu dalam pelita V bantuan luar negeri ma-

erupakan komponen terbesar dari dana pembangunan dibandingkan dengan dana yang diperoleh dari tabungan intah. Jumlah bantuan luar negeri pada Pelita V ini, mencapai 60.417,9 milyar rupiah, sedangkan tabungan intah diperkirakan akan mencapai 47.114,2 milyar rupiah. Sementara anggaran pembangunan pada Pelita V tersebut berjumlah 107.532,1 milyar rupiah. Bila dilihat proses bantuan luar negeri terhadap anggaran pembangunan sebesar 56 %, sedangkan prosentase tabungan pemerintah terhadap anggaran pembangunan sebesar 44 %.

Keadaan yang ditunjukkan oleh prosentase bantuan luar negeri dan tabungan pemerintah terhadap anggaran pembangunan, memberikan indikasi betapa besarnya peranan bantuan luar negeri terhadap pembangunan yang sedang dilaksanakan dewasa ini dibanding tabungan pemerintah.

* Dalam tabel IV.I.4, yang menunjukkan penerimaan dari sektor migas dan beban hutang ditambah bunga pinjaman. Berdasarkan Rancangan Pendapatan dan Pendapatan Negara (RAPBN) menunjukkan bahwa penerimaan dari migas lebih besar dari beban hutang dan bunga pinjaman yang harus dibayar setiap tahunnya hingga tahun anggaran 1987/1988. Sedangkan pada tahun anggaran 1988/1989 dan 1989/1990, beban hutang dan bunga melampaui penerimaan dari migas, dan untuk tahun anggaran 1990/1991 penerimaan dari migas meningkat cukup besar melampaui beban utang dan bunga, hal tersebut disebabkan akibat dari adanya perbaikan harga minyak dan kemelut

TABEL IV.I.4
 PENERIMAAN MIGAS, BEBAN HUTANG DAN BUNGA
 (MILYAR RUPIAH)

TAHUN ANGGARAN	PENERIMAAN DARI MIGAS	BEBAN HUTANG DAN BUNGA	SELISIH
1979/1980	4.260,0	684,0	3.576,0
1980/1981	7.020,0	785,0	6.235,0
1981/1982	8.628,0	931,0	7.697,0
1982/1983	8.179,0	1.304,0	6.875,0
1983/1984	9.520,0	2.158,0	7.362,0
1984/1985	10.430,0	2.845,0	7.585,0
1985/1986	11.144,0	3.569,0	7.575,0
1986/1987	6.338,0	5.058,0	1.280,0
1987/1988	10.047,0	8.205,0	1.842,0
1988/1989	9.527,0	10.940,0	-1.413,0
1989/1990	11.252,0	11.939,0	-687,0
1990/1991	17.712,0	13.395,0	4.317,0

Sumber : - BNI 1946, Tinjauan Ekonomi No.136
 - Laporan Bank Indonesia 1991

Yang terjadi di Timur Tengah (kawasan teluk)

Dari tahun anggaran 1979/1980 hingga tahun anggaran 1985/1986 penerimaan dari migas terus mengalami kenaikan, namun pada tahun anggaran 1986/1987 hingga tahun anggaran 1989/1990 menunjukkan keadaan yang berfluktuasi, sebagai

akibat dari harga minyak yang tidak menentu di pasaran internasional. Sedangkan kalau kita lihat beban utang dan bunga dari tahun anggaran 1979/1980 hingga tahun anggaran 1990/1991 terus memperlihatkan perkembangan dari tahun ke tahun, hal tersebut dapat dimengerti karena dalam pelaksanaan pembangunan ketergantungan kita kepada utang luar negeri sangat besar, disamping hutang yang lama juga sudah banyak yang jatuh tempo.

Semakin besarnya pembayaran cicilan hutang luar negeri dan bunga pinjaman dari tahun ketahun merupakan suatu permasalahan ekonomi yang banyak di hadapi oleh negara-negara berkembang, demikian halnya Indonesia. Oleh para pengamat ekonomi mengawatirkan, jika beban hutang dan bunga pinjaman ini terus mengalami kenaikan, hal ini secara makro akan berdampak terhadap perekonomian melalui yaitu berkurangnya kemampuan pemerintah untuk melakukan investasi. Bila terjadi penurunan investasi, maka penciptaan terhadap lapangan pekerjaan akan berkurang dan produksi barang yang dihasilkan akan berkurang, dengan demikian akan dapat mengakibatkan terjadinya inflasi, sementara daya beli masyarakat menurun dan hal ini akan mengakibatkan menurunnya laju pertumbuhan ekonomi.

• Melihat keadaan yang terjadi terhadap penerimaan dari sektor migas, di mana belum juga memberikan harapan akan adanya tanda-tanda perbaikan dari sektor ini, maka pemerintah menempuh alternatif untuk mendorong sektor non migas,

antara lain telah dikeluarkannya beberapa kebijaksanaan yang berhubungan dengan usaha peningkatan ekspor non migas guna mengatasi penurunan dari sektor ekspor migas, sehingga kenaikan beban hutang dan bunga pinjaman luar negeri dapat di atasi, dan tersedianya anggaran pembangunan guna memacu pertumbuhan ekonomi.

Menurunnya penerimaan dari hasil ekspor migas dan meningkatnya beban hutang dan bunga pinjaman, merupakan hal yang baru untuk pertama kalinya terjadi di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1988/1989, bila dibandingkan tahun-tahun anggaran sebelumnya. Menurunnya penerimaan dari sektor ekspor migas ini juga akan mempengaruhi penerimaan dalam negeri/tabungan pemerintah.

Salah satu sumber dana pembangunan yaitu berasal dari tabungan pemerintah, tabungan pemerintah ini merupakan selisih antara penerimaan dalam negeri dengan pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah merupakan sumber pembiayaan pembangunan nasional, disamping bantuan luar negeri yang diterima setiap tahunnya. Tabungan pemerintah dari tahun ke tahun terus menunjukkan angka kenaikan, hingga tahun anggaran 1985/1986. Jika pada tahun anggaran 1979/1980 tabungan pemerintah hanya 2.635,0 milyar rupiah, maka pada tahun anggaran 1985/1986 tabungan pemerintah telah mencapai angka yaitu 7.301,3 milyar rupiah. (lihat tabel IV.I.5) Besarnya tabungan pemerintah pada tahun anggaran 1985/1986, disebabkan karena besarnya penerimaan dalam negeri yang

TABEL IV.I.5
 PENERIMAAN DALAM NEGERI, PENGELUARAN RUTIN
 DAN TABUNGAN PEMERINTAH 1979/80 - 1990/91.
 (MILYAR RUPIAH)

TAHUN ANGGARAN	PENERIMAAN DALAM NEGERI	PENGELUARAN RUTIN	TABUNGAN PEMERINTAH
1979/1980	6.696,8	4.061,8	2.635,0
1980/1981	10.227,0	5.800,0	4.427,0
1981/1982	12.212,6	6.977,6	5.235,0
1982/1983	13.256,2	7.834,2	5.422,0
1983/1984	14.432,7	8.411,8	6.020,9
1984/1985	15.905,5	9.428,9	6.476,6
1985/1986	19.252,8	11.951,5	7.301,3
1986/1987	16.140,8	13.559,0	2.581,8
1987/1988	20.802,0	17.471,2	3.331,8
1988/1989	23.004,2	20.739,2	2.265,0
1989/1990	28.740,0	24.331,3	4.408,7
1990/1991	39.546,4	29.998,4	9.548,0

Sumber : - Nota Keuangan RAPBN 1988/1989
 - Laporan Bank Indonesia 1991.

TABEL IV.1.5
 PENERIMAAN DALAM NEGERI, PENGELUARAN RUTIN
 DAN TABUNGAN PEMERINTAH 1979/80 - 1990/91.
 (MILYAR RUPIAH)

TAHUN ANGGARAN	PENERIMAAN DALAM NEGERI	PENGELUARAN RUTIN	TABUNGAN PEMERINTAH
1979/1980	6.696,8	4.061,8	2.635,0
1980/1981	10.227,0	5.800,0	4.427,0
1981/1982	12.212,6	6.977,6	5.235,0
1982/1983	13.256,2	7.834,2	5.422,0
1983/1984	14.432,7	8.411,8	6.020,9
1984/1985	15.905,5	9.428,9	6.476,6
1985/1986	19.252,8	11.951,5	7.301,3
1986/1987	16.140,8	13.559,0	2.581,8
1987/1988	20.802,0	17.471,2	3.331,8
1988/1989	23.004,2	20.739,2	2.265,0
1989/1990	28.740,0	24.331,3	4.408,7
1990/1991	39.546,4	29.998,4	9.548,0

Sumber : - Nota Keuangan RAPBN 1988/1989
 - Laporan Bank Indonesia 1991.

mencapai 19.252,8 milyar rupiah, sementara pengeluaran rutin hanya mencapai 11.951,5 milyar rupiah.

Besarnya penerimaan dalam negeri tahun anggaran - 1985/1986 tidak diikuti pada tahun anggaran 1986/1987, akan tetapi mengalami penurunan, sementara pengeluaran rutin mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 1.607,8 milyar rupiah, sehingga berdampak terhadap penurunan tabungan pemerintah untuk tahun anggaran 1986/1987 yang hanya mencapai 2.581,8 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat penurunan sebesar 4.719,5 milyar rupiah. Untuk tahun anggaran 1987/1988 tabungan pemerintah hanya mencapai 3.331,8 milyar rupiah dan menurun lagi pada tahun anggaran berikutnya dan hanya mencapai 2.265,0 milyar rupiah, sedangkan untuk tahun anggaran 1989/1990 dan tahun anggaran 1990/1991 tabungan pemerintah meningkat kembali dan mencapai angka tertinggi pada tahun anggaran 1990/1991 yaitu sebesar 9.548,0. Tingginya tabungan pemerintah pada tahun anggaran 1990/1991 adalah sebagai akibat dari tingginya penerimaan dalam negeri yaitu sebesar 39.546,4 milyar rupiah, sementara pengeluaran rutin hanya sebesar 29.998,4 milyar rupiah. Hal tersebut dapat dimengerti mengingat pada tahun anggaran tersebut terjadi peningkatan penerimaan dari ekspor migas, akibat adanya kenaikan harga migas di pasaran internasional.

Melihat kenyataan sekarang ini, semakin kecilnya tabungan pemerintah, apalagi bila dibandingkan dengan ban-

tuan luar negeri yang sudah melebihi tabungan pemerintah setidaknya untuk tiga tahun anggaran terakhir. Upaya untuk mempertahankan tabungan pemerintah sebagai dana pembangunan nasional yang lebih besar dari bantuan luar negeri, melalui upaya peningkatan penerimaan dalam negeri, yaitu upaya pemerintah dalam mendorong kegiatan ekspor, sehingga dapat meningkatkan penerimaan baik yang bersumber dari migas maupun yang bersumber dari non migas. Dan dari sisi pengeluaran maka pemerintah berusaha untuk menekan pengeluaran rutin tanpa mengorbankan pos-pos yang dapat mengganggu kegiatan pembangunan.

Sedangkan gambaran mengenai neraca pembayaran Indonesia dari tahun anggaran 1978/1979 sampai 1989/1990, bahwa neraca pembayaran dan perdagangan luar negeri selama tahun-tahun 1979/80 dan 1980/81 berkembang dengan amat pesat melampaui sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Akan tetapi pada tahun-tahun berikutnya perkembangan neraca pembayaran terjerat oleh dampak resesi ekonomi dunia, hal mana tercermin pada penurunan penghasilan devisa dari ekspor dan kemunduran dalam tingkat cadangan devisa selama tahun-tahun bersangkutan. Guna menghadapi perkembangan perekonomian dunia yang demikian suram dan iklim proteksionisme yang diciptakan oleh negara-negara industri, sejak bulan Januari 1982 pemerintah telah mengeluarkan serangkaian keputusan yang mendasar untuk merangsang perdagangan luar negeri pada umumnya dan ekspor pada khususnya, dalam rangka mem-

ertahankan kestabilan ekonomi dan laju pembangunan.

Kebijaksanaan devaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pada dasarnya berhasil meningkatkan neraca perdagangan Indonesia, sebagai akibat meningkatnya ekspor, namun nilai impor maupun jasa-jasa netto mengikuti kenaikan pada neraca perdagangan, sehingga transaksi berjalan tetap menunjukkan defisit pada tahun setelah dilakukan devaluasi. Untuk pertama kalinya defisit yang cukup besar terjadi pada tahun 1978 yaitu mencapai -1.155 juta dollar, bila dibandingkan defisit tahun-tahun sebelumnya, sehingga memaksa pemerintah melakukan devaluasi pada tahun 1978. Devaluasi yang dilakukan pemerintah menjelang Pelita III tersebut, berhasil meningkatkan ekspor Indonesia, sementara impor dan jasa netto nilainya mengalami kenaikan lebih kecil bila dibandingkan dengan kenaikan pada ekspor, sehingga transaksi berjalan mengalami surplus sebesar 2.198 juta US dan US\$. 2.131 juta, pada tahun 1979/80 dan 1980/81. Perkembangan ini disebabkan karena nilai ekspor dalam masa dua tahun tersebut rata-rata meningkat dengan 42,0%, sedangkan nilai impor barang dan jasa-jasa netto menunjukkan kenaikan sebesar rata-rata 28,8%. Surplus transaksi berjalan tersebut pada gilirannya mengakibatkan bertambahnya cadangan devisa sebesar US.\$ 4.426 juta selama periode 1979/80 - 1980/81. Sebaliknya dengan penurunan ekspor dan kenaikan pengeluaran devisa untuk impor dan jasa-jasa dalam periode 1981/82-1982/83, surplus transaksi berjalan berbalik menjadi defi-

U R	85	1985/86	1986/87	1987/88	1988/89	1989/90
A. TRANSAK	8	-1.832	-4.051	-1.707	-1.859	-1.599
1. Baran	4	6.060	2.246	5.391	5.513	6.456
a. Eks	1	18.612	13.697	18.343	19.824	23.830
-No	7	6.175	6.731	9.502	12.184	14.493
-M1	4	12.437	6.966	8.841	7.640	9.337
b. Imp	7	-12.552	-11.451	-12.952	-14.311	-17.374
-No	0	-10.078	-9.356	-10.597	-12.239	-14.845
-M1	7	-2.474	-2.095	-2.355	-2.072	-2.529
2. Jasa	-2	-7.892	-6.297	-7.098	-7.372	-8.055
a. Non	1	-4.052	-4.010	-4.372	-4.864	-5.158
b. Mig	1	-3.840	-2.287	-2.726	-2.508	-2.897
B. LALU LI	6	2.360	4.575	3.235	2.614	2.405
1. Modal	7	1.788	3.343	1.526	2.825	1.830
a. Pen	9	3.432	5.472	4.575	6.588	5.516
-Ba	2	38	48	858	1.120	848
-Ba	7	3.394	5.424	3.717	5.468	4.668
b. Pel	2	-1.644	-2.129	-3.049	-3.763	-3.686
2. Modal	9	572	1.232	1.709	-211	575
-Pe	5	299	252	544	585	722
-La	4	273	980	1.165	-796	-147
C. SDR...		-	-	-	-	-
D. JUMLAH		5.828	524	1.528	755	806
E. SELISIH		-498	-1.262	57	-1.432	-558
F. LALU LI		-30	738	-1.585	677	-248
(Cadang						

Sumber :

sit sebesar US\$ 2.790 juta pada tahun 1981/82 dan US.\$ 6.540 juta pada tahun 1982/83. Akibat defisit transaksi berjalan tersebut maka cadangan devisa telah mengalami penurunan sebesar US.\$ 2.929 juta selama periode 1981/82 - 1983/83. (lihat tabel IV.I.6).

Dalam masa 1978/79 - 1982/83 posisi neraca pembayaran dipengaruhi juga oleh alokasi SDR yang diterima Indonesia pada tiga tahun pertama periode tersebut sebesar berturut-turut US.\$ 64 juta, US.\$ 65 juta, dan US.\$ 62 juta. Pos selisih perhitungan bersih dari tahun 1978/79 sampai dengan tahun 1982/83 terus menunjukkan jumlah negatif, hal mana terutama mencerminkan arus modal jangka pendek ke luar, berupa tagihan kepada luar negeri yang tidak tercakup dalam transaksi-transaksi neraca pembayaran lainnya.

Defisit transaksi berjalan pada tahun 1982/83 yang cukup besar yaitu US.\$ 6.540 juta, adalah sebagai akibat dari peningkatan impor yang cukup besar yaitu US.\$ 20.376 juta sementara ekspor hanya sebesar US.\$ 19.389 juta, dan menyebabkan defisit neraca perdagangan sebesar US.\$ 987 juta, demikian pula dalam neraca pembayaran mengalami defisit sebesar US.\$ 850 juta serta memaksa pemakaian cadangan devisa sebesar US.\$ 1.941 juta. Menghindari semakin membengkaknya defisit transaksi berjalan maka pemerintah melakukan devaluasi pada tahun 1983, dampak devaluasi pada tahun 1983 tersebut berhasil mengurangi defisit transaksi berjalan, dimana pada tahun 1983/84 defisit transaksi ber-

TABEL IV.1.7
 CADANGAN DEvisa (FOREIGN EXCHANGE RESERVE)
 (JUTA US.\$)

TAHUN	AKTIVA BRUTO	PASSIVA BRUTO	CADANGAN DEvisa BERSIH
1979	4.167,0	22,2	4.144,8
1980	6.480,2	0,1	6.480,1
1981	6.084,8	0,1	6.084,7
1982	4.154,3	0,1	4.154,2
1983	4.809,2	0,9	4.808,3
1984	5.751,6	0,2	5.751,4
1985	5.846,4	0,2	5.846,2
1986	5.302,2	0,2	5.302,0
1987	6.512,4	0,1	6.512,3
1988	6.191,1	0,1	6.191,0
1989	6.562,0	0,1	6.561,9
1990	8.661,4	0,1	8.661,3

Sumber : - Biro Pusat Statistik
 - Laporan Bank Indonesia 1991.

Jalan sebesar US.\$ 4.151 juta menjadi US.\$ 1.968 juta pada tahun 1984/85. Akan tetapi setelah tahun tersebut neraca pembayaran Indonesia terus menunjukkan penurunan demikian pula defisit transaksi berjalan kembali memperlihatkan angka yang cukup besar yaitu US.\$ 4.051 juta,

pada tahun 1986/87. Karena rendahnya penerimaan dari ekspor, sebagai akibat merosotnya harga minyak dipasaran Internasional, dimana pada saat itu penerimaan pemerintah masih sangat tergantung pada migas. Sehingga pada tahun 1986 dalam rangka mengatasi neraca pembayaran dan menyelamatkan APBN maka pemerintah terpaksa melakukan devaluasi lagi. Walaupun devaluasi telah berhasil meningkatkan penerimaan ekspor, namun nilai impor dan jasa netto tetap tinggi maka transaksi berjalan tetap mengalami defisit setelah dilakukan devaluasi tersebut.

Secara umum gambaran mengenai neraca pembayaran Indonesia berdasarkan RAPBN 1987/88, suatu hal yang menggembarakan pada ekspor Indonesia, dimana ekspor non migas telah berhasil menggantikan kedudukan ekspor migas sebagai penerimaan terbesar dalam kegiatan ekspor. Sementara itu nilai impor dan jasa netto sudah dapat dikendalikan pada tingkat yang wajar. Demikian pula cadangan devisa sudah dapat dipertahankan rata-rata US.\$ 6.000 Juta untuk tiap tahunnya dan bahkan mencapai US.\$ 8.661,3 juta tahun 1990. (lihat tabel IV.I.7). Perbaikan yang terjadi pada neraca pembayaran, setidaknya untuk tiga tahun terakhir ini tidak dari keberhasilan pemerintah dalam upaya mendorong kegiatan ekspor non migas, dengan dikeluarkannya berbagai kebijaksanaan/deregulasi baik di bidang moneter, penanaman modal maupun di bidang perdagangan luar negeri.

4.2. Perkembangan Ekspor Indonesia

Sebagai penganut sistem ekonomi terbuka, lalu lintas perdagangan internasional berperan penting dalam perekonomian dan pembangunan di Indonesia. Upaya peningkatan ekspor merupakan bagian integral dari penciptaan kerangka landasan sektor perdagangan yang tangguh guna menunjang pembangunan nasional. Dalam era perdagangan dunia yang dinamis dan cepat berubah seperti saat ini, pemerintah dan dunia usaha terpanggil untuk menjawab tantangan perdagangan ekspor tersebut. Harapan semua pihak tentunya agar ekspor Indonesia tetap dapat dipertahankan laju pertumbuhannya dan semakin handal peranannya sebagai sumber devisa untuk membiayai kegiatan pembangunan.

Ekspor Indonesia terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu kelompok minyak bumi dan gas alam cair, dan kelompok komoditi non migas yang terdiri dari komoditi primer dan tradisional yang selama ini menjadi andalan pemasukan devisa. Dalam periode tahun 1978 - 1990 ekspor Indonesia menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi. Dalam tahun 1978 nilai ekspor tercatat US.\$ 11.643 juta, kemudian meningkat dan mencapai puncaknya pada tahun 1981 yaitu sebesar US.\$ 25.165 juta. Namun kemudian menurun dan pada tahun 1986 hanya mencapai US.\$ 14.805 juta. Setelah itu meningkat kembali dan mencapai nilai US.\$ 25.675 juta pada tahun 1990.

Tabel IV.II.a
 PERKEMBANGAN EKSPOR INDONESIA
 TAHUN 1978 - 1990
 (DALAM US.\$ JUTA)

TAHUN	! MINYAK !	GAS !	NON !	JUMLAH !
	! BUMI !	ALAM !	MIGAS !	
1978	! 7.438 !	547 !	3.658 !	11.643 !
1979	! 8.871 !	1.293 !	5.426 !	15.590 !
1980	! 15.596 !	2.186 !	6.168 !	23.950 !
1981	! 18.164 !	2.499 !	4.502 !	25.165 !
1982	! 15.493 !	2.906 !	3.929 !	22.328 !
1983	! 13.558 !	2.583 !	5.005 !	21.146 !
1984	! 12.477 !	3.541 !	5.870 !	21.888 !
1985	! 9.083 !	3.635 !	5.869 !	18.587 !
1986	! 5.501 !	2.776 !	6.528 !	14.805 !
1987	! 6.157 !	2.399 !	8.580 !	17.136 !
1988	! 5.189 !	2.493 !	11.537 !	19.219 !
1989	! 6.061 !	2.618 !	13.480 !	22.159 !
1990	! 7.652 !	3.587 !	14.436 !	25.675 !

Sumber : - Biro Pusat Statistik
 - Tinjauan Ekonomi BNI 1946 No.149.

Dari tabel IV.II.a, terlihat bahwa sampai dengan tahun 1986, ekspor minyak bumi dan gas alam mendominasi pemasukan devisa. Kalau pada tahun 1978, peranannya baru mencapai 68,58% dari total ekspor Indonesia, pada tahun 1982 telah meningkat menjadi 82,40%. Namun karena tahun-

1983 harga minyak bumi mulai merosok, maka peranannya dalam ekspor Indonesia mulai menurun dan dalam tahun 1986 hanya sebesar 55,90%. Bila dalam tahun 1981 ekspor migas mencapai US.\$ 20.663 juta, dalam tahun 1986 turun menjadi US.\$ 8.277 juta. Dari data diatas terlihat perkembangan yang agak lamban terjadi dalam periode 1983 - 1987 bila dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Hal tersebut terjadi sebagai akibat anjloknya harga minyak bumi dari US.\$ 35,0 per barrel pada tahun 1981 menjadi US.\$ 9,83 per barrel dalam bulan Agustus 1986, disamping merosotnya harga ekspor komoditi primer yang telah bertahun-tahun merupakan andalan sumber devisa bagi Indonesia.

Di sisi lain, perkembangan ekspor gas alam, walaupun dalam tiga tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan, tetapi belum dapat menutupi turunnya ekspor minyak bumi karena jumlahnya belum begitu besar, kecuali itu harga gas alam pun turun pula, karena penentuan harganya di pasar internasional dikaitkan dengan harga minyak bumi. Sampai dengan tahun 1988, ekspor minyak bumi dan gas alam masih menunjukkan trend yang menurun. Barulah pada tahun 1989, dengan adanya perbaikan harga minyak bumi di pasaran internasional, ekspornya meningkat kembali hingga mencapai nilai US.\$ 8.679 juta atau naik sebesar 12,98% dari tahun 1988, dan bahkan pada tahun 1990 ekspor migas tersebut meningkat lagi mencapai US.\$ 11.239 juta atau meningkat sebesar 33.6% dari tahun 1989.

Tabel IV.II. b
 PERKEMBANGAN EKSPOR NON-MIGAS INDONESIA
 MENURUT JENIS PRODUKSI
 TAHUN 1979 - 1990
 (DALAM US.\$ JUTA)

TAHUN	HASIL PERTANIAN	HASIL INDUSTRI	HASIL TAMBANG	LAIN- LAIN	JUMLAH
1979	3.091	1.973	194	168	5.426
1980	3.690	2.248	236	54	6.168
1981	1.570	2.667	203	62	4.502
1982	1.221	2.466	179	63	3.929
1983	1.373	3.220	170	246	5.005
1984	1.533	3.983	184	170	5.870
1985	2.388	4.084	196	201	5.869
1986	1.754	4.508	247	19	6.528
1987	1.666	6.684	235	5	8.580
1988	1.909	9.262	349	17	11.537
1989	1.943	11.028	503	6	13.480
1990	2.037	11.764	621	14	14.436

Sumber : - Biro Pusat Statistik
 - Tinjauan Ekonomi BNI 1946 No.149

Pada sisi lain, ekspor komoditi non-migas menunjukkan trend yang terus meningkat. Hal ini dimungkinkan dengan adanya upaya pemerintah untuk menggalakkan ekspor non-migas secara terus-menerus melalui serangkaian deregulasi dan de-birokratisasi yang dilakukan sejak tahun 1982. Semakin be-

sarnya peran ekspor non-migas terlihat dari prestasinya yang cukup menonjol pada tiga tahun terakhir. Data ekspor Indonesia tahun 1988 - 1990 memperlihatkan kontribusi sektor non-migas mencapai persentase diatas 60%, dimana peranan komoditas hasil industri mendominasi perolehan-perolehan ekspor non-migas.

Secara umum dapat digambarkan bahwa ekspor non-migas memperlihatkan kecenderungan peningkatan dari tahun 1978 - 1990, kecuali pada tahun 1982 terlihat penurunan sebagai akibat menurunnya harga komoditi primer, akan tetapi naik lagi pada tahun 1983 hingga 1990. Kalau pada tahun 1978 nilai ekspor non-migas sebesar US.\$ 3.658 juta, maka pada tahun 1990 sudah mencapai US.\$ 14.436 juta. (lihat tabel-IV.II.^b). Dalam periode 1981 - 1990, ekspor hasil-hasil pertanian meningkat rata-rata sebesar 2,94% per tahun, kecuali tahun-tahun sebelumnya dimana ekspor hasil pertanian mendominir ekspor non-migas. Perkembangan yang agak lamban tersebut, karena umumnya hasil-hasil pertanian masih merupakan komoditi tradisional seperti getah karet, kopi, teh dan tembakau, yang pasarannya tidak begitu kuat. Juga disebabkan karena harga hasil pertanian mengalami perkembangan kurang stabil dipasaran internasional dan permintaannya sangat lambat, karena mendapat saingan yang ketat dari negara pengekspor hasil pertanian lainnya. Namun demikian terdapat komoditi baru yang mempunyai prospek cukup baik dan perkembangannya dalam periode tersebut cukup pesat.

yaitu udang dan rempah-rempah. Dalam tahun 1981 ekspor udang baru mencapai US.\$ 162,7 juta. Kemudian meningkat menjadi US.\$ 498,7 juta dalam tahun 1988, yang berarti meningkat rata-rata sebesar 17,35% per tahun. Demikian pula dengan ekspor rempah-rempah dalam periode yang sama berkembang rata-rata sebesar 17,32%. Pada tahun 1990 nilai ekspor kedua komoditi dimaksud masing-masing sudah mencapai US.\$ 592,7 juta dan US.\$ 203,6 juta. (data BPS).

Sementara itu, peranan ekspor komoditi hasil pertanian menunjukkan trend yang menurun. Bila pada tahun 1981 peranannya masih 34,87%, maka pada tahun 1990 turun menjadi 16,73%. Hal tersebut selain disebabkan oleh relatif lambatnya perkembangan ekspor komoditi pertanian itu sendiri, juga dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan ekspor komoditi hasil-hasil industri.

Ekspor komoditi hasil industri meningkat dengan rata-rata 15,27% per tahun dalam masa 1979 - 1990. pada tahun 1979 nilai eksportnya baru mencapai US.\$ 1.973 juta, dalam tahun 1990 meningkat menjadi US.\$ 11.764 juta. Sejalan dengan itu, peranannya terhadap ekspor non-migas meningkat pula dari 34,62% pada tahun 1979 menjadi 81,85% pada tahun 1990. Peningkatan ekspor hasil-hasil industri tersebut antara lain didukung oleh membaiknya perekonomian dunia dalam beberapa tahun terakhir serta berhasilnya upaya Indonesia untuk meningkatkan daya saing barang eksportnya di pasar internasional, melalui berbagai kebijaksanaan de-

regulasi dan debirokratisasi.

Meningkatnya ekspor produk-produk hasil industri ini, adalah merupakan pertanda dari berhasilnya pembangunan sektor industri selama ini, sehingga sektor industri kini telah menjelma menjadi sumber utama penerimaan devisa ekspor bagi Indonesia, dan pada saatnya akan berperanan pula sebagai pendukung utama bagi perkembangan ekonomi nasional.

Sementara itu ekspor kelompok komoditi barang tambang meningkat rata-rata 12,03% per tahun dalam periode 1979 - 1990. Sedangkan peranannya terhadap total ekspor non-migas menunjukkan kecenderungan menurun. Bila pada tahun 1979 peranannya masih sebesar 4,02%, maka pada tahun 1990 turun menjadi 3,76%. Menurunnya peranan ekspor barang-barang tambang tersebut antara lain karena turunnya ekspor bauksit, biji timah, biji mangan dan batu granit. Namun demikian terdapat pula beberapa barang tambang yang eksportnya meningkat yaitu biji tembaga, biji nikel dan batu bara.

Melihat peranan ekspor non-migas yang akhir-akhir ini semakin menonjol dibanding migas. Tahun-tahun mendatang diharapkan semakin mampu sebagai motor penggerak dalam pelaksanaan pembangunan Indonesia yang berkesinambungan. Hal ini sejalan dengan tekad pemerintah yang mentargetkan bahwa pertumbuhan ekspor non-migas selama Repelita V adalah 15,6% per tahun. Sehingga pada akhir Pelita V nanti dapat mencapai nilai sebesar US.\$ 23,6 miliar. Untuk itu berbagai kendala yang akan merintang ekspor non-migas, hendaknya dapat diatasi.

Untuk mengetahui potensi daerah di seluruh wilayah Indonesia, maka perlu diketahui pula komposisi ekspor Indonesia berdasarkan daerah pelabuhan ekspor. Hal ini penting artinya untuk mengembangkan komoditas yang berasal dari daerah tersebut yang menjadi andalannya, sehingga mampu lebih kompetitif di pasaran internasional. Demikian pula penciptaan sarana-sarana dan kebijaksanaan yang berhubungan dengan kelancaran ekspor tersebut, dan juga dapat diketahui aktivitas pembangunan masing-masing wilayah di Indonesia .

Untuk mengetahui distribusi nilai ekspor menurut daerah pelabuhan muat yang penting di Indonesia, dapat dilihat pada tabel IV.II.3, yang dalam hal ini dibagi berdasarkan dimana pelabuhan-pelabuhan tersebut berada, yakni pelabuhan-pelabuhan yang berada di pulau Jawa dan Madura, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Jaya.

Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa daerah pelabuhan yang banyak mengirim barang-barang ekspor adalah pelabuhan-pelabuhan di daerah Sumatera, Jawa dan Madura, disusul dengan pelabuhan-pelabuhan di Kalimantan. Besar-nya nilai ekspor yang melalui pelabuhan-pelabuhan di daerah Sumatera rata-rata US.\$.11 milyar Jawa dan Madura rata-rata US.\$.4,5 milyar, Kalimantan rata-rata US.\$.4,2 milyar, sedangkan Maluku, Nusa Tenggara dan Irian Jaya rata-rata di bawah US.\$.1 milyar, serta Sulawesi rata-

Tabel IV.II.3
EKSPOR MENURUT DAERAH PELABUHAN
EKSPOR YANG PENTING
(DALAM US.\$ JUTA)

TAHUN	JAWA, MADURA	SUMA- TERA	KALI- MANTAN	SULA- WESI	MALUKU, NT, & IRJA	JUMLAH
1980	1.340	12.758	6.433	348	1.030	21.909
1981	4.224	13.348	6.288	280	1.024	25.164
1982	4.511	11.303	5.345	244	891	22.293
1983	3.836	11.775	4.578	251	706	21.146
1984	3.974	12.182	4.817	282	633	21.888
1985	3.370	10.039	4.223	338	617	18.587
1986	3.180	7.806	2.988	292	539	14.805
1987	4.076	8.783	3.216	398	663	17.136
1988	5.225	9.196	3.353	671	773	19.219
1989	6.840	9.926	3.748	683	962	22.159
1990	8.373	11.132	4.541	537	1.092	25.675

Sumber : Biro Pusat Statistik

rata di bawah US.\$ 0,5 milyar. Walaupun demikian kalau dilihat dari perkembangannya dari tahun 1980 sampai 1990, nampak bahwa pelabuhan-pelabuhan yang berasal di Pulau Jawa memperlihatkan perkembangan yang cukup dominan sebagai tempat pengiriman barang-barang ekspor, sekalipun pe-

labuhan-pelabuhan di Sumatera dan Kalimantan peranan yang lebih besar tapi perkembangannya tidak begitu besar, bahkan ada kecenderungan peranannya menurun dilihat dari prosentase nilai ekspor secara keseluruhan. Sedangkan pelabuhan di Sulawesi, Maluku dan Irian Jaya walaupun volume nilai ekapornya masih relatif kecil, tapi ada kecenderungan memperlihatkan peningkatan dari tahun ke tahun. Sehingga peranannya semakin meningkat.

Pesatnya perkembangan ekspor melalui pelabuhan-pelabuhan di Pulau Jawa, tidak terlepas dari Peranan yang dimainkan oleh Pelabuhan Tanjung Periook Jakarta dan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sebagai pusat pengiriman barang barang ekspor Indonesia yang memiliki pasilitas sangat memadai untuk menungjang kegiatan ekspor. Di lain pihak bahwa Industri-industri yang berorientasi ekspor masih kebanyakan berada di Pulau Jawa. Yang berarti bahwa Pulau Jawa dan sekitarnya masih merupakan pusat konsentrasi aktivitas ekonomi di Indonesia dan Indonesia bagian barat pada umumnya.

Ditinjau dari posisi dan pola perdagangan antara Indonesia dengan luar negeri, menurut kelompok-kelompok negara dan negara-negara mitra dagangnya, nampak bahwa bagian terbesar dari ekspor Indonesia masih tertuju pada negara-negara Industri, khususnya negara industri terkemuka seperti Amerika Serikat, Jepang dan MEE. Bila diperhatikan pada tabel IV.II.4, nampak bahwa Jepang merupakan

pembeli utama barang-barang ekspor Indonesia, kemudian diikuti oleh Amerika Serikat, ASEAN dan Negara-negara MEE.

Ekspor ke Jepang dalam tahun 1979 tercatat US\$.7.262 juta atau 47,2% dari seluruh ekspor Indonesia. Pada tahun 1986, saat ekspor Indonesia mencapai titi terendah dalam dekade 1980-an ekspor ke Jepang hanya mencapai US\$.6.644 juta atau 44,4%, atau menurun dibanding tahun 1979. Penurunan tersebut disebabkan antara lain menurunnya ekspor migas sebesar 43,01% dan non-migas sebesar 49,70%. Tahun-tahun terakhir ekspor ke Jepang menunjukkan trend yang terus meningkat, dan dalam tahun 1990 telah mencapai nilai US\$.10.924 juta, yang terdiri dari migas sebesar US\$.6.512 juta dan non-migas sebesar US\$.4.412 juta.

Sebagaimana ekspor ke Jepang, ekspor ke Amerika Serikat pun pada tahun 1979 cukup tinggi yaitu sebesar US\$.3.027 juta, yang terdiri dari ekspor migas sebesar US\$.2.154 juta dan non-migas sebesar US\$.873 juta. Tahun 1986 menurun dan hanya mencapai US\$.2.902 juta. Suatu penurunan sebesar 40,19% dari ekspor tahun 1981 yang nilainya sebesar US\$.4.852 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan ekspor migas dari US\$.3.519 juta pada tahun 1981 menjadi US\$.1.606 juta pada tahun 1986. Disisi lain ekspor non-migas pada periode yang sama juga turun dengan 2,38%. Untuk tahun-tahun selanjutnya ekspor ke Amerika Serikat tercatat adanya peningkatan. Pada tahun 1988 tercatat sebesar US\$.3.074 juta yang terdiri

1985	1986	1987	1988	1989	1990
594	6.644	7.393	8.018	9.321	10.924
040	2.902	3.349	3.074	3.497	3.365
113	1.340	1.541	2.152	2.338	3.028
392	453	493	646	681	723
255	334	361	456	493	750
191	197	212	349	384	517
152	152	175	221	234	276
123	204	300	480	546	762
382	1.515	1.703	2.079	2.429	2.516
77	82	94	184	220	253
81	83	87	151	234	189
8	108	71	87	149	161
62	1.239	1.449	1.153	1.818	1.902
	3	2	4	8	11
58	2.404	3.150	3.896	4.574	5.842
87	14.805	17.136	19.219	22.159	25.675

dari ekspor migas US\$.1.232 juta dan non-migas US\$.1.842 juta. Ini berarti untuk pertama kalinya ekspor non-migas ke Amerika Serikat melampaui ekspor migas. Sedangkan pada tahun 1990 ekspor Indonesia ke Amerika Serikat berjumlah US\$.3.365 juta, atau 8,76% lebih tinggi dari pada tahun 1988. Diantaranya ekspor non-migas sebesar US\$.2.142 juta dan ekspor migas sebesar US\$.1.223 juta.

Dalam periode 1979 - 1990 ekspor ke negara-negara Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) berkembang rata-rata sebesar 10,35% per tahun. Tidak seperti halnya ekspor ke Jepang dan Amerika Serikat yang menurun pada tahun 1986 dibandingkan dengan tahun 1981, ekspor ke negara-negara MEE justru kebalikannya, pada tahun 1986 mencapai nilai US\$.1.340 juta atau meningkat sebesar 26,05% dari tahun 1981 yang tercatat sebesar US\$.1.063 juta. Hal tersebut antara lain disebabkan tidak begitu terpengaruhnya ekspor ke MEE oleh menurunnya harga minyak bumi, karena sebagian besar adalah ekspor non-migas. Diantara negara-negara MEE, Belanda merupakan negara pengimpor barang-barang Indonesia yang paling besar, kemudian disusul oleh Jerman Barat, Inggris dan Italia. Ekspor Indonesia ke empat negara MEE tersebut dalam tahun 1990 mencapai US\$.2.266 juta atau 75% dari seluruh ekspor Indonesia ke negara MEE.

Ekspor Indonesia ke negara-negara ASEAN dalam tahun-tahun terakhir meningkat kembali setelah terjadi pe-

nurunan yang cukup tajam pada tahun 1986. Dalam tahun 1990 nilai ekspor Indonesia ke negara-negara ASEAN mencapai US\$.2.516 juta atau meningkat 66% dari tahun 1986 yang tercatat sebesar US\$.1.515 juta, namun masih lebih rendah dari nilai ekspor selama tahun 1982 yang mencapai US\$.3.499 juta.

Sebagian besar ekspor Indonesia ke negara-negara ASEAN adalah ke Singapura, dimana pada tahun 1990 persentasenya 76%, sedangkan sisanya adalah ke Malaysia, Muangthai, Philipina dan Brunai Darussalam.

Ekspor ke negara-negara Asia lainnya yang mencatat nilai cukup besar adalah ke Korea Selatan, Taiwan dan Hong Kong. Dalam tahun 1989, ekspor ke Korea Selatan mencapai US\$.922 juta yang terdiri dari migas sebesar US\$.486 juta dan non-migas sebesar US\$.436 juta. Dalam tahun yang sama ekspor ke Taiwan mencapai US\$.576 juta, terdiri dari migas sebesar US\$.196 juta dan non migas US\$.380 juta, sedangkan ke Hong Kong mencapai US\$.549 juta yang hampir seluruhnya (US\$.547 juta) adalah merupakan ekspor komoditi non-migas (data KPS).

Semakin besarnya peran ekspor non-migas terlihat dari prestasinya yang cukup menonjol selama tiga tahun terakhir. Data ekspor Indonesia tahun 1988 - 1990 memperlihatkan kontribusi sektor non-migas mencapai persentase diatas 60%, dimana peranan komoditas hasil industri mendominasi perolehan-perolehan ekspor non-migas.

Kenaikan yang cukup pesat dari ekspor non-migas tersebut, adalah merupakan hasil dari pelaksanaan kebijaksanaan pengembangan perdagangan luar negeri yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam tahun-tahun sebelumnya, khususnya mengenai kebijaksanaan ekspor. Kemudian pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan deregulasi lanjutan antara lain paket deregulasi Oktober 1986, kebijaksanaan Januari 1987 dan paket kebijaksanaan Desember 1987. Kebijaksanaan tentang keharusan meningkatkan mutu barang ekspor serta penyuluhan dan pengawasan mutu barang ekspor merupakan tindak lanjut guna menunjang kebijaksanaan di atas. Kecuali itu, upaya peningkatan ekspor dilaksanakan pula melalui diversifikasi barang ekspor dengan cara mendorong ekspor komoditi-komoditi baru yang potensial serta diversifikasi pasar.

Hasil dari kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut, terlihat dengan semakin meningkatnya ekspor barang-barang hasil industri. Di sisi lain, negara tujuan ekspor pun telah semakin meluas dan menyebar pula. Sebagai contoh, pada tahun 1984 ekspor non-migas ke Amerika Serikat mencapai US.\$1.214 juta atau 20,68% dari seluruh ekspor non-migas serta menduduki urutan pertama, yang diikuti oleh Singapura dan Jepang yang masing-masing mencapai US.\$1.146 juta dan US.\$1.103 juta. Mulai tahun 1987 posisinya telah bergeser ekspor ke Jepang menduduki urutan pertama dan mencapai US.\$1.912 juta atau sebesar 22% dari selu-

Tabel IV.II.5
 PERKEMBANGAN EKSPOR NON-MIGAS
 MENURUT NEGARA TUJUAN
 TAHUN 1984-1990 (US.\$ JUTA)

NEGARA TUJUAN	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
Jepang	1.103	1.059	1.253	1.912	2.645	3.509	3.756
Amerika Serikat	1.214	1.181	1.296	1.166	1.842	2.042	2.307
Ingapura	1.146	611	774	1.127	1.560	1.654	1.924
Belanda	308	392	450	479	643	680	692
Hong Kong	226	345	341	419	516	547	570
R C	8	84	116	343	470	338	342
German Barat	246	255	333	359	456	493	502
Inggris	143	147	197	212	339	384	412
orea Selatan	86	71	77	138	321	436	465
Taiwan	127	113	209	304	317	380	421
Italia	144	138	152	175	212	223	240
Belgia & Luxem.	32	45	90	109	177	173	192
Malaysia	70	76	68	87	173	220	276
Arab Saudi	95	80	99	93	170	184	189
Perancis	49	64	53	98	164	209	224
Thailand	71	70	81	85	147	231	301
Australia	75	52	57	86	131	176	182
Canada	46	46	59	94	101	108	110
Emirat Arab	0	79	44	31	87	117	121
Philipina	18	72	43	42	86	126	137
Lain-lain	600	889	746	726	980	1.250	1.073
Jumlah	5.879	5.869	6.528	8.580	11.537	13.480	14.436

Sumber : - Biro Pusat Statistik
 - Tinjauan Ekonomi BNI 1946 No.149

ruh ekspor non-migas pada tahun tersebut, yang kemudian diikuti oleh Amerika Serikat dan Singapura yang masing-masing mencapai US\$.1.661 juta dan US\$.1.127 juta. Dan pada tahun 1990 posisi tersebut masih tetap yakni Jepang sebesar US\$.3.756 juta, diikuti Amerika Serikat US\$.2.307 juta dan Singapura sebesar US\$.1.924 juta (lihat-tabel IV.II.5).

Seperti terlihat bahwa pasar Asia termasuk Jepang dan ASEAN merupakan pasar yang paling banyak membeli barang-barang ekspor dari Indonesia. Dalam tahun 1989, pasar Asia menyerap sebanyak 68,74% dan mencapai jumlah US\$.15.233 juta, dari nilai itu Jepang sendiri menyerap sebesar US\$.9.321 juta atau 42,06%, sedangkan Singapura menyerap 8,2% atau senilai US\$.1818 juta dari seluruh ekspor Indonesia.

Di sisi lain besarnya ekspor Indonesia ke Jepang dalam tahun 1989 baru mencapai sekitar 4.44% dari seluruh impor Jepang, sementara ekspor ke Singapura baru mencapai sekitar 3.66% dari total impor Singapura. Dengan demikian pasar Asia khususnya Jepang tampaknya masih tetap dominan untuk tujuan ekspor Indonesia dimasa yang akan datang.

Akan halnya Amerika Serikat yang merupakan negara pengimpor terbesar kedua setelah Jepang tampaknya juga menunjukkan kecenderungan yang sama sebagaimana Jepang, walau keseluruhan ekspor Indonesia masih sangat kecil

yakni baru mencapai sekitar 0,7% dari total impor Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat tetap membuka luas pasarannya bagi berbagai macam komoditi dari Indonesia.

Sementara itu ekspor ke negara-negara Masyarakat Ekonomi Eropa menunjukkan trend yang terus meningkat dalam periode 1984 - 1990 naik rata-rata sebesar 18,2% per tahun, dalam tahun-tahun mendatang nampaknya akan terus meningkat. Walaupun pembentukan pasar tunggal Eropa tahun 1992, bagi Indonesia tidak perlu khawatir, bahkan sebaliknya, dengan terbentuknya satu pasaran yang sangat luas, berarti merupakan kesempatan yang semakin besar bagi Indonesia untuk memasarkan barang-barang eksportnya.

Kecemerlangan ekspor non-migas tentu harus dipertahankan, mengingat perdagangan khususnya ekspor kini telah menjadi mesin pemacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berbagai kendala dan tantangan dalam usaha pengembangan ekspor non-migas baik di dalam maupun di luar negeri dengan memperhitungkan semua variabel yang dianggap signifikan untuk mempengaruhi peningkatan ekspor Indonesia harus sedini mungkin diidentifikasi dan diantisipasi agar laju pertumbuhan ekspor tidak terganggu.

Keberhasilan usaha meningkatkan ekspor Indonesia, akan banyak ditentukan oleh kemampuan pemerintah dan kalangan bisnis Indonesia sendiri. Terutama kecermatan pengamatan dan ketepatan dalam mengambil analisa serta kemampuan dalam mengambil langkah antisipasi yang tepat.

3. Perkembangan Impor Indonesia

Impor memegang peranan penting di dalam usaha mengembangkan perekonomian negara, khususnya di negara-negara berkembang. Impor dalam hal ini bahan baku dan barang modal, ada umumnya berasal dari negara maju, disamping karena negara-negara berkembang kekurangan barang modal, juga untuk mempercepat proses alih teknologi dari negara-negara maju, sehingga negara-negara berkembang akan mampu memacu pertumbuhan ekonominya ke tingkat kesejahteraan ekonomi yang lebih baik.

Kenaikan nilai impor keseluruhan yang terus menerus selama ini, dapat berkaitan erat dengan semakin besarnya kebutuhan akan impor bahan baku/penolong dan barang-barang modal sejalan dengan pelaksanaan tahap-tahap pembangunan. Disamping itu meskipun kenaikan pendapatan masyarakat telah mendorong kebutuhan akan impor barang konsumsi, namun dalam perkembangannya peranan impor ini semakin menunjukkan penurunan.

Secara keseluruhan perkembangan impor Indonesia sejak tahun 1978 - 1990, menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi baik nilai maupun volumenya. Hal ini dapat kita lihat pada tabel IV.III.1, di mana pada tabel tersebut digambarkan volume dan nilai impor Indonesia dari tahun 1978 sampai dengan tahun 1990.

Walaupun perkembangan impor berfluktuasi, namun pada dasarnya impor telah mengalami pertumbuhan yang cukup ting-

Tabel IV.III.1
 PERKEMBANGAN IMPOR INDONESIA
 1978 - 1990

TAHUN !	Volume ! (ribu ton)	Nilai ! ! (US\$.juta)	Kenaikan %	
			Volume !	Nilai
1978	13.348,6	6.690,4	-	-
1979	14.508,6	7.203,3	8,7	7,7
1980	19.008,7	10.834,4	31,0	50,4
1981	18.631,7	13.272,1	-2,0	22,5
1982	23.468,0	16.858,9	26,0	27,0
1983	26.362,7	16.351,8	12,3	-3,0
1984	23.751,2	13.882,1	-9,9	-15,1
1985	16.830,3	10.259,1	-29,1	-26,1
1986	19.250,2	10.718,4	14,4	4,5
1987	23.081,0	12.370,3	19,9	15,4
1988	21.517,8	13.248,5	-6,8	7,1
1989	25.820,4	16.359,6	20,1	24,6
1990	30.726,3	21.837,0	18,7	34,5

Sumber : Biro Pusat Statistik (BPS).

gi, dimana setiap tahunnya secara rata-rata volumenya me-
 ningkat 10,72% yaitu 13.348,6 ribu ton pada tahun 1978 men-
 jadi 30.726,3 ribu ton pada tahun 1990. Sementara nilainya
 meningkat rata-rata 18,5% setiap tahunnya, yaitu dari US.

,690,4 juta pada tahun 1978 menjadi US\$.21.837,0 juta tahun 1990.

Volume dan nilai impor Indonesia yang cukup tinggi jadi pada tahun 1983, dimana volume dan nilainya masing-masing sebesar 26.362 ribu ton dan US\$.16.351,8 juta. Hal dimungkinkan karena tahun 1982-1983 terjadi kenaikan sebesar 26,0% untuk volume dan 27,0% untuk nilai impor. Sementara itu perkembangan yang rendah terjadi pada tahun 1984-1985, dimana volume impor mengalami penurunan sebesar 11,1%, sementara nilainya menurun sebesar 26,1%. Setelah itu kembali memperlihatkan perkembangan terus, baik volume maupun nilainya sehingga pada tahun 1990 tercatat volume sebesar 30.726,3 ribu ton sedang nilainya US\$.21.837 juta.

Fluktuasi perkembangan impor selama kurung waktu 1978-1990 tersebut, tidak terlepas dari berbagai peristiwa dunia yang menandai jalannya perekonomian Indonesia yang menganut sistem perekonomian terbuka. Peristiwa tersebut misalnya, krisis ekonomi dunia, oil boom, devaluasi dll. Walaupun kenaikan impor pada dasarnya membebani devisa, namun Indonesia sebagai negara yang sedang membangun, masih harus memenuhi impor barang-barang yang belum sepenuhnya dapat dihasilkan di dalam negeri. Untuk mengurangi pengeluaran devisa, pemerintah mengambil suatu kebijaksanaan dengan memberikan pengawasan ketat terhadap jenis barang impor, misalnya hanya dengan mengimpor barang modal dan bahan baku/penolong

a barang-barang konsumsi yang belum dapat dihasilkan alam negeri.

Komposisi impor Indonesia dapat digolongkan ke dalam golongan yaitu terdiri dari; impor barang-barang konsumsi, impor bahan baku/penolong dan impor barang-barang modal. Penggambaran keadaan pertumbuhan masing-masing golongan tersebut, adalah penting artinya untuk mengetahui perkembangan ekonomi Indonesia selama ini. Dalam hal yang perlu diketahui adalah komposisi peranan masing-masing golongan impor terhadap total impor dari tahun ke-tahun tahap pelaksanaan pembangunan Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, golongan impor bahan baku/penolong telah mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi setiap tahunnya, kemudian disusul impor barang modal. Sedangkan impor barang konsumsi mengalami penurunan dari tahun ke-tahun baik nilainya maupun peranannya terhadap total impor. Akibat pesatnya laju pertumbuhan impor bahan baku/penolong, peranan golongan barang ini menjadi bertambah besar dari tahun ke-tahun. Dalam tahun 1978 impor bahan baku/penolong adalah US\$.4.508,4 juta, kemudian meningkat hingga mencapai US\$.14.893,1 juta pada tahun 1990. Dilihat dari peranannya sebesar 67% (1978) dan 68% (1990). Dalam tahun yang sama impor barang modal adalah sebesar US\$.1.034,8 juta (1978) dan US\$.6.067 juta (1990), dari segi peranannya adalah sebesar 15% (1978) dan 27% (1990). Sementara itu impor barang konsumsi sebesar US\$.1.147,2 juta

Tabel IV.III.2
 KOMPOSISI NILAI IMPOR MENURUT GOLONGAN EKONOMI
 1978 - 1990
 (US.\$..JUTA)

Tahun	Barang konsumsi	Bahan baku/ penolong	Barang modal	Total
1978	1.147,2	4.508,4	1.034,8	6.690,1
1979	1.116,2	4.952,3	1.133,8	7.202,3
1980	1.414,4	7.931,6	1.488,4	10.834,4
1981	807,1	10.445,8	2.019,2	13.272,1
1982	1.236,3	12.590,7	3.031,9	16.858,9
1983	1.726,2	11.732,0	2.893,6	16.351,8
1984	825,9	10.482,3	2.574,3	13.882,1
1985	280,5	8.162,7	1.718,7	10.261,9
1986	448,2	8.363,9	1.906,3	10.718,4
1987	460,6	9.474,2	2.435,5	12.370,3
1988	469,4	10.222,9	2.556,2	13.248,5
1989	688,6	11.905,5	3.765,5	16.359,6
1990	876,9	14.893,1	6.067,0	21.837,0

Sumber : Biro Pusat Statistik (BPS).

(1978), sedangkan pada tahun 1990 hanya sebesar US\$.876,9 juta, dilihat dari prosentasenya adalah 18% pada tahun 1978 menurun menjadi 4% pada tahun 1990 (lihat tabel IV.-III.2) di atas. Hal ini disebabkan karena kebijaksanaan pemerintah untuk memperluas impor jenis bahan baku/peno-

long dengan syarat pembayaran berjangka dan pencabutan ketetapan jumlah minimum setoran jaminan impor serta keringanan bea masuk dan PPN impor untuk impor barang-barang tertentu yang diperlukan oleh industri dalam negeri.

Sementara itu, impor barang-barang konsumsi yang semakin menurun peranannya terhadap total impor, disebabkan karena kebijaksanaan pemerintah dalam hal pengetatan impor barang-barang konsumsi yang selama ini diimpor, sekarang sudah mampu dihasilkan di dalam negeri dengan kualitas yang tidak kalah dari produksi-produksi negara lain.

Dari gambaran komposisi impor ini, dapat dikatakan bahwa Indonesia sejak dimulainya tahap-tahap pembangunan selama ini, masih sangat tergantung pada impor bahan baku/penolong. Namun demikian tetap berusaha mengadakan pembentukan modal dengan melalui pengadaan impor barang modal, dan berusaha meningkatkan industri yang memproses bahan baku menjadi barang jadi, untuk mengimbangi permintaan terhadap barang-barang konsumsi yang senantiasa meningkat setiap tahunnya. Industri seperti ini dikenal dengan industri substitusi impor.

Sementara itu untuk mengetahui aspek pemerataan distribusi barang-barang impor Indonesia ke seluruh wilayah Indonesia, maka perlu diketahui pula komposisi impor Indonesia berdasarkan daerah pelabuhan atau daerah mana barang-barang impor tersebut ditujukan. Hal ini penting artinya untuk mengetahui perkembangan dan kebutuhan masing-masing

wilayah akan barang impor tersebut. Karena dengan demikian dapat pula diketahui aktivitas pembangunan masing-masing wilayah di Indonesia

Untuk mengetahui distribusi nilai impor menurut daerah pelabuhan tujuan yang penting di Indonesia, dapat dilihat pada tabel IV.III.3, yang dalam hal ini dibagi berdasarkan daerah dimana pelabuhan-pelabuhan tersebut berada, yakni pelabuhan-pelabuhan yang berada di pulau Jawa, dan Madura, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Jaya.

Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa daerah pelabuhan yang banyak menerima barang-barang impor adalah pelabuhan-pelabuhan di daerah Jawa dan Madura, Sumatera, disusul dengan pelabuhan-pelabuhan di Kalimantan. Besarnya nilai impor yang melalui pelabuhan-pelabuhan di daerah Jawa dan Madura dari tahun 1980-1984 mengalami perkembangan yang cukup pesat, kemudian menurun dan pada tahun 1985 hanya sebesar US.\$7.495 juta, kemudian meningkat kembali sejalan dengan kebutuhan pembangunan yang masih sangat tergantung pada pengadaan impor bahan baku/penolong dan barang-barang modal. Dan pada tahun 1990 impor tersebut mencapai US.\$17.427 juta, secara rata-rata impor yang melalui pelabuhan-pelabuhan di Jawa dan Madura sebesar US.\$10.535 juta per tahun. Sedangkan impor yang melalui pelabuhan-pelabuhan di daerah Sumatera rata-rata US.\$2.558 juta, Kalimantan rata-rata US.\$669 juta sedangkan daerah

Tabel IV.III.3
 IMPOR MENURUT PELABUHAN-PELABUHAN PENTING
 1980 - 1990
 (US.\$.JUTA)

TAHUN	JAWA, MADURA	SUMA- TERA	KALI- MANTAN	SULA- WESI	MALUKU &IRJA	JUMLAH
1980	8.111	1.563	644	414	102	10.834
1981	9.817	2.105	860	366	124	13.272
1982	11.599	3.474	1.225	313	248	16.859
1983	10.771	3.346	828	827	580	16.352
1984	10.014	2.431	730	377	330	13.882
1985	7.495	1.921	491	220	132	10.259
1986	8.660	1.458	250	263	88	10.718
1987	9.481	2.301	376	164	49	12.370
1988	10.019	2.355	544	203	117	12.043
1989	12.496	2.950	590	206	118	16.360
1990	17.427	3.235	825	197	153	21.837

Sumber : Biro Pusat Statistik (BPS).

Sulawesi, Maluku dan Irian Jaya nilainya rata-rata masih di bawah 0,5 milyar dollar. Walaupun demikian kalau dilihat dari perkembangannya dari tahun 1980 sampai 1990, nampak bahwa pelabuhan-pelabuhan yang berada di Pulau Jawa dan Madura memperlihatkan perkembangan yang cukup dominan sebagai tempat tujuan barang-barang impor di Indonesia.

Hal lain yang tak kalah penting pula diketahui ialah distribusi impor menurut negara asal, hal ini penting artinya untuk mengetahui apakah telah terjadi penyebaran atau distribusi yang relatif merata dan seimbang diantara beberapa negara, atau telah terjadi pemusatan pada suatu negara atau sejumlah kecil negara. Dan juga untuk menafsirkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi pada perekonomian domestik, bila terjadi ketidakstabilan atau kegoncangan-kegoncangan perekonomian negara-negara tertentu sebagai akibat terjadinya pemusatan atau konsentrasi asal barang impor pada suatu negara atau sejumlah kecil negara.

Untuk melihat gambaran distribusi impor Indonesia menurut negara asal yang meliputi Jepang, Amerika Serikat, Asean, Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE), dan sejumlah negara lainnya, dapat dilihat pada tabel IV.III.4.

Dari tabel tersebut, impor dari Jepang menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahun. Pada tahun 1979 impor yang berasal dari Jepang sebesar US\$.2.103 juta dan pada tahun 1990 telah mencapai nilai US\$.5.300 juta, atau telah berkembang rata-rata 13% per tahun. Sedangkan impor yang berasal dari Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) pada tahun yang sama menunjukkan nilai US\$.1.074 juta dan US\$.4.061 juta, atau rata-rata meningkat 23% setiap tahunnya. Sementara itu impor yang berasal dari Amerika Serikat sebesar US\$.1.028 juta pada tahun 1979 dan berkembang menjadi US\$.2.520 juta pada tahun 1990. Dan impor yang be-

Tabel IV.III.4.
 IMPOR MENURUT NEGARA ASAL YANG UTAMA
 1979 - 1990
 (US\$.JUTA)

TAHUN !	N e g a r a A s a l B a r a n g !					Total
	Jepang !	U S A !	Asean !	M E E !	Lainnya !	
1979	2.103	1.028	839	1.074	2.158	7.203
1980	3.413	1.409	1.350	1.446	3.216	10.834
1981	3.989	1.795	1.702	2.200	3.586	13.272
1982	4.279	2.417	3.301	2.653	4.209	16.859
1983	3.793	2.534	3.915	2.231	3.879	16.352
1984	3.308	2.560	1.948	2.058	4.008	13.882
1985	2.644	1.721	962	1.706	3.225	10.259
1986	3.128	1.482	1.121	1.793	3.194	10.718
1987	3.596	1.415	1.244	2.352	3.763	12.370
1988	3.386	1.736	1.341	2.510	4.276	13.248
1989	3.767	2.218	1.766	2.575	6.033	16.359
1990	5.300	2.520	1.836	4.061	8.120	21.837

Sumber : Biro Pusat Statistik (BPS).

rasal dari Asean rata-rata US\$.1.777 juta setiap tahunnya. Dari gambaran tersebut diatas, nampak bahwa perdagangan impor Indonesia masih didominasi oleh negara-negara industri seperti Jepang, USA dan MEE, sehingga ketergantungan Indonesia kepada negara-negara tersebut cukup besar.

4.4. Perkembangan Penanaman Modal di Indonesia

Keadaan resesi ekonomi dunia yang telah berlangsung sejak tahun 1979 mengakibatkan makin terbatasnya sumber dana, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dalam rangka menghadapi masalah ini, pemerintah telah mengambil langkah-langkah kebijaksanaan yang mengarah kepada penghematan, termasuk pembatasan penyertaan modal Pemerintah dalam investasi baru. Oleh karena itu pengerahan dana dari sektor swasta, baik nasional maupun asing untuk kegiatan penanaman modal perlu lebih diutamakan dan digairahkan agar intensitas pembangunan nasional di bidang ekonomi tetap tinggi, sehingga momentum dan kelangsungan pembangunan tetap terpelihara.

Untuk mendorong arus penanaman modal, EKPM aktif menyelenggarakan komunikasi, promosi dan penerangan yang efektif bagi para penanam modal khususnya dan dunia usaha umumnya. Pendekatan kepada dunia usaha untuk mempromosikan penanaman modal antara lain kerja sama antara EKPM dengan KADIN dan melalui temu muka dengan pengusaha-pengusaha di daerah. Usaha promosi di luar negeri dan mengikut sertakan para pengusaha dalam pameran dagang di luar negeri, kunjungan misi investasi ke berbagai negara. Disamping itu diadakan pertemuan-pertemuan di dalam negeri dengan misi dari luar negeri, serta pembukaan kantor-kantor perwakilan EKPM di luar negeri, untuk memperlancar komunikasi dan mendorong masuknya modal dan teknologi yang diharapkan.

Dalam pelaksanaan penanaman modal dapat dilihat adanya peningkatan kemampuan nasional dalam pemupukan modal, penggunaan teknologi yang lebih tinggi, pembukaan pasaran luar negeri, peningkatan pendidikan dan keterampilan dan pengembangan sumber bahan baku dalam negeri.

Sesuai dengan asas pembangunan, khususnya asas kepercayaan pada diri sendiri, yang berarti melaksanakan pembangunan dengan makin melandaskan pada kemampuan sendiri, maka maka usaha-usaha ke arah itu nampak tercermin pada perkembangan penanaman modal selama sepuluh tahun terakhir ini, dimana jumlah PMDN melampaui PMA. Meskipun demikian penanaman modal asing masih perlu dimanfaatkan dengan diarahkan pada bidang-bidang usaha prioritas yang memerlukan modal besar dan teknologi tinggi, dimana belum cukup tersedia modal dalam negeri serta teknologi yang dikembangkan di dalam negeri.

Meskipun perkembangan ekonomi dunia selama sepuluh tahun terakhir sangat mempengaruhi perkembangan penanaman modal terutama penanaman modal asing. Namun dengan makin ditingkatkannya usaha promosi sejak beberapa tahun yang lalu, secara keseluruhan penanaman modal terus berkembang. Dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir dari tahun 1979-1990, penanaman modal dalam negeri menunjukkan perkembangan yang sangat menggembirakan yaitu dengan nilai investasi pada tahun 1979 sebesar Rp.688,6 milyar menjadi sebesar Rp.59.878,4 milyar pada tahun 1990. Demikian halnya-

Tabel IV.4.1
 PERKEMBANGAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA
 1979 - 1990
 (Dalam milyar rupiah)

TAHUN !	Penanaman Modal	Penanaman Modal	% Kenaikan	
	Dalam Negeri	Asing	PMDN !	PMA
1979	688,6	1.296,4	-	-
1980	1.503,6	554,5	118,4	-57,2
1981	2.866,2	600,9	90,6	8,4
1982	3.654,4	1.212,1	27,5	101,9
1983	7.041,8	2.461,7	92,7	103,1
1984	2.099,9	1.191,1	-70,2	-51,6
1985	3.749,7	971,3	78,6	-18,5
1986	4.416,7	1.367,7	17,8	40,8
1987	10.265,0	2.406,7	132,4	75,9
1988	14.915,9	7.538,6	45,2	213,3
1989	19.593,9	8.470,2	31,6	12,4
1990	59.878,4	16.581,3	205,3	95,5

Sumber : Biro Pusat Statistik

Penanaman Modal Asing, dalam jangka waktu yang sama sebesar Rp.1.296,4 milyar meningkat menjadi Rp.16.581,3 milyar. Selanjutnya situasi politik dan kebijaksanaan pembangunan ekonomi dalam negeri sering menciptakan iklim berusaha yang kurang menguntungkan para investor asing. Stabi-

as politik yang kurang mapan menyebabkan terlalu besar-
a resiko kehilangan modal yang telah ditanamkan dan re-
so untuk tidak memperoleh laba yang diharapkan. Kebijak-
naan ekonomi yang terlalu membatasi ruang gerak para in-
stor dan memberi peluang terlalu besarnya campur tangan
merintah dalam dunia usaha, juga akan menyebabkan ber-
rangnya aliran-aliran investasi. Demikian pula peraturan-
aturan dan perundang-undangan yang kurang/tidak memper-
hatikan pemberian insentif kepada para penanam modal atau
nvestor juga akan mempunyai dampak yang sama.

Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa investasi da-
am negeri dan investasi asing telah merosot dalam periode
1984 - 1986. Pada tahun sebelumnya (1983) jumlah investasi
dalam negeri sebesar Rp.7.041,8 milyar dan investasi asing
yang disetujui mencapai Rp.2.461,7 milyar, sebagai akibat
banyaknya para investor yang ingin memanfaatkan kesempatan
terakhir untuk memperoleh pembebasan pajak (tax holiday).
Mulai tahun 1984 penanaman modal dalam negeri merosot men-
jadi Rp.2.099,9 milyar dan penanaman modal asing turun se-
hingga mencapai Rp.1.191,1 milyar pada tahun yang sama.
Namun setelah setelah dikeluarkan berbagai paket kebijak-
sanaan deregulasi, seperti paket 6 Mei 1986 dan paket 24
Desember 1987, nampak bahwa jumlah penanaman modal dalam
negeri dan penanaman modal asing meningkat menjadi masing-
masing sebesar Rp.4.416,7 milyar dan Rp.1.367,7 milyar pa-
da tahun 1986. Kemudian pada tahun 1987 angka tersebut me-

jak menjadi Rp.10.265 milyar untuk penanaman modal dalam negeri dan Rp.2.406,7 milyar untuk penanaman modal asing, hal tersebut terus mengalami perkembangan yang cukup pesat hingga pada tahun 1990 mencapai nilai sebesar Rp.59.878,4 milyar untuk penanaman modal dalam negeri dan Rp.16.581,3 milyar untuk penanaman modal asing. lihat pada tabel IV.4.1.

Dilihat dari laju pertumbuhan setiap tahunnya nampak bahwa pertumbuhan penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing memperlihatkan laju pertumbuhan yang mengesankan sampai tahun 1983 yaitu rata-rata 82,2% untuk penanaman modal dalam negeri dan 71,3% bagi penanaman modal asing. Setelah itu perkembangannya agak lamban pada tahun 1984 - 1986, kemudian meningkat kembali dengan pesat atau rata-rata setiap tahunnya sebesar 86,2% untuk penanaman modal dalam negeri dan 87% bagi penanaman modal asing. Bahkan pada tahun 1990 penanaman modal berkembang sangat pesat yaitu sebesar Rp.59.878,4 milyar dibanding tahun 1989 yang hanya Rp.19.593 milyar, untuk penanaman modal dalam negeri, sementara penanaman modal asing juga meningkat sebesar 95,5% pada tahun yang sama. Hal tersebut tidak terlepas dari keberhasilan kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi yang dilancarkan oleh pemerintah dalam beberapa tahun terakhir, yang membuka peluang yang sangat besar bagi dunia usaha swasta untuk berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

Penanaman modal dapat pula di bagi menurut sektor ekonomi. Hal ini penting artinya untuk mengetahui apakah modal yang diinvestasikan selama ini hanya terpusat pada satu sektor atau tersebar pada beberapa sektor ekonomi.

Untuk mengetahui hal tersebut, dapat dilihat pada tabel IV.4.2 dan tabel IV.4.3. dimana telah digambarkan penyebaran penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) di berbagai sektor ekonomi.

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah investasi yang ditanamkan pada sektor pertanian melalui PMDN terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jika pada tahun 1979 jumlah proyek yang ditanam melalui sektor ini adalah baru 7 proyek dengan nilai 688,6 milyar rupiah, maka pada tahun 1990 jumlah proyeknya telah mencapai 146 dengan modal investasi sebesar Rp.8.810,9 milyar. Sedangkan investasi melalui PMA perkembangannya berfluktuasi, jika pada tahun 1979 jumlah proyeknya ada 5 dengan nilai investasi sebesar Rp.63,1 milyar, dan pada tahun 1984 hanya 1 proyek dengan nilai Rp.0,2 milyar, setelah itu menunjukkan perkembangan dan pada tahun 1990 proyeknya sebanyak 11 dengan nilai investasi sebesar Rp.363,1 milyar.

Investasi melalui sktor kehutanan menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi dari tahun-ketahun. Investasi yang cukup tinggi di sektor ini melalui PMDN terjadi pada tahun 1987 dengan jumlah proyek sebanyak 11 senilai Rp.640,1 milyar, dan pada tahun 1990 jumlah proyeknya meningkat menjadi

TELAH DISETUJUI

1)

Tahun	Konstruksi		H o t e l		Perkantoran/ Perumahan		Jasa-jasa lainnya		
	Proyek	Modal	Proyek	Modal	Proyek	Modal	Proyek	Modal	
1979	2	2	2,1	13	12,4	-	3,8	11	16,9
1980	2	1	1,5	-4	1,0	-	12,5	4	65,3
1981	1	2	15,1	5	52,6	-	-12,5	9	71,7
1982	2	5	16,2	11	70,2	-	70,9	15	41,7
1983	4	19	195,3	25	255,3	-	204,0	14	161,8
1984	1	3	67,1	14	214,1	7	49,6	8	29,6
1985	2	16	270,1	13	311,5	17	267,0	13	295,7
1986	3	4	74,4	6	17,0	9	168,5	21	325,3
1987	5	4	49,6	19	138,8	12	173,9	36	569,4
1988	8	4	31,4	32	537,0	21	811,2	52	494,7
1989	7	5	146,1	32	1.265,3	17	936,2	55	550,6
1990	12	5	86,5	88	4.661,7	36	2.101,3	94	2.614,4

1) Tela d
denga

Sumber B

Tahun	Kutansi		Jasa-jasa	
	Modal	Proyek	Modal	
1979	-	3	28,6	
1980	15,8	-	-	
1981	-	1	4,9	
1982	12,4	5	141,8	
1983	0,3	5	108,0	
1984	4,5	-	-	
1985	-	1	32,7	
1986	5,9	2	41,4	
1987	3,8	9	33,5	
1988	?	11	72,8	
1989		32	325,6	
1990	1.5	62	1.974,4	

1) T
b

Sumber

milyar. Selama ini selagi PMDN teran nilai Rp.32,9 inggi pada ta proyek. Setehanya sebesar nya sebesar PMA tercatat 1,6 milyar. Se-0 hanya penam- njukan per- lui PMDN mau- elalui PMDN lyar meningkat dengan nilai hun 1984 dan 36,5 milyar. yang cukup k yang menca- stasi melalui ada tahun 1979 ,4 milyar, me- 10.700,9 milyar

15 buah tapi nilainya hanya sebesar Rp.593,0 milyar. Sedangkan investasi asing PMA di sektor kehutanan ini selama periode 1979 - 1990 tidak ada.

Disektor pertambangan, investasi melalui PMDN tercatat pada tahun 1979 sebanyak 5 proyek dengan nilai Rp.32,9 milyar, meningkat hingga mencapai nilai tertinggi pada tahun 1983 sebesar Rp.578,1 milyar sebanyak 16 proyek. Setelah itu menurun pada tahun 1984 dengan nilai hanya sebesar 7,8 milyar rupiah. Dan pada tahun 1990 nilainya sebesar Rp.147,1 milyar. Sedangkan investasi melalui PMA tercatat pada tahun 1981-1983 sebanyak 7 proyek Rp.201,6 milyar. Setelah itu tidak ada lagi, dan pada tahun 1990 hanya penambahan modal sebesar Rp.218,9 milyar.

Investasi di sektor perindustrian menunjukkan perkembangan yang sangat mengesankan baik melalui PMDN maupun melalui PMA. Pada tahun 1979 investasi melalui PMDN sebanyak 174 proyek dengan nilai Rp.502,3 milyar meningkat terus hingga tahun 1983 sebanyak 254 proyek dengan nilai Rp.4.812,7 milyar. Setelah itu turun pada tahun 1984 dan hanya sebanyak 98 proyek dengan nilai Rp.1.436,5 milyar. Kemudian kembali memperlihatkan perkembangan yang cukup pesat dan pada tahun 1990 sebanyak 866 proyek yang mencapai nilai Rp.40.863,5 milyar. Sedangkan investasi melalui PMA juga mengalami keadaan yang sama, yang pada tahun 1979 hanya sebanyak 13 proyek dengan nilai Rp.958,4 milyar, meningkat sebanyak 380 proyek dengan nilai Rp.10.700,9 milyar

pada tahun 1990.

Di bidang konstruksi investasi melalui PMDN menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi, dan menunjukkan angka tertinggi pada tahun 1983, yaitu sebanyak 19 proyek dengan nilai 195,3 milyar rupiah. Sementara itu investasi melalui PMA pada tahun 1979 hanya 1 proyek dengan nilai 0,3 milyar rupiah setelah itu menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi, dan pada tahun 1990 tercatat sebanyak 5 proyek dengan nilai sebesar Rp.145,5 milyar.

Investasi melalui PMDN di bidang perhotelan pada tahun 1979 sebanyak 13 proyek dengan nilai Rp.12,4 milyar, meningkat terus hingga tahun 1985, kemudian turun pada tahun 1986 setelah itu berkembang dengan pesat, dan pada tahun 1990 sebanyak 88 proyek dengan nilai Rp.4.661,7 milyar. Sedangkan investasi melalui PMA memperlihatkan perkembangan sejak tahun 1987, dan pada tahun 1990 sebanyak 20 proyek dengan nilai Rp.1.656,8 milyar.

Perkembangan yang sangat menggembirakan juga terjadi pada bidang perumahan, komunikasi dan jasa-jasa. Walaupun perkembangan di bidang-bidang tersebut baru nampak pada lima tahun terakhir, jumlah investasi di bidang perumahan melalui PMDN pada tahun 1984 sebanyak 7 proyek dengan nilai Rp.49,5 milyar, dan pada tahun 1990 sudah mencapai nilai sebesar Rp.2.101,3 milyar, sedangkan di bidang jasa-jasa pada tahun 1990 telah mencapai nilai Rp.2.614,4 milyar, se-

mentara itu di bidang Komunikasi investasi melalui PMA pada tahun 1990 telah mencapai nilai Rp.1.521,7 milyar dengan jumlah proyek sebanyak 7 buah, dan di bidang jasa-jasa pada tahun 1985 baru satu proyek dengan nilai Rp.32,7 milyar, menjadi 62 proyek dengan nilai Rp.1.974,4 milyar pada tahun 1990.

Dari gambaran tersebut diatas, maka nampak bahwa sektor yang paling cepat mengalami kenaikan adalah sektor perindustrian. Sektor ini mengalami pertumbuhan setiap tahunnya rata-rata sebesar 40%. Pertumbuhan yang pesat tersebut disebabkan karena adanya keinginan pemerintah untuk memajukan sektor industri sebagai tulang punggung perekonomian, yang ditunjang oleh sektor-sektor lainnya. Bahkan sering pula dikatakan bahwa ukuran maju tidaknya sebuah pembangunan ekonomi diukur dari berapa besar sumbangan sektor industri terhadap produk domestik brutonya.

Dilihat dari negara asal Penanaman Modal Asing (PMA), hal ini berguna untuk mengetahui apakah penanaman modal asing di Indonesia telah terjadi distribusi yang relatif seimbang di antara beberapa negara atau telah terjadi konsentrasi atau pemusatan pada suatu negara atau sejumlah kecil negara tertentu.

Dengan demikian, apabila terjadi ketidakstabilan dan kegoncangan-kegoncangan perekonomian negara-negara tertentu, sebagai akibat terjadinya pemusatan penanaman modal asing di Indonesia pada negara tertentu, maka akan dapat ditaf-

sirkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi atau dampak yang ditimbulkan pada perekonomian domestik.

Untuk itu gambaran mengenai negara asal penanaman modal asing di Indonesia dapat dilihat pada tabel IV.4.4, dimana telah dibagi menjadi empat golongan besar negara yang meliputi Amerika, Asia, Eropah dan Australia.

Berdasarkan tabel tersebut, pada periode 1979 - 1990, Penanaman Modal Asing yang berasal dari Amerika seperti, U.S.A. dan Kanada tercatat sebanyak 50 proyek dengan nilai sebesar US\$.1.030,1 juta, dimana pada tahun 1984 tercatat hanya 2 proyek dengan nilai 105,1 juta dollar, dan pada tahun 1990 terjadi peningkatan hingga mencapai 22 proyek dengan nilai US\$.253 juta, walaupun nilainya lebih rendah dibandingkan tahun 1988 yang sebesar US\$.604,2 juta. Penurunan ini terjadi karena adanya proyek-proyek yang beralih status dari PMA menjadi PMDN.

PMA yang berasal dari Eropah pada periode yang sama mengalami perkembangan yang cepat, jika pada tahun 1984 jumlah proyek tercatat 7 buah dengan nilai investasi sebesar US.155,6 juta maka pada tahun 1990 nilai tersebut melonjak menjadi 39 proyek dengan nilai investasi sebesar US\$.1.507,9 juta. Dan secara keseluruhan nilai investasi selama periode 1979-1990 adalah sebesar US\$.4.950,4 juta dengan jumlah proyek sebanyak 136 buah.

Sementara itu PMA yang berasal dari Asia, seperti dari Jepang, Korea Selatan, Taiwan dan Singa-

G TELAH DISETUJUI
SAL

Tahun	K	Australia		Gab. Negara	
		Proyek	Modal	Proyek	Modal
1979	5	- 3	6,4	- 1	355,6
1980	5	1	1,8	3	334,9
1981	9	-	-	-	207,2
1982	3	-	-	- 4	- 22,3
1983	7	-	-	- 3	-209,1
1984	5	-	2,7	- 1	6,3
1985	2	- 1	- 24,8	-22	40,3
1986	8	- 1	- 7,1	2	- 2,4
1987	1	- 1	21,0	2	55,0
1988	2	7	360,0	3	257,3
1989	5	13	157,2	10	2.552,7
1990	6	11	197,3	23	2.370,1
JUMLAH	5	26	714,5	13	5.950,3

1) Telah dikur
dan beralih

Sumber : Bulet
Badan

pura, menunjukkan perkembangan yang cukup pesat pada lima tahun terakhir. Dimana pada tahun 1986 tercatat hanya dua proyek dengan nilai sebesar US.\$413,8 juta, maka pada tahun 1990 berkembang menjadi US.\$5.480,6 juta dengan jumlah proyek sebanyak 324 buah. Secara keseluruhan besarnya investasi yang berasal dari Asia selama periode 1979-1990 adalah sebanyak 625 proyek dengan nilai investasi sebesar US.\$12.190,3 juta.

Sedangkan PMA yang berasal dari Australia, perkembangannya baru terlihat pada tahun 1988, dimana pada tahun tersebut investasinya sebesar US.\$360 juta dengan jumlah proyek 7 buah, dan pada tahun 1990 terdapat penambahan sebanyak 11 proyek dengan nilai US.\$197,3 juta. Dan secara keseluruhan jumlahnya mencapai US.\$714,5 juta dengan jumlah proyek 26 buah selama periode 1979-1990. Adapun dari negara-negara lain selama periode yang sama juga terdapat peningkatan, dan secara keseluruhan tercatat 13 proyek dengan nilai US.\$5.950,3 juta.

Dari gambaran tersebut diatas, nampak bahwa PMA yang berasal dari Asia, khususnya dari Jepang, HongKong, Taiwan, Singapura dll. masih mendominasi PMA di Indonesia, kemudian disusul oleh Eropah seperti Belanda, Jerman, Inggris dll. Kemudian Amerika seperti U.S.A. dan Kanada. Yang berarti bahwa PMA masih terpusat pada beberapa negara tertentu sehingga ketergantungan perekonomian Indonesia pada negara tersebut masih cukup besar, misalnya negara-negara di Asia.

4.5. Hasil Pengujian Empirik

Dalam sub bab ini akan dikemukakan pembahasan tentang pengujian hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya pada bab I. Dengan menggunakan data deret waktu (time series) selama periode tahun 1979 - 1990, tentang ekspor migas, ekspor non-migas, impor bahan baku, impor barang modal, penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, yang masing-masing sebagai variabel bebas, dan Produk Domestik Bruto, Impor, Penanaman Modal (investasi), yang merupakan variabel terikat, maka hasil perhitungan analisa regresi berganda yang dilakukan dengan menggunakan komputer adalah sebagai berikut :

$$Y = 2,7016 + 0,0667 \ln X_{mi} + 0,0618 \ln X_{nm} +$$

(2,523) (4,030)

$$0,6605 \ln Y_{-1}$$

(7,798)

$$R = 0,9944 \quad R^2 = 0,9980 \quad F = 650,895 \quad DW = 1,7962$$

Angka dalam kurung menunjukkan statistik uji-t
 Sesuai hipotesis pertama yang telah dikemukakan,
 bahwa ekspor diduga mempunyai pengaruh yang kuat dalam
 peningkatan Produk Domestik Bruto, yaitu melalui ekspor
 migas dan non-migas, maka persamaan regresi di atas me-
 nunjukkan bahwa dalam periode tahun 1979 - 1990, koefisien
 regresi ekspor migas dan ekspor non-migas serta produk do-
 mestik bruto tahun sebelumnya memperlihatkan tanda positif,
 hal ini didukung pula hasil uji-t keseluruhan variabel yang

menunjukkan angka yang lebih besar dari t-tabel, pada tingkat signifikansi 5% dan 10% dengan derajat bebas (db = 8).

Hasil pengujian menunjukkan bahwa tingkat signifikansi ekspor migas, ekspor non-migas dan produk domestik bruto tahun sebelumnya sangat berarti terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai t-hitung masing-masing sebesar 2,523, 4,030 dan 7,798, dimana $t\text{-hit} > t\text{-tabel}$. Hal ini membuktikan bahwa kenaikan pada ekspor migas dan ekspor non-migas dapat mendorong peningkatan Produk Domestik Bruto. Bila terjadi kenaikan 1 persen pada ekspor migas, maka akan mengakibatkan terjadinya kenaikan pada Produk Domestik Bruto sebesar 0,0667 persen, dan kenaikan 1 persen pada ekspor non-migas akan mengakibatkan terjadinya pula kenaikan pada Produk Domestik Bruto sebesar 0,0618 persen.

Cara lain yang dapat menunjukkan keadaan hubungan antara ekspor migas dan ekspor non-migas dengan Produk Domestik Bruto, adalah dengan menggunakan koefisien korelasi dan determinasi. Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa angka koefisien korelasi (R) dan koefisien determinasi (R^2) masing-masing sebesar 0,9944 dan 0,9980. Angka-angka ini menunjukkan bahwa variabel ekspor migas, ekspor non-migas dan PDB. tahun sebelumnya mempunyai hubungan yang sangat erat dengan perkembangan Produk Domestik Bruto. Angka koefisien korelasi (R) sebesar 0,9944 menunjukkan eratnya variabel-variabel bebas (X_{mi} , X_{nm} , Y_{-1}) terhadap variabel

terikat (Y) selama periode tahun 1979 - 1990. Begitu pula angka koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,9980 menunjukkan bahwa 99 persen ekspor migas, ekspor non-migas dan PDB. tahun sebelumnya memberikan pengaruh terhadap perkembangan Produk Domestik Bruto Indonesia selama masa pengamatan, dan hanya sekitar 1 persen ditentukan oleh faktor lain diluar model yang digunakan.

Pengujian terhadap keseluruhan variabel bebas terhadap variabel terikat, ternyata hasil pengujian memberikan F hitung yang cukup besar dari F tabel, yaitu sebesar - 650,895, angka ini pada level of significant 1 dan 5 persen adalah sangat nyata. Hal itu berarti variabel bebas secara keseluruhan yang dipergunakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat, dengan demikian model persamaan regresi yang digunakan di dalam pembahasan ini dianggap sesuai.

Selanjutnya, untuk mengetahui apakah ada data yang digunakan terjadi otokorelasi atau tidak, maka dilakukan uji-DW. Hasil pengujian terhadap data yang digunakan diperoleh hasil DW test sebesar 1,7962. Nilai ini berada pada daerah dimana tidak terjadi otokorelasi pada data yang digunakan.

Demikian pula bilamana kita lihat pengaruh ekspor terhadap perkembangan impor sebagaimana yang ditunjukkan oleh hasil perhitungan analisa regresi seperti yang nampak dalam persamaan berikut :

$$M = -3,6350 + 0,7476 \ln X_{mi} + 0,2979 \ln X_{nm} + 0,3614 \ln M^{-1}$$

(2,398) (2,368)
(1,661)

$$R = 0,9410 \quad R^2 = 0,9783 \quad F = 59,502 \quad DW = 1,6829$$

Hasil pengujian menunjukkan bahwa tingkat signifikansi ekspor migas dan ekspor non-migas sangat berarti terhadap perkembangan impor, sebagaimana yang ditunjukkan oleh nilai t-hitung yang lebih besar dari t pada tabel, dimana nilainya masing-masing adalah 2,398 dan 2,368 dibandingkan t-tabel pada tingkat signifikansi 5% dan 10% (1,397 dan 1,860 db = 8). Hal ini membuktikan bahwa kenaikan pada ekspor akan dapat mendorong pertumbuhan impor, khususnya impor bahan baku dan barang modal yang sangat dibutuhkan oleh industri dan perkembangan investasi di dalam negeri. Bilamana terjadi kenaikan sebesar 1 persen pada ekspor migas, hal ini akan menyebabkan impor naik sebesar 0,7476 persen, demikian pula bila terjadi kenaikan pada ekspor non-migas sebesar 1 persen juga akan mengakibatkan kenaikan impor sebesar 0,2979 persen.

Sedangkan untuk melihat keeratan hubungan antara variabel devendent dengan variabel indeventent, hasil pengujian (R^2) cukup memuaskan, hal tersebut ditandai dengan persentase nilai yang cukup tinggi yaitu 0,9783 (97%), atau secara rata-rata seluruh perubahan pada variabel terikat dapat diterangkan oleh variabel bebasnya sebesar 97 %.

sedangkan selebihnya sebesar 3% ditentukan oleh faktor lain di luar model yang dipergunakan.

Pengujian terhadap keseluruhan variabel bebas terhadap variabel terikat, dimana hasil pengujian memberikan F hitung yang cukup besar dari pada F tabel, hal itu berarti variabel bebas secara keseluruhan yang dipergunakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Selanjutnya untuk mendeteksi ada tidaknya otokorelasi yang terjadi, maka dilakukan uji DW. Hasil pengujian terhadap data yang digunakan diperoleh hasil sebesar 1,6829 nilai tersebut berada pada daerah dimana tidak terjadi otokorelasi pada data-data yang digunakan.

Sedangkan untuk membuktikan hipotesis kedua, yaitu bahwa impor dalam hal ini bahan baku dan barang modal di duga memberikan tingkat signifikansi terhadap perkembangan penanaman modal, maka hasil perhitungan analisis regresi berganda untuk itu menunjukkan sebagai berikut :

$$I = 2,5813 + 1,3733 \ln M_{bb} + 2,7323 \ln M_{bm} +$$

(1,221) (2,650)

$$(-0,2838) \ln I^{-1}$$

(0,668)

$$R = 0,8743 \quad R^2 = 0,9532 \quad F = 26,497 \quad DW = 2,0655$$

Sesuai dengan hipotesis yang telah dikemukakan, persamaan regresi diatas menunjukkan bahwa dalam periode tahun 1979 sampai tahun 1990, koefisien impor bahan baku dan barang modal memperlihatkan tanda positif, sesuai yang di-

harapkan dengan nilai yang cukup besar. Hal ini didukung pula hasil uji t yang menunjukkan angka yang lebih besar dari t tabel pada tingkat signifikansi 10% dengan derajat bebas ($db = 8$).

Hasil pengujian menunjukkan bahwa tingkat signifikansi impor barang modal cukup tinggi terhadap perkembangan penanaman modal, demikian pula impor bahan baku. Memberikan indikasi bahwa impor bahan baku dan impor barang modal telah berfungsi sebagai pemacu pertumbuhan penanaman modal di Indonesia selama periode yang diamati.

Pengaruh yang cukup besar tersebut dimungkinkan karena data menunjukkan bahwa impor bahan baku/penolong dan impor barang modal telah mengalami peningkatan yang cukup pesat dari tahun ke tahun selama periode yang diamati. Peningkatan impor bahan baku/penolong dan impor barang modal menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kebutuhan akan barang-barang impor tersebut dalam memenuhi permintaan dalam negeri sejalan dengan semakin meningkatnya proses industrialisasi, dan juga adanya kebijaksanaan pemerintah untuk memperluas jenis impor bahan baku/penolong dengan syarat pembayaran berjangka dan pencabutan ketentuan jumlah minimum setoran jaminan impor serta keringanan bea masuk dan PPN impor untuk impor barang-barang tertentu yang diperlukan oleh industri dalam negeri.

Tingkat signifikansi yang diperlihatkan pada impor bahan baku dan barang modal terhadap perkembangan penana-

man modal, menunjukkan bahwa apabila terjadi kenaikan pada impor bahan baku/penolong sebesar 1 persen, akan menyebabkan penanaman modal mengalami kenaikan 1,3733 persen, dan bila terjadi kenaikan 1 persen pada impor barang modal maka penanaman modal akan meningkat sebesar 2,7323 persen. Dengan demikian, perkembangan impor berkaitan erat dengan laju pertumbuhan kegiatan produksi di dalam negeri.

Sedangkan untuk melihat keeratan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, hasil pengujian (R^2) menunjukkan nilai 0,9532 atau 95 persen secara rata-rata seluruh perubahan pada variabel terikat dapat diterangkan oleh variabel bebasnya, sedangkan selebihnya sebesar 5 % ditentukan oleh faktor lain di luar model yang digunakan.

Pengujian terhadap keseluruhan variabel bebas terhadap variabel terikat, memberikan hasil F hitung yang cukup besar dari pada F tabel, yaitu sebesar 26,497. Hal itu berarti variabel bebas secara keseluruhan yang dipergunakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Selanjutnya, untuk mengetahui apakah ada data yang digunakan terjadi otokorelasi atau tidak, maka dilakukan uji-DW, hasil pengujian memberikan nilai yang cukup baik yaitu sebesar 2,0655 yang berada pada daerah dimana tidak terjadi otokorelasi.

Sedangkan untuk membuktikan hipotesis ketiga, dimana diharapkan bahwa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing memberikan tingkat signifikansi terhadap

perkembangan produk domestik bruto, ternyata hasil perhitungan analisis regresi berganda yang dilakukan menunjukkan hal sebagai berikut:

$$Y = 0,6911 + 0,0032 \ln I_{dn} + 0,0058 \ln I_{as} + 0,9374 \ln Y_{-1}$$

(0,175)
(0,409)

(9,427)

$$R = 0,9837 \quad R^2 = 0,9941 \quad F = 222,417 \quad DW = 2,0920$$

Hasil pengujian variabel bebas terhadap variabel terikat, ternyata memberikan koefisien positif sesuai dengan yang diharapkan. Dalam upaya untuk melihat tingkat signifikansi variabel bebas terhadap variabel terikat secara individu, maka dilakukan uji-t, hasil pengujian perkembangan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing ternyata tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan Produk Domestik Bruto, hal mana ditandai oleh nilai t hitung yang kecil yaitu 0,175 dan 0,409. Walaupun koefisien regresi menunjukkan angka positif, yang berarti kenaikan pada penanaman modal dalam negeri dan asing dapat meningkatkan produk domestik bruto, namun pengaruhnya sangat kecil yaitu hanya sebesar 0,0032 dan 0,0058. Akan tetapi bila dilihat PDB. tahun sebelumnya ternyata memberikan tingkat signifikansi yang sangat kuat terhadap PDB tahun berjalan hal mana diperlihatkan oleh nilai t hitung yang cukup besar yaitu 9,427.

Rendahnya tingkat signifikansi penanaman modal ter-

hadap pertumbuhan produk domestik bruto selama periode tahun 1979 - 1990, adalah sebagai akibat resesi ekonomi dunia yang terjadi selama tahun 1980-an, dimana para investor banyak yang tidak berani melakukan penanaman modal, disamping karena tingginya (ICOR) yang menyebabkan kurang efisiennya penanaman modal, juga daya beli dan permintaan masyarakat menurun. Dan baru pada tiga tahun terakhir perkembangan penanaman modal kembali menunjukkan peranannya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Akan tetapi apabila dilihat koefisien korelasi (R) dan koefisien determinasi (R^2) hasil perhitungan menunjukkan hasil masing-masing sebesar 0,9837 dan 0,9941. Angka-angka ini menunjukkan bahwa variabel penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing mempunyai hubungan yang sangat erat dengan produk domestik bruto. Angka koefisien korelasi (R) sebesar 0,9837 menunjukkan eratnya variabel-variabel bebas (I_{dn} , I_{as} , Y_{-1}) terhadap variabel terikat (Y) selama periode 1979 - 1990. Begitu pula angka koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,9941, menunjukkan bahwa 99 persen seluruh perubahan yang terjadi pada variabel terikat dapat diterangkan oleh variabel bebasnya, sedangkan selebihnya ditentukan oleh faktor lain di luar model.

Pengujian terhadap keseluruhan variabel bebas terhadap variabel terikat, memberikan hasil F hitung yang cukup besar dari pada F tabel, yaitu sebesar 222,417 angka ini pada level of significant 1 & 5 persen adalah sangat

nyata, yang berarti variabel bebas secara keseluruhan yang dipergunakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Dengan demikian, model persamaan regresi yang digunakan dalam pembahasan ini dianggap cukup bagus.

Selanjutnya untuk mendeteksi ada tidaknya otokorelasi pada data yang digunakan, maka dilakukan uji-DW, hasil pengujian memberikan nilai yang cukup baik yaitu sebesar 2,0920, nilai ini berada pada daerah dimana tidak terjadi otokorelasi.

Walaupun dalam periode pengamatan menunjukkan bahwa perkembangan penanaman modal belum memperlihatkan pengaruh yang kuat terhadap perkembangan produk domestik bruto, Namun keberadaan penanaman modal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri semakin dituntut peranannya untuk menjamin tingkat pertumbuhan PDB. baik dimasa kini maupun dimasa yang akan datang. Peningkatan penanaman modal di berbagai sektor ekonomi merupakan syarat yang harus dilakukan bilamana perekonomian tersebut diharapkan akan berkembang, sebab peningkatan penanaman modal akan menyebabkan produk nasional akan meningkat, tersedianya lapangan pekerjaan yang lebih luas, sehingga pendapatan masyarakat meningkat, dengan demikian perekonomian juga akan semakin meningkat.

BAB V
P E N U T U P

5.1. Kesimpulan

Pada bab I bagian 1.3, telah dikemukakan bahwa tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk (1) melihat hubungan antara ekspor, dalam hal ini ekspor migas dan ekspor non-migas dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. (2) mengetahui sejauh mana ekspor mempengaruhi impor, demikian pula pengaruh impor terhadap perkembangan investasi (penanaman modal). (3) melihat tingkat signifikansi antara penanaman modal, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), dengan perkembangan Produk Domestik Bruto.

Berdasarkan analisa studi ini dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- (1). Pada dasarnya terdapat beberapa faktor intern dan ekstern yang sangat mempengaruhi peningkatan ekspor Indonesia. Yakni, dinamika ekonomi dan perdagangan dunia, terutama mitra dagang dan negara-negara yang mempunyai pengaruh besar terhadap perdagangan dunia, dan terbukanya akses ke pasar negara-negara tersebut (Amerika Serikat, Jepang, MEE). Dan iklim usaha yang baik, yang memungkinkan dunia usaha tumbuh dan berkembang secara wajar menurut perinsip-perinsip ekonomi rasional. Serta perilaku dan kemampuan dunia usaha dalam kompetisi merebut pasar di luar negeri.

- (2). Sungguhpun pada beberapa tahun belakangan ini perdagangan luar negeri Indonesia menghadapi berbagai masalah dan hambatan, seperti ketidak stabilan harga komoditi primer, fluktuasi kurs mata uang asing khususnya berupa kemerosotan nilai tukar dollar AS, meningkatnya tindakan restriktif dan proteksionisme dalam perdagangan, dan sebagainya. Tetapi rupanya ekspor non-migas Indonesia menunjukkan kecenderungan peningkatan yang cukup berarti. Namun demikian jika ditinjau dari pola arah perdagangannya, ternyata bahwa perdagangan Indonesia jauh lebih banyak tergantung atau didominasi oleh perdagangannya dengan negara-negara industri, khususnya dengan Amerika Serikat, Jepang dan Masyarakat Ekonomi Eropa. Dan bahkan ketergantungan perdagangan Indonesia dengan negara-negara industri itu dilihat dari persentase bagiannya terhadap total ekspor dan impor Indonesia, ternyata cenderung semakin meningkat.
- (3). Hasil pengujian empirik perkembangan ekspor, baik ekspor migas maupun ekspor non-migas memberikan pengaruh yang kuat bagi perkembangan Produk Domestik Bruto dan Impor, khususnya impor bahan baku dan barang modal selama periode 1979 - 1990.
- (4). Hasil pengujian empirik perkembangan impor, baik impor bahan baku maupun impor barang modal, memberikan pengaruh yang sangat kuat bagi perkembangan penanaman

- modal selama periode 1979 - 1990.
- (5). Hasil pengujian empirik perkembangan penanaman modal, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), kurang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan Produk Domestik Bruto, selama periode 1979 - 1990. Hal itu ditandai oleh hasil perhitungan analisa regresi yang memperlihatkan koefisien regresi dan t hitung yang sangat kecil. Akan tetapi bila dilihat dari koefisien determinasi (R^2) dan F hitung yang memperlihatkan angka cukup besar, maka dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat memberikan pengaruh yang sangat signifikan selama periode pengamatan.
- (6). Keseluruhan hasil regresi berganda yang digunakan, dapat dikemukakan bahwa variabel-variabel bebas yaitu ekspor migas, ekspor non-migas, impor bahan baku, impor barang modal, penanaman modal asing, dan penanaman modal dalam negeri, mempunyai tingkat signifikan yang erat terhadap variabel terikat yaitu produk domestik bruto, impor dan investasi. Hal ini dapat dilihat dari pengujian serempak lewat uji "F", yang masing-masing regresi menunjukkan angka yang besar.
- (7). Tingginya tingkat signifikansi impor bahan baku dan impor barang modal terhadap perkembangan penanaman modal (investasi), dimungkinkan karena impor bahan

baku dan impor barang modal telah mengalami peningkatan yang cukup pesat dari tahun ke tahun selama periode yang diamati. Peningkatan impor bahan baku dan barang modal menunjukkan semakin meningkatnya kebutuhan barang-barang impor tersebut sejalan dengan semakin meningkatnya proses industrialisasi. Dan juga adanya kebijaksanaan pemerintah untuk memperluas impor jenis bahan baku dengan syarat pembayaran berjangka dan pencabutan ketentuan jumlah minimum setoran jaminan impor serta keringanan bea masuk dan PPN impor untuk impor barang-barang tertentu yang diperlukan oleh industri dalam negeri.

- (8). Rendahnya tingkat signifikansi penanaman modal terhadap produk domestik bruto selama periode tahun 1979 - 1990, adalah akibat resesi ekonomi dunia yang terjadi selama tahun 1980-an, dimana para investor banyak yang tidak berani melakukan penanaman modal, disamping karena tingginya (ICOR) yang menyebabkan kurang efisiennya penanaman modal, juga daya beli dan permintaan masyarakat menurun. Yang tak kalah penting pula adalah kebijaksanaan devaluasi yang sering ditempuh pemerintah, sehingga menyebabkan para investor asing kurang berminat menanam modalnya di Indonesia, karena adanya kemungkinan resiko tidak memperoleh laba atau resiko kehilangan modal yang telah ditanamkan.

5.2. Saran-Saran

Saran-saran yang dapat dikemukakan dalam studi ini adalah sebagai berikut :

- (1). Melihat perkembangan harga minyak di pasaran internasional yang kurang menentu, maka alternatif yang perlu mendapat perhatian yaitu ekspor non-migas, terutama ekspor hasil industri yang mampu memiliki keunggulan komparatif di pasaran internasional. Berbagai kendala dan tantangan dalam usaha peningkatan ekspor non-migas, baik di dalam maupun di luar negeri dengan memperhitungkan semua variabel yang dianggap signifikan untuk mempengaruhi peningkatan ekspor Indonesia harus sedini mungkin diidentifikasi dan diantisipasi agar laju pertumbuhan ekonomi tidak terganggu.
- (2). Upaya peningkatan ekspor non-migas itu mencakup berbagai aspek yang saling menunjang, karena itu perlu ditangani secara terpadu yang mencakup berbagai hal. Yang penting diantaranya adalah keterpaduan dalam hal-hal (a) peningkatan efisiensi industri dalam negeri dan penurunan biaya produksi, (b) perbaikan transportasi dan arus lalu lintas antar pulau dan pelayanan samudera, (c) peningkatan mutu hasil produksi untuk ekspor, khususnya ekspor hasil pertanian dan industri, (d) perluasan kapasitas produksi, khususnya

untuk ekspor, sehingga kontinuitas dan perluasan permintaan luar negeri dapat terlayani dengan tepat waktu, (e) perbaiki sistem dan efisiensi dalam pembiayaan ekspor, (f) peningkatan usaha pemasaran secara lebih agresif dan terprogram melalui usaha-usaha promosi, lobbying, publikasi dan pameran dagang internasional,, (g) merangsang minat dunia usaha untuk aktif terjun ke pasar dan bekerja sama dengan pengusaha negara importir serta meningkatkan sistem informasi perdagangan yang lebih efektif dan efisien.

- (3). Perlunya diperluas proses reformasi perdagangan dengan (1) penyederhanaan luas dan definisi dari kategori-kategori perizinan, (2) membatasi ruang lingkup dan larangan maupun kuota impor dan ekspor, dan (3) terus mengurangi jumlah jenis barang yang terkena pembatasan, dan memfokuskan suatu rencana yang komprehensif bagi rasionalisasi bea masuk (tariff).
- (4). Sungguhpun kebijaksanaan pemerintah di bidang perdagangan bersifat deregulasi dan debirokratisasi yang menuju kearah liberalisasi di bidang perdagangan, namun kita harus waspada dan selalu mengikuti kebijaksanaan mitra dagang Indonesia yang utama, seperti Amerika Serikat, Jepang, Eropa Barat dan negara-negara industri baru (Korea Selatan, Taiwan, Hongkong, dan Singapura). Kebijakan perdagangan Indonesia perlu mengalami perubahan-perubahan dan penyesuaian-

penyesuaian sedemikian rupa sehingga tidak akan merugikan kepentingan nasional. Dalam hubungan ini selain pendekatan bilateral dengan mitra dagang Indonesia, maka kerja sama dan usaha bersama secara regional dan multilateral seperti dalam rangka ASEAN dan negara-negara berkembang perlu lebih ditingkatkan di masa-masa mendatang.

- (5). Agar impor bahan baku dan impor barang modal tidak menimbulkan masalah dalam perekonomian nasional, maka perlu ditempuh kebijaksanaan seperti pengembangan tanaman bahan baku industri yang selama ini di impor, dan pengalihan dari industri substitusi impor menjadi industri yang berorientasi ekspor, melalui perubahan strategi industrialisasi dari inward looking oriented menjadi outward looking oriented.
- (6). Semakin disadari bahwa peranan swasta, baik nasional maupun asing dalam pembangunan ekonomi nasional semakin besar artinya. Oleh karena itu, apabila diharapkan sektor swasta ini peranannya meningkat dari tahun ke tahun, maka pemerintah harus mengupayakan kemudahan-kemudahan dan memberikan insentif/perangsang kepada para investor seperti konsesi pajak, menyediakan fasilitas, mengusahakan tambahan jasa umum, memperluas bantuan dan memberikan subsidi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku - Buku

- Boediono, Ekonomi Internasional, Yogyakarta, BPFE - UGM, 1981.
- Dernburg, T.F. dan D.M. Mc Dougall, Ekonomi Makro, Perhitungan, Analisis dan Kebijakan Perekonomian, Edisi Keenam, Jakarta, Erlangga, 1985.
- Esmara, Hendra, Memelihara Momentum Pembangunan, Jakarta Gramedia, 1985.
- Hasanuddin, Basri, Perdagangan Internasional dan Pembangunan Ekonomi, Ujung Pandang, Lembaga Penerbit Universitas Hasanuddin, 1986.
- Hasibuan, Malayu S.P., Ekonomi Pembangunan dan Perekonomian Indonesia, Bandung, Armico, 1987.
- Jhingan, M.L., Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, Jakarta, Rajawali, 1988 (Alih Bahasa: D. Guritno).
- Kartasapoetra, G. dkk., Manajemen Penanaman Modal Asing, Jakarta, Bina Aksara, 1985.
- Kindleberger, C.P. dan Linder, P.H., Ekonomi Internasional, Edisi Ketujuh, Jakarta, Erlangga, 1986, (Alih Bahasa : Rudi P. Sitompul).
- Mangkusuwondo, Suhadi, Perdagangan dan Pembangunan, Jakarta, Lembaga Penerbit FE - Universitas Indonesia, 1986.
- Meier, G.M., Ekonomi Pembangunan Negara Berkembang, Teori dan Kebijakan, Jakarta, Bina Aksara, 1985, (Alih Bahasa : Sahat Simamora).
- M.S. Amir, Ekspor, Ekspor Impor: Teori dan Penerapannya, Seri Umum No. 3, Jakarta, Pustaka Binaman Pressindo, 1986.
- Panetto, A.R., Ekspor, Perkembangan Industri, Kesempatan Kerja dan Perkembangan Perekonomian Indonesia, Disertasi Doktor, Ujung Pandang, 1987. (tidak dipublikasikan).
- Sobri, Ekonomi Internasional, Teori, Masalah dan Kebijakan, Yogyakarta, BPFE - UII, 1986.

- K.Y. Chen, Edward, Export Expansion and Economic Growth in some Asian Economic: A Simultaneous Equation Model Growth and Resource, Vol.3, hal.284.
- Soediyono, Ekonomi Makro, Analisa IS-LM dan Permintaan-Penawaran Agregatif, Edisi Ketiga, Yogyakarta, Liberty, 1985.
- Soelistyo, Ekonomi Internasional, Edisi Kedua, Yogyakarta, Liberty, 1986.
- Sukirno, Sadono, Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Kebijakan, Jakarta, UI Press, 1985.
- Supranto, J., Ekonometrik, Buku dua, Jakarta, Lembaga Penerbit FE - UI, 1983.
- Steel, Robert G.D dan James H. Torries, Perinsip dan Prosedur Statistika, Jakarta, Gramedia, 1989.
- Tjokroamijoyo, Bintoro dan Mustopadidjaya, Teori dan Strategi Pembangunan Nasional, Jakarta, G.Agung, 1982.
- Todaro, Michael P., Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga; Jilid Kedua, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983, (Alih Bahasa : Aminuddin dan Mursid).
- Yusuf, M., Ekspor dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 1976-1985, Ujung Pandang, FE - UH, Skripsi, 1987.
- Zamhuri, M.Y., Ekspansi Ekspor, Impor Bahan Baku dan Barang Modal Serta Pertumbuhan Ekonomi, Ujung-Pandang, FE - UH, Skripsi, 1987.

Majalah/Terbitan

- Buletin Ekonomi Indonesia (Ekindo)
- Laporan Bulanan Bank Indonesia (Juli 1991)
- Majalah Ekonomi Keuangan Indonesia
- Tinjauan Ekonomi BNI 1946 No. 149.
- Majalah Prisma, Tempo
- Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia, BPS.
- Risalah Laporan Pertanggung Jawaban I ent